

**HASIL PENELITIAN  
DESAIN KURIKULUM MADRASAH ALIYAH (MA)  
BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA**

Oleh :  
**Dr. Muhammad Nasir, M.Ag  
Andi Achmad, M.Pd**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SAMARINDA TAHUN 2016**

## ABSTRAK

Muhammad Nasir dan kawan kawan, *Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia* tahun 2016

Perubahan kurikulum terakhir terjadi pada tahun 2013 yang dikenal dengan kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum ini ditandai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Struktur Kurikulum 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian dan Implementasi Kurikulum 2013. Sebelum pemberlakuan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP).

Menurut pemahaman sekilas penulis, beberapa hal yang baru secara konsep dari kurikulum 2013 ini adalah karakter tujuan atau kompetensi lulusan yang dikemas dalam bentuk integrasi dengan menekankan pada pendidikan karakter, karakteri pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifik dan karakter penilaian yang lebih detail dengan menekankan pada penilaian proses. Dari latar belakang dan pemahaman sekilas penulis tentang kurikulum 2013, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara sistematis dan menganalisis secara mendalam bagaimana sebenarnya karakteristik kurikulum 2013 ini terutama dari anatomi atau komponen kurikulum yaitu karakteristik tujuan, isi, pembelajaran dan penilaian.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis pesantren juga mengalami perubahan signifikan seiring dengan perubahan kurikulum tersebut. Apabila terjadi

Tujuan penelitian ini adalah; untuk mengetahui a) Karakteristik tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia. b) Karakteristik isi atau materi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia. ; c) Karakteristik model pembelajaran kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.; d) Karakteristik penilaian kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.; e) Apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa; **pertama**, tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis Pesantren terbagi menjadi empat bagian yaitu; tujuan akademik, tujuan sosial, tujuan spritual dan tujuan keterampilan. Dengan kata lain, terdapat empat kategori tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis pesantren. Dengan kata lain, Madrasah Aliyah (MA) harus mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; Dalam bahasa kurikulum kompetensi ini dibagi menjadi yaitu; 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pembagian tersebut merupakan penjabaran dari tiga kategori tujuan menurut Taksonomi Blomm yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah contoh dari tujuan atau Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah yang lulusannya diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

*Kedua*, karakteristik isi atau konten kurikulum Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu *Pertama*. Pondok Pesantren yang hanya mengembangkan kurikulum lokal berdasarkan karakteristik tujuan yang ditetapkan. *Kedua*, Pondok Pesantren yang memiliki tiga komponen kurikulum dengan kepentingan tertentu, masing-masing kurikulum kementerian pendidikan dan kebudayaan, kurikulum kementerian agama dan kurikulum lokal Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren yang disesuaikan dengan kepentingan pesantren.

*Ketiga*, Proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah (MA) Non Pesantren dengan Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan itu terlihat pada waktu dan metode pembelajaran yang diterapkan masing masing. Proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah (MA) pesantren ini adalah *Pertama*, metode klasik yang pelaksanaannya di lembaga pendidikan formal (madrasah) pada pagi hari, *kedua*, metode *Halaqah* yang pelaksanaannya pada saat pengajian atau pelajaran ekstra kurikuler keagamaan. Dengan kata lain, Pada prinsipnya, seluruh Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia menggunakan model mengajar dengan empat penekanan yaitu model mengajar personal, model mengajar sosial, model mengajar pemrosesan informasi dan model mengajar behavioristik. Secara khusus, Madrasah Aliyah (MA) Berbasis pesantren memiliki karakter proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran perorangan (individual), metode kelompok, metode ceramah variasi, metode tanya jawab, metode simulasi, metode demonstrasi, metode kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode *role playing*, metode wetonan metode sorogan dan sistem takhasus.

*Keempat*, Secara umum model penilaian yang diterapkan di Madrasah terbagi dalam dua bentuk yaitu 1) Model penilaian akademik. Aspek akademik ini meliputi; a) memiliki nilai rapor yang lengkap untuk kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga); b) telah memiliki nilai ujian untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan; c) tidak terdapat nilai  $\leq 4,25$  baik untuk ujian tulis maupun ujian praktek seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tidak boleh  $\leq 4,50$ . Dan 2) model penilaian Aspek Non-Akademik yang meliputi: a) nilai rata-rata kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian) pada semester II kelas III minimal baik. b) Kehadiran di sekolah pada semester I dan II kelas III minimal 90 % dari jumlah hari efektif. Jika dikaitkan dengan model penilaian Kurikulum 2013, pada dasarnya, Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren

menggunakan empat jenis penilaian yaitu; 1) penilaian diri sendiri, penilaian sosial, penilaian akademik dan penilaian keterampilan.

*Kelima* problem pendidikan yang mempengaruhi pendidikan nasional dewasa ini adalah Sumber daya guru yang belum profesional, kurangnya tenaga guru yang profesional. Problem operasional, yaitu profesionalisme guru masih rendah, dan Faktor yang menghambat perkembangan madrasah selama ini adalah keterbatasan tenaga guru, ketidakjelasan status guru dan ketidaklayakan kualifikasi guru. Lebih jauh, Nurahid melalui penelitiannya tentang pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) menyebutkan bahwa yang melatarbelakangi problem institusi Madrasah Aliyah Umum adalah kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan, di samping itu juga masih kurangnya tenaga guru, terbatasnya dana anggaran pendidikan, kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan siswa, jumlah mata pelajarannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat dan orientasinya tidak jelas serta faktor siswa ini juga menjadi problem tersendiri, seperti latar belakang pendidikan siswa banyak lulusan dari SMP, di samping itu *inputnya* rendah, anaknya memang bandel, malas, dan tidak memiliki *basic* agama yang baik. Di sisi lain problem yang terjadi di lapangan disebabkan karena masih banyak sarana-prasarana pembelajaran yang tidak layak, maka dengan tegas Arif Rahman berpendapat, bahwa titik lemahnya pendidikan itu disebabkan karena lemahnya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Signifikasi Penelitian .....	8
F. Kerangka Pikir Peneltian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II : KONSEP KURIKULUM DAN MADRASAH.....	13
A. Konsep Kurikulum dalam Pendidikan .....	13
1. Pengertian Kurikulum .....	13
2. Landasan Pengembangan Kurikulum .....	14
3. Pengembangan Tujuan dan Pengembangan Kurikulum .....	18
4. Pengembangan Isi dalam Pengembangan Kurikulum .....	20
5. Pengembangan Strategi dalam Pengembangan Kurikulum .....	21
6. Pengembangan Penilaian dalam Pengembangan Kurikulum .....	26
7. Implementasi Kurikulum.....	29
8. Dinamikan dan Perubahan Kurikulum .....	30
9. Prinsip-Prinsip Perubahan Kurikulum .....	31
B. Model Model Konsep Kurikulum.....	18
1. Kurikulum Subjek Akademik.....	18
2. Kurikulum Humanistik.....	33
3. Kurikulum Teknologis .....	35
4. Kurikulum Rekonstruksi sosial. ....	37
C. Konsep Madrasah Di Indonesia .....	40
1. Institusi Pendidikan Pra Madrasah .....	40
2. Pemgertian dan Sejarah Madrasah .....	41
3. Kurikulm Madrasah di Indonseia .....	43

<b>BAB III</b>	<b>: PONDOK PESANTREN DAN KARAKTERISTIKNYA.....</b>	<b>45</b>
	A. <b>Sejarah Berdiri Pesantren .....</b>	<b>45</b>
	B. Unsur–Unsur Sistem Pendidikan Pesantren .....	50
	C. Tipologi Pesantren	
<b>BAB IV</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>66</b>
	A. Karakteristik tujuan Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia .....	66
	B. Karakteristik Isi atau Konten Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia .....	78
	C. Karakteristik Proses Pembelajaran Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia .....	84
	D. Karakteristik Evaluasi dan Penilaian Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia.....	94
	E. Problem Pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) di Indonesia .....	108
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
	A. Kesimpulan.....	119
	B. Rekomendasi .....	122
	DAFTAR PUSTAKA .....	123
	BIOGRAFI SINGKAT PENELITI	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan seru sekalian Alam. Berkat rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua, khususnya kepada kami sebagai tim peneliti sehingga penelitian yang berjudul “.Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia Selanjutnya kami mengirimkan *shalawat dan Taslim* kepada Nabiullah Muhammad Saw. Nabi akhir zaman karena dialah *khatam al-ambiya wa al-mursalim* (penutup para nabi dan rasul)

Melalui kata pengantar hasil penelitian ini kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan penelitian ini mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal, pengumpulan hingga pembahasan atau seminar hasil penelitian sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Secara khusus ucapan terima kasih ini kami ingin menyampaikan kepada :

1. Kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Samarinda atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan penelitian dalam rangka melatih diri untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dalam hal penelitian, mengingat penelitian merupakan salah satu tugas pokok dosen.
2. Kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian ini baik dalam bentuk pemberian informasi tentang referensi yang terkait dengan topik penelitian ini maupun dalam bentuk dukungan motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah beberapa kali dilakukan pembaharuan atau inovasi kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejarah perkembangan pengembangan kurikulum di Indonesia memperlihatkan telah diadakan sembilan kali minimal pembaharuan kurikulum. Pembaharuan pertama dilakukan dengan pemberlakuan Rencana Pelajaran 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial Belanda. Rencana Pelajaran 1947 berada dalam zamannya "*developmental conformism*" (1941-1956). Zaman tersebut menekankan pendidikan kepada pembentukan karakter manusia.

Pembaharuan kedua terjadi dengan pemberlakuan kurikulum dengan sebutan Rencana Pendidikan 1964. Pemikiran dan usaha pembaharuan yang mendorong lahirnya rencana tersebut antara lain adalah tentang perlunya Indonesia mengejar ketinggalannya di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu-ilmu alam (*science*) dan matematika. Pemikiran dan usaha tersebut didasari oleh gagasan Bruner. Ia salah seorang tokoh "*scholarly structuralism*" (1957-1967) dan reformis pendidikan yang mengawali usaha perbaikan program pelajaran science dan matematika dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah di Amerika Serikat. Pembaharuan ketiga terjadi dengan dikeluarkannya Kurikulum 1968. Pergantian kurikulum tersebut ditandai oleh keadaan politik, yaitu alih orde dari Orde Lama menjadi Orde Baru pada tahun 1966. Keadaan politik pada waktu itu menuntut adanya perubahan radikal pemerintahan Orde Lama dalam segala aspek kehidupan termasuk pendidikan.

Pembaharuan keempat terjadi dengan diterbitkannya Kurikulum 1975/1976/1977. Lahirnya kurikulum tersebut ditandai dengan usaha-usaha yang sistematis dalam penyusunannya. Beberapa hasil evaluasi kurikulum yang dijadikan dasar dalam melakukan inovasi kurikulum pada saat ini adalah; a) hasil uji coba kurikulum melalui



Sekolah Laboratorium IKIP Malang selama Pelita I/1969-1974 dan hasil suatu team dari badan Pengembangan Pendidikan yang bertugas menganalisa kurikulum yang berlaku; b) hasil seminar identifikasi problema pendidikan pada tahun 1969 yang membahas segala segi dan permasalahan pendidikan seperti tujuan pendidikan, relevansi kurikulum dengan kepentingan anak, metode pembelajaran persyaratan guru dan usaha usaha untuk memenuhi persyaratan itu, demokratisasi kurikulum dan evaluasi.<sup>1</sup> Di antara ciri khas kurikulum pada periode ini adalah pemberlakuan sekolah labolatorium di sepuluh Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri, uji coba belajar tuntas (*mastery learning*), penggunaan modul dan sekolah-sekolah terbuka.

Pembaharuan kelima terjadi dengan diterbitkannya Kurikulum Sekolah Menengah Atas 1984 yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 1975 Yang Disempurnakan, dan Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan kerja dan industri. Pembaharuan keenam terjadi dengan diterbitkannya Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 1994 yang disesuaikan dengan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pelaksanaan.<sup>2</sup>

Pembaharuan ketujuh terjadi pada saat Bangsa Indonesia sedang dilanda krisis multidimensi, yaitu dengan dikembangkannya Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 2004 yang dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum ini disesuaikan dengan tuntutan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Pembaharuan kedelapan terjadi setelah terbentuknya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) pada tahun 2004. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dengan berpatokan pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh BSNP. Kurikulum ini selanjutnya dikenal sebagai Kurikulum Tingkat

---

<sup>1</sup>Laporan Pelaksanaan Banprof TPK Provinsi melalui Jarkur, Puskur 2007

<sup>2</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Jogyakarta ; Ar-Ruzz Media, 2010), h. 15 - 30

Satuan Pendidikan (KTSP). Meskipun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada dasarnya adalah kelanjutan dari kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), atau dengan bahasa penulis bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah konsep manajemen kurikulum, sementara Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) adalah konsep isi kurikulum.

Perubahan kurikulum terakhir terjadi pada tahun 2013 yang dikenal dengan kurikulum 2013. Pemberlakuan kurikulum ini ditandai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang Struktur Kurikulum 2013, Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, Standar Penilaian dan Implementasi Kurikulum 2013. Sebelum pemberlakuan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP).

Menurut pemahaman sekilas penulis, beberapa hal yang baru secara konsep dari kurikulum 2013 ini adalah karakter tujuan atau kompetensi lulusan yang dikemas dalam bentuk integrasi dengan menekankan pada pendidikan karakter, karakter pembelajaran yang menekankan pada pendekatan saintifik dan karakter penilaian yang lebih detail dengan menekankan pada penilaian proses. Dari latar belakang dan pemahaman sekilas penulis tentang kurikulum 2013, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara sistematis dan menganalisis secara mendalam bagaimana sebenarnya karakteristik kurikulum 2013 ini terutama dari anatomi atau komponen kurikulum yaitu karakteristik tujuan, isi, pembelajaran dan penilaian.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis pesantren juga mengalami perubahan signifikan seiring dengan perubahan kurikulum tersebut. Apabila terjadi

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan diskripsi pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ”bagaimana karakteristik kurikulum madrasah berbasis Pesantren di Indonesia ?. Dalam hal ini, rumusan masalah di atas meliputi

1. Bagaimana karateristik tujuan kurikulum madarash berbasis pesantren di Indonesia.?
2. Bagaimana karakteristik isi ata materi kurikulum madarasah berbasis pesantren di Indonesia. ?
3. Bagaimana karateristik modelpembelajaran kurikulum madarash berbasis pesantren di Indonesia.?
4. Bagaimana karakteristik penilaian kurikulum madarash berbasis pesantren di Indonesia.?
5. Problem apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kurikulum Madrasah berbasis pesantren di Kallimantan Timur

### **2. Tujuan Khusus**

Secara rinci tujuan khusus yang diperoleh melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal sebagai berikut;

- a. Karateristik tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.

- b. Karakteristik isi atau materi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.
- c. Karakteristik model pembelajaran kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.
- d. Karakteristik penilaian kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia..
- e. Apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL PENELITIAN**

Dalam pengembangan kurikulum, dikenal istilah anatomi kurikulum. Anatomi kurikulum ini terdiri tujuan, isi, strategi dan penilaian. Dalam berbagai literatur, mayoritas pakar kurikulum menyebutkan bahwa anatomi atau komponen kurikulum terdiri dari empat hal di atas. Di antara pakar kurikulum yang menyebutkan adalah Ralph Tyler dalam bukunya yang berjudul "*Basic Principles of Curriculum and Interaction*,"<sup>3</sup> Murry Print dalam bukunya yang berjudul "*Curriculum Development and Design*,"<sup>4</sup> Sells dan Miller dalam bukunya yang berjudul "*Curriculum Perspective and Practice*,"<sup>5</sup> dan beberapa penulis Indonesia seperti Nana Syaodih,<sup>6</sup> Oemar Hamalik,<sup>7</sup> Muhaimin<sup>8</sup> dan Rudi Susilana dan kawan-kawan.<sup>9</sup>

---

<sup>3</sup> Ralph Tyler, *Basic Principles of Curriculum and Interaction*. (Chicago : The University of Chicago Press, 1949). h. 1-10.

<sup>4</sup> Murry Print dalam bukunya yang berjudul "*Curriculum Development and Design*". (Sydney : Allen and Unwin, 1993), h. 25 - 55

<sup>5</sup> Miller, John P. dan Sells, Wayne, (1985) *Curriculum Perspective and Practice*, (Longman : New York dan London, 1985), h. 30 - 100.

<sup>6</sup> Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung : PT Rosdakarya, 2008) h. 105 - 125.

<sup>7</sup> Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT Rosdakarya, 2008)

Dengan demikian, untuk menghindari adanya perbedaan pemahaman dan pengertian terhadap istilah atau makna judul penelitian ini, maka pemaknaan secara operasional terhadap fokus penelitian ini perlu dilakukan. Karakteristik kurikulum adalah ciri atau pola yang melekat pada kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren. Dalam hal ini terbagi menjadi empat bagian pokok yang menjadi fokus penelitian yaitu; a) ciri atau pola yang melekat pada tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia berupa hirarki tujuan, kategori tujuan, sifat tujuan dan penggunaan istilah tujuan.; b) ciri atau pola yang melekat pada isi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia berupa cakupan isi, sifat isi, dan bahan ajar; c) ciri atau pola yang melekat pada strategi pembelajaran kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia berupa karakter pendekatan yang digunakan, kecenderungan model mengajar, penekanan metode yang diinginkan, teknik dan taktik pembelajaran yang dianggap relevan; d) ciri atau pola yang melekat pada sisi penilain yang ditekankan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia berupa model-model penilaian yang digunakan, ruang lingkup penilaian, dan lain-lain serta e) Problem apa saja yang dihadapi dalam mengelola Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia.

Tabel di bawah menggambarkan indikator yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini.

---

h. 129 - 156.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Sekolah dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007) h. 122-130.

<sup>9</sup> Rudi Susilana dan Kawan-Kawan, *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Bandung : Tim Pengembangan MKDP dan Pembelajaran Jurusan Kurikulum dan Tekbologi Pendidikan UPI Bandung, 2006) h. 31-90.

Tabel 1.1  
Indikator Penelitian Tantang Karakteristik Kurikulum Madrasah

1	Karakteristik Tujuan Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Istilah -Istilah Tujuan</li> <li>b. Hirarki Tujuan</li> <li>c. Kategori Tujuan</li> <li>d. Sumber Tujuan</li> </ul>
2	Karakteristik Isi Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cakupan isi</li> <li>b. Kategori Isi</li> <li>c. Sifat isi</li> <li>d. Bahan ajar</li> </ul>
3	Karakteristik Pembelajaran Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan Pembelajaran</li> <li>b. Strategi Pembelajaran</li> <li>c. Metode Pembelajaran</li> <li>d. Teknik Pembelajaran</li> <li>e. Model Pembelajaran</li> </ul>
4	Karakteristik Penilaian Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis Penilaian</li> <li>b. Proses Penilaian</li> <li>c. Penilai</li> <li>d. Hasil Penilaian</li> </ul>
5	Problem apa saja yang dihadapi dalam mengelola Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Internal</li> <li>b. Eksternal</li> </ul>

## **E. SIGNIFIKANSI PENULISAN**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua segi yaitu; manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian perbandingan lebih lanjut bagi para peneliti, pendidik, pengamat pendidikan, dosen dan pengembang kurikulum dalam pengembangan kurikulum madrasah berbasis pesantren di Indonesia

Secara praktis, diharapkan hasil pengembangan model ini, dapat memberikan manfaat bagi ;

1. Seluruh tenaga pendidik baik di sekolah maupun madrasah dalam memahami secara kurikulum secara mendalam dan utuh. Pemahaman yang mendalam dan utuh terhadap kurikulum ini tentu memudahkan mereka dalam mengimplementasikannya di kelas dengan baik .
2. Seluruh mahasiswa Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) terutama mahasiswa Fakultas atau Jurusan Tarbiyah dalam mengkaji dan memahami substansi kurikulum madrasah berbasis pesantren. Sebagai calon pendidik masa depan yang tentu harus memiliki kompetensi paedagogik, memahami hal-hal yang sifatnya baru dalam dunia kurikulum adalah sebuah kemestian. Pemahaman yang baik terhadap kurikulum yang baru ini akan memudahkan mereka dalam melakukan Praktek Mengajar atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Sekolah dan Madrasah.
3. Seluruh Dosen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) seperti Fakultas atau Jurusan Tarbiyah. Sebagai dosen yang bertugas mendidik dan menjadi bagian penting dalam melahirkan guru yang berkarakter, pada dosen juga wajib hukumnya memahami perkembangan kurikulum di negara ini, termasuk kurikulum madrasah yang berbasis pesantren
4. Peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan tentu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi awal untuk melakukan kajian

terhadap kurikulum dalam perpektif yang berbeda. dengan fokus dan penekanan yang berbeda.

## **F. KERANGKA PIKIR PENELITIAN**

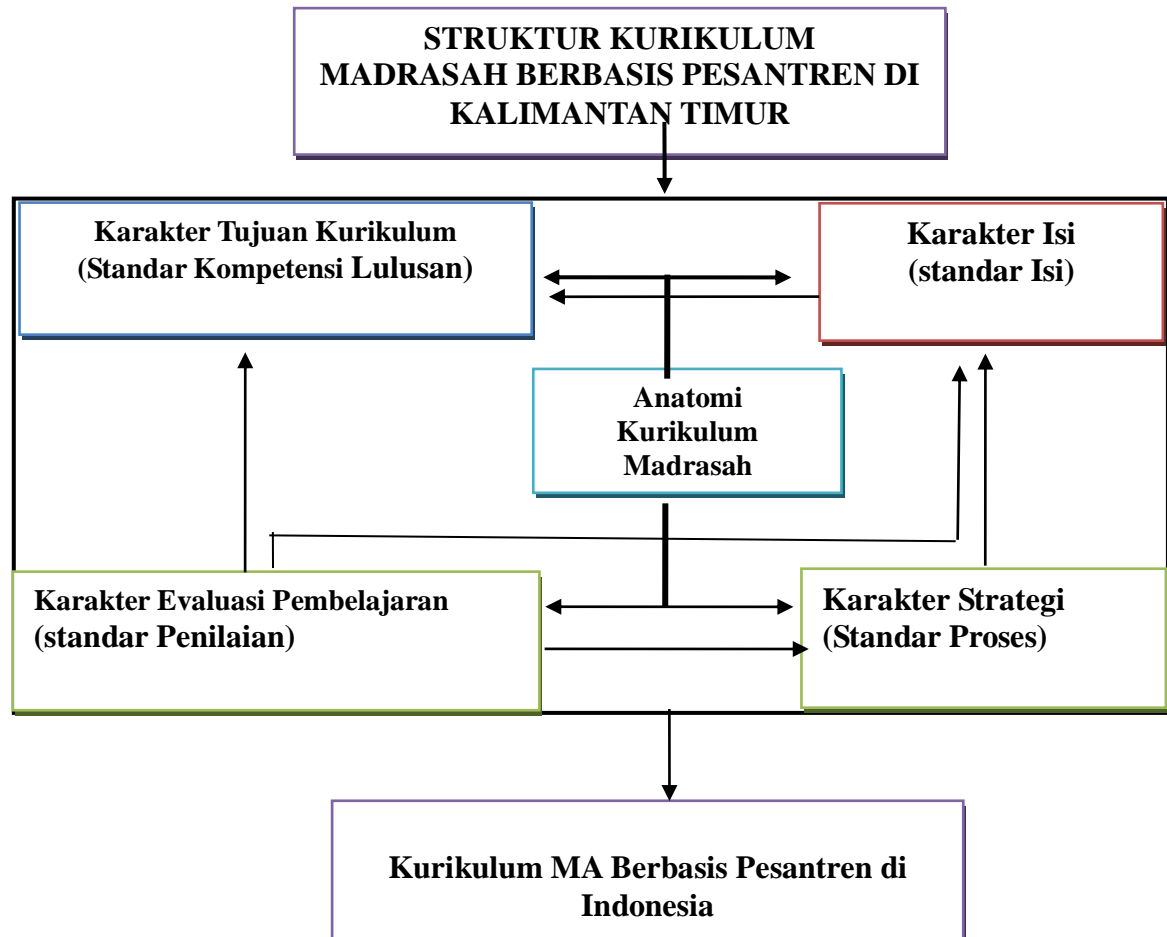
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti merumuskan sebuah kerangka pikir penelitian. Kerangka pikir penelitian inilah yang akan menjadi acuan utama, titik awal dan arahan yang jelas dan sistematis dalam melakukan penelitian ini. Pada bagan di bawah ini, tergambar bahwa peneliti akan memulai melakukan penelitian dengan mengkaji secara utuh struktur kurikulum madrasah berbasis pesantren di Kalimantan Timur

Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap karakteristik anatomi kurikulum madrasah berbasis pesantren secara rinci mulai dari karakteritik tujuan atau Standar Kompetensi Lulusan (SKL), karakteristik isi atau Standar Isi (SI), karakteristik strategi atau model pembelajaran yang dalam hali ini adalah Standar Proses (SP) dan Karakteristik evaluasi atau Standar Penilaian.

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan secara utuh, mendalam dan sistematis bagaimana karaktetistik kurikulum Madrasah berbasis pesantren baik Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) Secara sederhana kerangka pikir penelitian yang dianut oleh peneliti dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



**Bagan I**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## G. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian literatur atau penelitian pustaka. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian literatur adalah penelitian kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur berupa buku, hasil penelitian terdahulu, artikel dan lain lain.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (PT Rosdakarya : Bandung, 2008), h. 96.

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi sumber data utama adalah buku, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian literal, karena data-data yang akan dikumpulkan bersumber dari buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu dan lain-lain yang dibutuhkan, maka digunakan Teknik dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang yang tertulis.<sup>11</sup> Teknik ini dibutuhkan untuk melihat dokumen-dokumen tertulis berupa buku, diktat, peraturan-peraturan, majalah, hasil penelitian, artikel dan lain-lain.

Untuk menganalisis data dari dokumen, peneliti memaparkan atau mendeskripsikan data tersebut apa adanya, kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif yaitu menggambarkan sesuatu dengan kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori dan pola tertentu untuk memperoleh kesimpulan tertentu pula.<sup>12</sup> Analisis deskriptif juga dapat dilakukan dengan memulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan kesimpulan atau verifikasi.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan reduksi data (*data reduction*) Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam melakukan reduksi data, peneliti dipandu oleh tujuan penelitian.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*,

<sup>12</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian....* H. 245.

<sup>13</sup> Mattheuw B. Milles dan A. Michael Huberman yang diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul "Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru (Jakarta : Universitas Indonesia, 1992) h. 15-21.

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Research and*

Setelah data direduksi,peneliti melakukan penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian singkat atau bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini, penyajian data dalam penelitian dilakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Miles dan Hiberman dalam Sugiono menyebutkan bahwa penyajian data dapat dilakukan dalam teks naratif, grafik, matrik, jejaring kerja (*network*) dan chart<sup>15</sup>

Langkah terakhir dari analisa data ini adalah verifikasi atau *conclusion drawing*. Kesimpulan yang diperoleh tentu didasarkan pada tujuan awal penelitian.

---

*Development*, (Bandung : Alfabeta, 2008) h. 338 -339

<sup>15</sup> Sugiiono, *Metode Penelitian*,...h. 340 -342

## **BAB II**

### **KONSEP KURIKULUM DAN MADRASAH**

#### **A. KONSEP KURIKULUM DALAM PENDIDIKAN**

##### **1. Pengertian Kurikulum**

Terjadi perbedaan oleh para ahli kurikulum termasuk dalam hal para guru dalam memberikan definisi istilah kurikulum. Para guru memandang bahwa yang disebut kurikulum adalah sejumlah daftar mata pelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik. Sementara yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kurikulum adalah seluruh materi pelajaran secara utuh. Pendapat yang hampir mirip adalah yang menganggap kurikulum sebagai seperangkat pengalaman belajar terencana yang akan ditawarkan oleh para guru kepada peserta didik.

Definisi berikut ini dikemukakan oleh Ralph Tylor<sup>16</sup> dengan menyatakan bahwa kurikulum adalah keseluruhan pembelajaran siswa yang direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara D.K. Wheeler menyatakan kurikulum adalah pengalaman yang direncanakan dan ditawarkan kepada peserta didik di bawah pengawasan sekolah.<sup>17</sup> Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ralph Tylor, *Basic Principles* ...h. 12

<sup>17</sup> Murry Print, *Curriculum Development* ... h. 25

<sup>18</sup> Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003, Lihat juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PeratPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Walaupun terjadi perbedaan dalam mendefinisikan kurikulum, akan tetapi masih terdapat kesamaan-kesamaan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, Murray Print mengemukakan bahwa kurikulum meliputi : *Planned learning experience, offered within educational institution or program, represented as a document and includes experience resulting from implementing that document.* Print menganggap bahwa kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen serta hasil dari implementasi dokumen yang telah disusun.<sup>19</sup>

## 2. Landasan Pengembangan Kurikulum

Dari mana seorang pengembang kurikulum memperoleh dasar pemahaman tentang pendidikan dan kurikulum. Pemikiran para pengembang kurikulum tidak eksis dalam kevakuman. Keberadaan informasi itu berasal dari orang yang menggambarkan kebutuhannya. Data base ini kemudian menjadi landasan dalam mengkonseptualkan kurikulum yang akan dibangun. Landasan di sini didefinisikan sebagai dasar kekuatan yang mempengaruhi dan membentuk pemikiran pengembang kurikulum yang kemudian menjadi isi dan struktur kurikulum. Dalam literatur, wilayah ini dibedakan ke dalam tiga kategori secara umum untuk landasan kurikulum.; a) studi tentang siswa dan teori belajar. (*psikology*); b) studi tentang kehidupan yaitu sosiologi dan kebudayaan (*sosiology*); c) studi tentang alam dan nilai (*philoshopy*). Beberapa pakar kurikulum menyebutkan bahwa landasan pengembangan kurikulum bukan hanya tiga hal di atas, tetapi terdapat landasan yang lain yang juga mendukung seorang pengembangan kurikulum dalam melakukan pengembangan kurikulum. Beberapa landasam yang lain adalah landasan teknologis, landasan organisatoris <sup>20</sup>dan landasan agama.

---

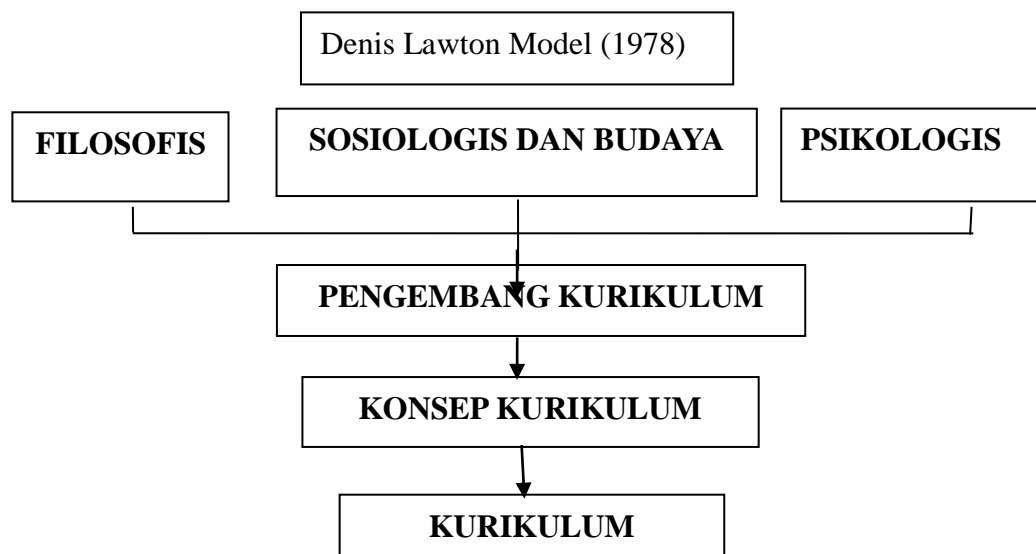
<sup>19</sup> Murry Print, *Curriculum Development*, h. 75

<sup>20</sup> Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum*, .. h. 17. Lihat juga Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 76.

Secara khusus bagan di bawah ini menjelaskan tentang landasan pengembangan kurikulum dan poin-poin yang berhubungan dengannya yaitu a) pengembang kurikulum memiliki pandangan tentang dasar pengetahuan dan apa manfaatnya. (Filosofis), b) pandangan-pandangan itu diatur dalam konteks pengembang atas dasar pemahaman sosial dan budaya serta kebutuhan masyarakat pada masa yang akan datang (sosiologis dan budaya), c) kontribusi psikologi, hakekat siswa dan bagaimana siswa belajar yang kemudian dimodifikasi dengan pandangan sebelumnya (psikologis) dan d) sumber-sumber landasan inilah secara bersama-sama yang menjadi dasar informasi bagi pengembang kurikulum mengambil keputusan kurikulum masa depan

Apabila pengembang kurikulum menggabungkan dengan pengalaman masa lalunya, maka kita dapat melihat kecenderungan konsep tertentu dalam tugas kurikulum dan apabila landasan kurikulum dan konsep kurikulum dilihat secara terkait untuk konteks kurikulum, maka kita dapat menjelaskan bagaimana produk akhir sebuah kurikulum

**Bagan 1**  
**Landasan Pengembangan Kurikulum**



Menurut Murray Print, ada tiga landasan pengembangan kurikulum. Ketiga landasan yang dimaksud adalah landasan filosofis, (*Philosophical sources*), Landasan Sosial Budaya (*Sociological Sources*) dan landasan psikologis (*Psychological Sources*). Secara filosofis Filsafat dan asumsi filosofis dianggap sebagai dasar dari semua landasan kurikulum sebagai sesuatu yang terkait dengan bagaimana kita menghadap atau melihat kehidupan. Filsafat terkait dengan klarifikasi konsep dan dalil-dalil dalam pengalaman dan aktifitas yang dapat dimengerti. Memahami filsafat sebagai salah satu landasan pengembangan kurikulum adalah sangat mendasar untuk menciptakan pernyataan-pernyataan yang dapat diterima tentang pengalaman yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagaimana seorang pengembang kurikulum mempersepsi dunia. Oleh karena itu, pendidikan ditekankan pada tiga pertanyaan secara filosofis yaitu apakah yang disebut realitas ?, apa itu baik ?, dan apa itu kebenaran.? filsafat sebagai salah satu cabang ilmu memiliki tiga cabang kaitannya dengan pengambilan keputusan kurikulum

Kontribusi sumber psikologi untuk landasan pendidikan sangat signifikan dan terus mengalami perkembangan sebagai sebuah disiplin yang relative baru. Ruang lingkup pengembangan konsep, prinsip dan proses ilmu ini sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Jika tujuan psikologi adalah mempelajari tingkah laku manusia , maka para psikolog menfokuskan diri pada penggambaran, penjelasan, prediksi dan investigasi perilaku manusia. Oleh karena itu, paling tidak ada lima hal yang perlu diperhatikan oleh pengembang kurikulum kaitannya dengan landasan psikologis yaitu;

- a. Tujuan pendidikan. Memahami psikologi pendidikan membantu pengembang kurikulum dalam menemukan dan mengungkap tujuan yang jelas dan sesuai. Selain itu, melalui pemahaman tersebut, para pengembang kurikulum dapat menentukan tujuan yang pantas sesuai dengan tingkat perkembangan anak.

- b. Karakteristik peserta didik. Memahami sifat dan karakteristik alami peserta didik, perbedaan individual dan personality akan sangat membantu pengembang kurikulum untuk menentukan pilihan yang sesuai dalam mengambil keputusan kurikulum Proses pembelajaran. Pemahaman tentang bagaimana manusia belajar juga merupakan salah satu kajian psikologi yang pada akhirnya sangat berperan bagi pengembang kurikulum.
- c. Metode pengajaran. Psikologi membuat kontribusi yang sangat besar dalam menyeleksi pengalaman belajar dan metode pengajarannya di kelas. Dalam proses seleksi metode, pengembang kurikulum memperhitungkan teori-teori belajar. Prosedur penilaian. Psikologi juga membantu pengembang kurikulum dalam memahami secara langsung bagaimana mengevaluasi siswa dan guru.

Landasan sosiologis juga dianggap sebagai salah satu landasan pengembangan kurikulum. Sekolah dianggap sebagai salah satu tempat untuk menjamin kelangsungan hidup kebudayaan yang diwariskan. Pengembangan kurikulum kaitannya dengan tugas sekolah tersebut harus mewujudkan fungsi menterjemahkan asumsi tradisional, ide, nilai, pengetahuan dan sikap ke dalam tujuan, isi, aktifitas pembelajaran dan evaluasi. Elemen-elemen kurikulum tersebut, sumber sosiologis memiliki dampak yang sangat besar atas isi kurikulum. Dalam melakukan fungsi ini, pengembangan kurikulum berfungsi meneruskan dan merefleksikan budaya yang menjadi bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah mungkin membicarakan kurikulum yang bebas nilai. Dalam rangka menjaga agar kurikulum yang dikembangkan jauh dari bebas nilai atau nilai-nilai yang tidak baik dan tidak sesuai dengan budaya masyarakat, maka tugas utama pengembang kurikulum adalah melakukan seleksi secara ketat atas berbagai budaya baik dari luar maupun dari dalam.<sup>21</sup>

Pengembang kurikulum harus memiliki kesadaran tentang dampak sosial budaya. Ia juga harus memiliki pikiran untuk melakukan reproduksi dari aspek-aspek

---

<sup>21</sup> Muury Print, *Curriculum Development*, ... h. 10-33



social budaya ke dalam kurikulum.

#### 4. Pengembangan Tujuan dan Pengembangan Kurikulum

Berikut penjelasan tentang *Aims*, *Goals*, dan *Objectives* secara sederhana : Istilah *aims* digunakan sebagai tujuan pendidikan yang merupakan harapan dan keinginan dari suatu masyarakat, atau apa yang diharapkan atau ingin dicapai oleh kurikulum secara luas. Atau dengan kata lain, *aims* merupakan tujuan suatu pendidikan secara umum dan menunjukkan jangka waktu yang relatif panjang dan berlaku untuk beberapa tahun. Sementara, Istilah *goals* digunakan untuk tujuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan *aims*. Secara jelasnya *goals* merupakan tujuan kurikulum yang dijabarkan dari *aims*. Biasanya diungkapkan dalam bahasa yang tidak bersifat teknis, juga diarahkan pada pencapaian prestasi siswa dengan meningkatkan isi dan *skill*. Cara lain untuk mengkonseptualisasikan *goals* adalah dengan mempertimbangkannya sebagai cara dari suatu institusi dan organisasi beserta masyarakat dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan.

Oleh karena itu, jika umpamanya tujuan (*aims*) sistem pendidikan itu adalah membuat siswa bisa membaca dan berhitung, maka tujuan (*goals*)-nya adalah cara suatu institusi pendidikan secara umum dalam mencapai tujuan (*aims*) tersebut. *Goals* merupakan tujuan yang bersifat jangka menengah. Selanjutnya *Objectives* merupakan rumusan tujuan kurikulum yang paling spesifik, yakni apa yang seharusnya siswa pelajari melalui interaksi dengan suatu kurikulum. *Objectives* menekankan pada perubahan tingkah laku siswa. *Objectives* merupakan penjabaran dari *aims* dan *goals*, dan dinyatakan secara jelas, menggunakan bahasa teknis dan istilah-istilah perilaku.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Murry Print, *Cuurriculum Development*. ... h. 110

**Tabel 1**  
**Hubungan antara *Aims*, *Goals*, dan *Objectives*<sup>23</sup>**

<b>KRITERIA</b>	<b>AIMS</b>	<b>GOALS</b>	<b>OBJECTIVES</b>
<b>DEFINISI</b>	Secara umum dinyatakan tentang apa yang harus dicapai oleh suatu kurikulum	Tujuan kurikulum yang dinyatakan secara lebih jelas dan merupakan penjabaran dari aims	Pernyataan yang lebih spesifik tentang tujuan suatu program dan merupakan penjabaran dari goals
<b>EKSPRESI</b>	Dinyatakan secara luas, menggunakan bahasa yang tidak bersifat teknis	Secara umum dinyatakan dengan bahasa yang tidak bersifat teknis.	Bahasa yang bersifat teknis, kata kunci yang tegas, dapat menggunakan istilah perilaku
<b>WAKTU</b>	Tujuan jangka panjang, biasanya untuk beberapa tahun	Tergantung pada bagaimana tujuan jangka ( <i>aims</i> ) tersebut dijabarkan ke dalam <i>goals</i> .	Jangka pendek, mencakup tujuan suatu pengajaran, satu hari, satu minggu, satu smt.
<b>DINYATAKAN OLEH</b>	Dinyatakan oleh masyarakat melalui bentuk-bentuk seperti politisi, sistem pendidikan, kelompok penekan.	Otoritas pendidikan dalam suatu sistem, level daerah, perumus silabus, dokumen kebijakan sekolah.	Guru kelas secara individual, kelompok guru

Sementara ciri-ciri tujuan (*objectives*) yang efektif adalah;

- a) *Comprehensiveness*. Tujuan kurikulum ini mesti dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai masukan di antaranya adalah dari berbagai kalangan profesi, dan mesti mempertimbangkan perkembangan-perkembangan zaman serta perkembangan-perkembangan politik ekonomi yang terjadi. Komprehensif berarti tujuan kurikulum dirumuskan mesti mencakup ketiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik

<sup>23</sup> Murry Print, *Curriculum Development*, ... h. 118

- b) *Consistency*. Tujuan kurikulum itu harus terlihat hubungan secara efektif dan konsisten dengan unsur-unsur lainnya. Salah satu sumber kekacauan atau ketidakjelasan tujuan adalah ketika tujuan khusus ini dirumuskan tanpa merujuk kepada tujuan umum (*aims, goals*).
- c) *Attainability*. Tujuan kurikulum dirumuskan mesti memungkinkan dapat dicapai oleh siswa.
- d) *Suitability*) “kesesuaian dengan kebutuhan siswa dan siapa yang berhak menentukan kesesuaian tersebut”. Para pengembang kurikulum sepakat, bahwa tujuan kurikulum mesti disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan siswa.
- e) *Validity*. Tujuan harus merefleksikan realitas apa yang mereka maksud, atau tujuan mesti menggambarkan apa yang mereka ingin capai.
- f) *Specificity*. Tujuan pendidikan tersebut harus dirumuskan secara tepat, jelas dan spesifik. Tujuan yang tidak jelas dan tidak spesifik akan sulit dipahami baik oleh murid maupun oleh guru. Khususnya oleh guru, akan sulit untuk dapat mengimplementasikan dan merealisasikannya. Maka untuk itu, tujuan ini mesti disusun dalam bentuk rumusan perilaku yang jelas dan spesifik.<sup>24</sup>

## 5. Pengembangan Isi dalam Pengembangan Kurikulum

Isi Kurikulum adalah bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai (*values*) yang terkait dengan bahan ajar yang disampaikan tersebut. Agar menjadi guru yang efektif, penulis menyebutkan isi kurikulum sebagai berikut: a) pengetahuan yang berisi fakta, prinsip, dan generalisasi yang ada dalam bahan ajar.; b) pengetahuan pendidikan meliputi metode yang digunakan guru dalam mengajar agar siswanya benar-benar memahami materi ajar.; c) pengetahuan kurikulum, yakni pemahaman terhadap konteks kurikulum untuk

---

<sup>24</sup> Beauchamb, .A. George. *Curriculum Theory*, Edisi III, Illinois Wilmette. 1975. 10- 54.

mengajarkan pengetahuan tentang materi ajar.

Kriteria pemilihan isi kurikulum. Terdapat enam kriteria pemilihan isi kurikulum, yaitu; a) signifikan; dengan pengetahuan dan disiplin ilmu, keseimbangan antara konsep, ide dan fakta.; b) validitas; konten harus otentik, benar dan akurat.; c) relevansi sosial; berhubungan dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, isu-isu kontroversi; d) utility (berguna); menyiapkan siswa agar hidup lebih "dewasa". e) learnability (dapat dipelajari); dapat digunakan siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda; f) interest; didasarkan pada minat (interest) anak didik.

Sementara ruang lingkup isi kurikulum mengacu pada keluasan dan kedalaman kurikulum pada satu kurun waktu. Dalam menentukan ruang lingkup isi kurikulum, murry print menyarankan beberapa konsep yaitu; a) *time constraint* (hambatan waktu); b) a *common core* (konsep inti); c) *pecial needs of content* (kebutuhan khusus dari Isi); d) *integration of content* (keterpaduan isi) dan; d) a *total amount of content required* (jumlah isi yang dibutuhkan)

Penyusunan materi juga harus mempertimbangkan keruntutan (*sequence*). Keruntutan adalah susunan dari isi kurikulum yang disampaikan pada peserta didik. Ada enam kriteria untuk mengurutkan isi kurikulum sebagaimana yang disarankan oleh Robert Zais, yaitu: a) dari yang sederhana menuju yang ruwet/sulit (*simple to complex*); b) pelajaran bersyarat (*prerequisite learnings*); c) kronologis (*chronology*);,; d) dari keseluruhan ke bagian-bagian (*whole-to-part learning*); e) dari konkrit ke yang abstrak (*increasing abstraction*) dan f) pengurutan secara spiral (*spiral sequencing*)<sup>25</sup>

## 6. Pengembangan Strategi Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum

Pemilihan metode mungkin membutuhkan perlakuan yang lebih

---

<sup>25</sup> Robert Zais, *Curriculum Principles and Foundation*. (New York : Harper and Row Publisher., 1876). h. 32.

dibandingkan dengan komponen kurikulum lainnya. Dampak dari metode sangatlah penting, dan pada bagian ini akan dipaparkan pentingnya pemilihan metode sebagai bagian utama dari komponen kurikulum. Metode adalah bagaimana seorang guru di dalam mengaktifkan isi dari kurikulum, karena isi kurikulum akan berarti bagi siswa apabila guru dapat mentransmisikannya dengan berbagai cara. Tidak ada satupun suatu metode yang paling baik, sama halnya bahwa semua komponen kurikulum pada dasarnya adalah sama pentingnya.

Untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, maka guru harus dapat memilih metode yang paling pas dari sekian metode yang ada. Beberapa kriteria di dalam memilih metode dan terlepas dari rumusan objectives adalah: a) prinsip-prinsip belajar.; b) identifikasi kegiatan belajar yang dilakukan. Selain kedua kriteria tersebut di atas, masih terdapat kriteria lainnya, yaitu: a) *variety*: metode harus bervariasi untuk mencapai tujuan dan dapat mengakomodasikan perbedaan tingkat dan gaya belajar siswa; b) *scope* yaitu metode harus cukup bervariasi di dalam mencapai seluruh tujuan yang sudah dirumuskan.; c) *validity* yaitu metode khusus harus berhubungan dengan bagian-bagian rumusan tujuan; d) *appropriateness* yaitu metode harus berhubungan dengan minat, kemampuan dan keterbacaan siswa; e) *relevance* yaitu metode yang digunakan harus berhubungan dengan apa yang dibutuhkan setelah siswa tamat belajar.

Penelitian berkaitan dengan metode menunjukkan dan memberikan saran bahwa sebaiknya keterlibatan siswa di dalam perencanaan kurikulum harus semakin ditingkatkan, oleh sebabnya pertimbangan keterlibatan siswa di dalam pemilihan metode kedepan harus semakin dipertimbangkan di dalam upaya pemilihan isi kurikulum dan pencapaian tujuan.

Terminologi metode pada prinsipnya juga mencakup hal-hal berikut; a) *integration*: paduan mata pelajaran ke dalam wilayah yang lebih besar sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar setiap mata pelajaran; b) *sequence* yaitu urutan mata pelajaran dan pengalaman belajar ke dalam tahapan belajar yang dapat

dikelola untuk pengembangan konsep;; c) *arrangement* yaitu organisasi mata pelajaran yang membuat logis dan semakin mudah dipelajari.<sup>26</sup>

Pada dasarnya tidak ada suatu metode tunggal yang lebih baik atau lebih buruk jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Setiap metode memiliki kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan tersendiri. Seleksi metode penting untuk meningkatkan efisiensi belajar siswa, kriteria penyeleksiannya antara lain dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan identifikasi kegiatan belajar yang lebih, prinsip variasi, ruang lingkup, validitas, relevansi, dan kesesuaian metode.

Dalam proses pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna, sehingga seringkali orang merasa bingung untuk membedakannya. Istilah-istilah tersebut adalah: pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran; dan model pembelajaran. Berikut ini akan dipaparkan istilah-istilah tersebut, dengan harapan dapat memberikan kejelasan tentang penggunaan istilah tersebut.

Pendekatan pembelajaran<sup>27</sup> dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginsiprasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran.

Sementara itu, Kemp dalam Wina Senjaya, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J. R David, Wina Senjaya menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya, bahwa strategi pada

---

<sup>26</sup> Laurie Brady, *Curriculum Development* (Third Edition), Victoria, (Australia: Prentice Hall, 1947) h. 111-126.

<sup>27</sup> Arends Arends, Richard II. *Learning to Teach*. (New York: Mc Graw Hill, 2004). h. 77

dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dilihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian pula, yaitu: a) *exposition-discovery learning* dan b) *group-individual learning*. Ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif.<sup>28</sup>

Strategi pembelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikannya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu. Dengan kata lain, strategi merupakan “*a plan of operation achieving something*” sedangkan metode adalah “*a way in achieving something*”. Jadi, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran, di antaranya: ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, *brainstorming*, debat, simposium, dan sebagainya.

Selanjutnya metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula, dengan penggunaan metode diskusi, perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama.

Sementara taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam

---

<sup>28</sup> Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Bandung : Alfabeta., 2008), h. 54.

melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselengi dengan humor karena memang dia memiliki *sense of humor* yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki *sense of humor*, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni (kiat).

Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran.

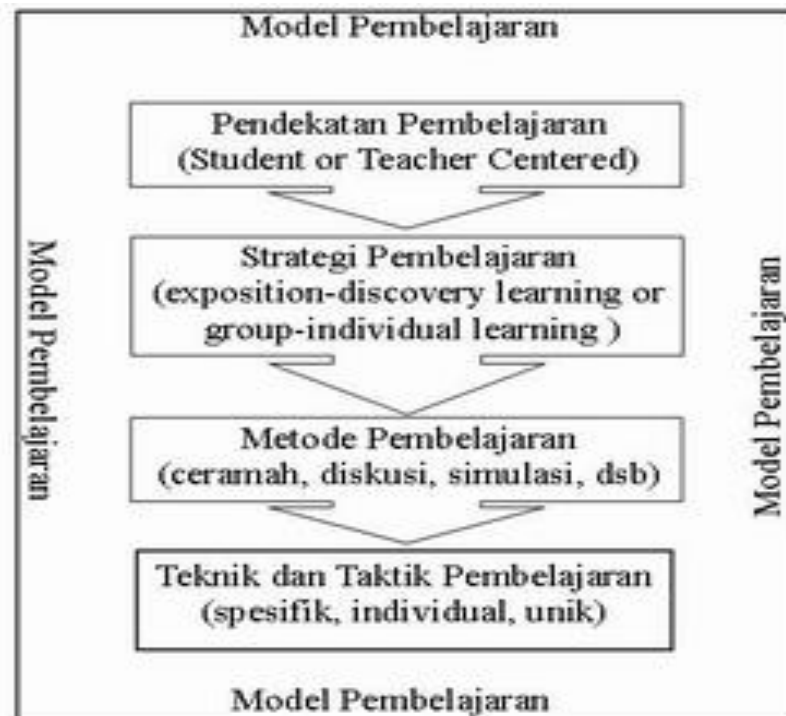
Berkenaan dengan model pembelajaran, Bruce Joyce dan Marsha Weil (Dedi Supriawan dan A. Benyamin Surasega, 1990) mengetengahkan empat kelompok model pembelajaran, yaitu: a) model interaksi sosial; b) model pengolahan informasi; c) model personal-humanistik; dan d) model modifikasi tingkah laku. Kendati demikian, seringkali penggunaan istilah model pembelajaran tersebut diidentikkan dengan strategi pembelajaran.<sup>29</sup> Gambar di bawah menjelaskan hubungan anatara Model, pendekatan, strategi, metode, taktik dan teknik pembelajaran

---

<sup>29</sup> Joyce, Bruce, Marsha Weil, and Beverly Showers . *Models of teaching*. (Boston: Allyn and Bacon, 1992). H. 20-112.



Gambar 2  
Hubungan Beberapa Istilah dalam Pembelajaran



## 7. Pengembangan Penilaian dalam Pengembangan Kurikulum

Meskipun evaluasi kurikulum adalah bagian dari totalitas sistem penilaian sekolah, pelaksanaan evaluasi kurikulum secara fungsional semestinya bagian dari sistem kurikulum dan subjek untuk rekayasa kurikulum. Ada empat dimensi dari evaluasi kurikulum yaitu;

- a) Evaluasi guru dalam menggunakan kurikulum. Evaluasi guru dalam penggunaan kurikulum secara logis adalah hal pertama untuk dilakukan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengamatan data-data penggunaan guru terhadap kurikulum. Ketika guru tidak menggunakan kurikulum dalam pengembangan strategi pembelajarannya, maka evaluasi pun dihentikan.

- b) Evaluasi desain kurikulum. Evaluasi desain adalah evaluasi yang paling sulit dilakukan karena ketiadaan kriteria dalam pelaksanaannya. Desain yang berbeda tentu tidak dapat dibandingkan dan disesuaikan dengan kriteria yang umum. Untuk memastikan kesuksesan seorang guru dalam menggunakan kurikulum, maka kecukupan desain perlu diperhatikan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat aspek aspek umum dari sebuah Desain. Akan tetapi hal inipun belum terformulasi. Meskipun kita tidak belajar banyak tentang bagaimana membandingkan desain kurikulum A dengan desain kurikulum B dengan sebuah pengawasan yang cukup, akan tetapi kita dapat mengevaluasi individual yang merupakan bagian dari desain kurikulum. Salah satu contoh misalnya ” *goal* dan *objectives*. Ketika sejumlah tujuan umum dan khusus dinyatakan dalam sebuah kurikulum, tujuan-tujuan yang prioritas kiranya lebih dahulu dievaluasi. Teknik Delphi atau beberapa teknik lainnya dapat membantu tugas ini. Jika sebuah kurikulum mencakup sebuah tujuan tingkah laku yang khusus, maka kejelasannya merupakan hal penting untuk dievaluasi.
- c) Evaluasi Lulusan. Evaluasi berikutnya adalah penilaian kurikulum sebagai instrument untuk memprediksi lulusan. Hal ini juga sangat sulit untuk dilakukan. Alasannya karena beberapa variabel sistem pembelajaran awal sekolah telah terjadi percampuran antara waktu perencanaan kurikulum dengan ketaatan pembelajaran siswa. Pada tingkat penilaian pembelajaran siswa, kita dapat membedakan antara pembelajaran yang diinginkan dengan pembelajaran yang diperoleh di luar bidang kurikulum dan pembelajaran. Jika kurikulum adalah rencana dasar dengan tujuan yang diinginkan dan isi budaya yang diseleksi yang diharapkan untuk menghasilkan tujuan itu dan jika perencanaan pembelajaran telah diperluas ke dalam tujuan yang lebih khusus, maka tujuan itu yang menjadi dasar penilain usaha sengaja dari sekolah.
- d) Evaluasi system kurikulum. Setiap aspek kurikulum harus di bawah pengawasan

evaluasi. Buruknya sebuah sistem karena kurang vital. Umpan balik dari sistem evaluasi itu seharusnya tersedia untuk memudahkan perbaikan sistem. Pemilihan arena, pemilihan orang yang terlibat, pengorganisasian orang-orang untuk bekerja, prosedur kerja, tugas-tugas yang diperankan oleh kepemimpinan personal adalah keseluruhan subjek yang harus dievaluasi baik kelebihan maupun kekurangannya. Hal inilah yang membuat sistem kurikulum bekerja. Umpan balik dari evaluasi itu dapat membantu untuk memperbaiki sistem dan menyediakan keberlanjutan dan perkembangan sistem kurikulum dari tahun ke tahun.<sup>30</sup>

Adapun kriteria pelaksanaan evaluasi kurikulum yang baik adalah sebagai berikut: a) *continuity* yaitu evaluasi harus dilakukan berkesinambungan dan merupakan bagian terpadu di setiap bagian pembelajaran dan pengajaran.; b) *scope*: prosedur evaluasi harus bervariasi sebagai cakupan dari tujuan; c) *compatibility*: evaluasi harus kompatibel dengan rumusan tujuan; d) *validity*: prosedur evaluasi harus mengukur apa yang seharusnya diukur. Test juga harus reliabel, misalnya konsisten di dalam pengukurannya.; e) *objectivity*: evaluasi harus didasarkan pada objektivitas, dan hindari yang mengarah pada subjektivitas dan f) *diagnostic value*: evaluasi harus mengenal tingkatan performa siswa dan proses yang diperlukan untuk mencapai performa tersebut; g) *participation* yaitu prosedur evaluasi dimungkinkan untuk ditingkatkan oleh para siswa itu sendiri.<sup>31</sup> Sementara model evaluasi yang digunakan, para pengembang kurikulum dapat memilih berbagai model evaluasi yang ditawarkan secara konsep oleh para ahli evaluasi kurikulum.

---

<sup>30</sup> Beauchamb, *Curriculum Theory...*h. 169-172.

<sup>31</sup> Laurie Brady, *Curriculum Development...* h. 32-136.

## 8. Implementasi Kurikulum

Tugas pertama dari implementasi kurikulum adalah mengatur lingkungan sekolah sehingga sebuah kurikulum dapat digunakan oleh guru sebagai bagian penting dari pengajarannya. Implementasi berada pada wilayah gabungan sistem kurikulum dengan sistem pembelajaran. Dalam hal ini, kurikulum menjadi alat kerja bagi guru. Pesan perencana kurikulum itu dikomunikasikan dan ditafsirkan oleh guru untuk sekelompok siswa. Syarat utama dalam implementasi kurikulum adalah komitmen para guru untuk menggunakan kurikulum sebagai bagian dari pengembangan strategi pembelajaran. Untuk meningkatkan komitmen guru tersebut maka perlu adanya panduan dan melibatkan mereka dalam perencanaan serta administrasi kepemimpinan.

Pada tingkatan sekolah, terdapat dua tingkatan pelaksanaan kurikulum yaitu pelaksanaan kurikulum tingkat Madrasah dan pelaksanaan tingkat kelas. Pada tingkat sekolah kepala Madrasah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di madrasah yang dipimpinnya. Secara umum, kepala Madrasah bertugas sebagai pemimpin perencanaan dan pengembangan kurikulum, koordinator, pengawas dan pembina dalam pelaksanaan kurikulum, pelopor dalam perbaikan dan inovasi kurikulum dan lain-lain. Sementara di kelas, guru sebagai implementator, peneliti, penilai dan pengembang kurikulum.<sup>32</sup>

Ada tiga pendekatan dalam implementasi kurikulum. Ketiga pendekatan yang dimaksud adalah: a) pendekatan fidelity yaitu implementasi kurikulum sesuai dengan desain yang telah standar; b) pendekatan mutual adaptive yaitu pelaksana kurikulum mengadakan penyesuaian berdasarkan kondisi, kebutuhan dan tuntutan setempat; c) pendekatan enactment yaitu pelaksana kurikulum melakukan berbagai upaya mengoptimalkan pelaksana kurikulum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Oemar Hamalik. *Managemen ....* h. 175 - 180.

<sup>33</sup> Syaodih, Nana. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 87.

## 9. Dinamikan dan Perubahan Kurikulum

Perubahan kurikulum tetap mencerminkan perubahan di dalam masyarakat dan pendidikan secara umum. Karenanya kebanyakan yang berhubungan dengan perubahan kurikulum di dalam sekolah tersebut menunjuk pada cara menerapkan perubahan terefektif. Suatu inovasi kurikulum akan mengubah masyarakat ke arah tertentu, tetapi pada dasarnya perubahan kurikulum mencerminkan perubahan masyarakat. Inovasi adalah merupakan satu obyek, gagasan atau praktek yang bersifat baru dari peserta-peserta di dalam proses perubahan. Dengan demikian ciri-ciri penting dari suatu inovasi yaitu: sifat multidimensional dari obyek, gagasan atau praktek, inovasi merupakan hal baru bagi adopter, inovasi berorientasi proses dan inovasi bertujuan untuk perbaikan.

Dalam hal ini tahapan/proses terjadinya suatu Inovasi dapat digambarkan pada diagram dibawah ini:



Dalam perubahan kurikulum adalah beberapa konsep antara lain: a) *inovasi* merupakan suatu obyek, gagasan atau praktek yang bersifat baru dan dengan proses yang baru. Dimana gagasan atau praktek dapat diadopsi; b) *difusi* adalah suatu proses yang terkait dengan penyebaran suatu gagasan yang baru dari orang yang mengadopsinya; c) *dissemination* yaitu suatu proses yang sengaja untuk menyebar suatu idea yang baru yang berasal dari orang yang mengadopsi; d) *change agents* yaitu individu dan kelompok yang terlibat dalam proses perubahan melalui jalur komunikasi antara innovator dan lien; e) *adoption* mengacu pada penerimaan awal dari suatu inovasi dan tingkat penerimaannya dalam suatu system.

<sup>34</sup> Murry Print, *Curriculum Development*. ... h 175.

## 10. Prinsip-Prinsip Perubahan Kurikulum

Terdapat empat prinsip pokok dalam perubahan kurikulum, sebagai berikut:

a) kurikulum berubah di sekolah-sekolah mencerminkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat; b) bahwa kurikulum sekolah tersebut bereaksi terhadap perubahan di dalam masyarakat secara cepat dan sengaja; c) perubahan-perubahan terjadi dikarenakan adanya benturan secara implisit yang ada didalam praktek dengan kebijakan kurikulum; d) bahwa perubahan-perubahan mungkin dibuat atau dicari di dalam kebijakan kurikulum dan praktek untuk mempromosikan tujuan tertentu atau mencapai sasaran tertentu di dalam sistem.

Proses perubahan kurikulum sekolah pada umumnya dengan beberapa pertimbangan, antara lain: a) bahwa suatu negara harus mempunyai “*kurikulum nasional*” yang dirancang untuk memberikan arah kurikulum untuk seluruh wilayah Negara; b) dengan peningkatan yang signifikan dari perubahan kurikulum maka setiap Negara harus mempunyai suatu tim pengembangan kurikulum dan penilai yang bertanggung jawab atas sistem kurikulum; c) adanya perubahan kurikulum akibat dari inisiatif sekolah karena kebutuhan dari para siswa yang berbeda. erdasarkan riset para ahli kurikulum bahwa terdapat empat tahap-tahap dasar proses perubahan kurikulum yaitu:

*Pertama*, kebutuhan (*needs*). Diawal proses perubahan kurikulum dikarenakan adanya perhatian, ketidakpuasan atau kebutuhan dengan kurikulum yang dapat. Kebutuhan dapat bersumber dari para guru, para siswa, orang tua, pengurus-pengurus, sistem bidang pendidikan atau didasarkan pada gabungan beberapa sumber pertimbangan di atas.

*Kedua*, adopsi. Adopsi berarti penerimaan yang sengaja terhadap suatu inovasi, sebagai bentuk pernyataan dalam memutuskan akan satu kebutuhan. Faktor-faktor penting di dalam keberhasilan suatu adopsi antara lain: bahwa adanya akses dengan pengambil kebijakan atau keputusan; adanya beberapa bentuk alternatif dari inovasi;

adanya dukungan administratif dari pusat untuk inovasi; inovasi tersebut merupakan kebutuhan bersama; inovasi tersebut memiliki kualitas yang baik; ketersediaan pembiayaan dalam mendukung implementasi; peran dan efektivitas penuh dari agen-agen perubahan.masyarakat yang stabil.

*Ketiga, implementasi* . Implementasi merupakan suatu rangkaian dari adopsi terhadap suatu inovasi sampai kepada proses penerimaan atau pelebagaan yang lengkap.

*Keempat, pelebagaan/berkesinambungan*. Bahwa suatu inovasi harus dilaksanakan secara terus menerus/kontinyu dari waktu ke waktu dalam proses berintegrasi dalam satu struktur organisasi. Disadari pada tahap ini memerlukan banyak waktu dan perubahan tidak dapat diberikan suatu jaminan bahwa inovasi sukses sampai pada pelebagaan. <sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Murry Print, *curriculum development...*h. 65

## B. MODEL MODEL KONSEP KURIKULUM

### 1. Kurikulum Subjek Akademik.

Orientasi kurikulum ini mengikuti orientasi transmisi yang menganggap fungsi pendidikan adalah untuk mentransmisi fakta, keterampilan dan nilai kepada siswa agar siswa menguasai materi melalui teksbook, menguasai keterampilan dasar (bicultural) dan menguasai nilai kebudayaan tertentu yang dibutuhkan dalam masyarakat serta mengaplikasikan pandangan-pandangan.<sup>36</sup> Oleh karena itu, kurikulum ini menekankan pada masa lalu, memelihara dan mewariskan ilmu dan teknologi, nilai dan budaya pada generasi berikutnya, isi pendidikan lebih menekankan pada segi intelektual dan fungsi guru adalah ekspert dan model.

Sementara menurut Nana Syaodih bahwa ciri kurikulum subjek akademik yang berkaitan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi adalah : **1)** tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses “penelitian”. **2)** Metode yang paling cocok digunakan dalam kurikulum ini adalah ekspositori dan inquiry. Ide-ide diberikan oleh guru kemudian dilaksanakan siswa sampai mereka menguasainya. Konsep utama disusun secara sistematis dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting kemudian dirumuskan cara pemecahannya. **3)** Pola organisasi isi (materi pelajaran) dari kurikulum subjek akademis ini di antaranya adalah; *correlated curriculum*, *unified or concentrated curriculum*, *integrated curriculum and problem solving curriculum*. *Correlated curriculum* adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. *Unified or concentrated curriculum* adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dan berbagai disiplin ilmu. Sementara *Integrated curriculum* adalah warna tiap-tiap disiplin ilmu sudah tidak terlihat lagi. Dalam hal ini bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan atau segi

---

<sup>36</sup> Sellar Meller (1985 : 5-6)



kehidupan tertentu. Dan *problem solving curriculum* adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. 4) *Evaluasi kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran.* Dalam bidang studi humaniora misalnya, lebih banyak digunakan bentuk uraian (*essay test*) dari pada tes objektif. Bidang studi ini membutuhkan jawaban yang merefeksikan logika dan menyeluruh.<sup>37</sup>

Berangkat dari kriteria di atas, maka diketahui bahwa model konsep kurikulum ini dilandasi oleh dua aliran filsafat pendidikan yaitu aliran filsafat Perennialisme dan aliran filsafat Essensialisme yang lebih menekankan pada intelektual dan proses. Menurut aliran ini bahwa kurikulum sekolah harus berpusat pada mata pelajaran (*Subject Matter Centered*). Di Sekolah Dasar misalnya, Ia menekankan pada kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung. Sementara di Sekolah Menengah, mata pelajaran diperluas dengan menambahkan matematika, sains, humaniora, bahasa dan sastra. Penguasaan terhadap materi pelajaran tertentu seperti seni dan ilmu sastra tidak penting karena pelajaran tersebut hanyalah pelengkap, walaupun tetap perlu dipelajari. Sementara mata pelajaran yang paling esensi adalah filsafat, matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Sejarah, bahasa, seni dan sastra. Mata pelajaran inilah yang dianggap perlu untuk menjalani kehidupan. Apabila mata-mata pelajaran tersebut dipelajari dengan tepat oleh siswa, maka mereka akan mampu mengembangkan potensi nalar sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik di sekitarnya.<sup>38</sup>

## **2. Kurikulum Humanistik.**

Kurikulum ini berorientasi pada masa kini, siswa berpotensi karena memiliki intelektual, sosial, afektif, fisik, motorik dan berkembang sendiri,

---

<sup>37</sup> Nana Syaodijh

<sup>38</sup> Sadulloh. (2007 : 162)

menekankan pada kebutuhan perkembangan pribadi anak dan tugas pendidikan adalah menyediakan fasilitas dan menumbuhkan potensi serta menghindari gangguan. Beberapa ciri dari kurikulum ini adalah menekankan pada kurikulum yang berpusat pada siswa, isi atau bahan ajar sesuai kebutuhan, bakat dan minat siswa. Siswa dalam hal ini turut serta dalam "menyusun" kurikulum. Tidak ada standar, yang ada adalah standar minimal.

Dalam buku Murry Print disebutkan bahwa *Humanistic* atau konsep relevansi personal mendukung pandangan yang beranggapan bahwa kurikulum sekolah mempersiapkan berbagai pengalaman yang berharga untuk meningkatkan pengembangan personal siswa. Dalam menentukan **isi** konsep kurikulum ini, kiranya menyeleksi materi yang memungkinkan peserta didik melahirkan kesatuan rasa. **Pendekatan** yang digunakan adalah pendekatan *holistic* yang mengintegrasikan domain kognitif, affektif dan psikomotoric. Oleh karena itu, tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan apa yang menjadi esensi dari belajar sendiri. Evaluasi yang digunakan bersifat *qualitative* yaitu ukuran kualitatif dengan cara observasi, wawancara, catatan pribadi, partisipasi, refleksi dan lain-lain.

Sementara landasan filsafat yang di anut adalah aliran filsafat progresivisme atau *Prograsive Educatif* dengan tokohnya Jhon Dewey dan filsafat romantisme atau *Romantic Educatif* oleh J Rousseau.

### 3. Kurikulum Teknologis.

Kurikulum ini berorientasi pada masa sekarang dan yang akan datang, pendidikan adalah ilmu bukan seni atau bersifat ilmiah, manusia tidak berbeda secara hakiki dengan binatang hanya lebih kompleks dan berkemampuan tinggi, pendidikan adalah transmisi iptek dan peranan guru tidak dominan tetapi dibantu oleh teknologi.

Kompetensi Menurut John Mcneil bahwa teknologi dapat diterapkan dalam kurikulum dengan dua **tujuan** yaitu Pertama, digunakan sebagai sebuah

perencanaan yang sistematis dengan menggunakan alat dan media yang bervariasi dan penyusunan secara sistematis sebuah pembelajaran yang berbasis prinsip ilmu pengetahuan behavioris. Kedua yaitu Teknologi dianggap sebagai sebuah model dan prosedur untuk mengkonstruksi atau mengembangkan dan mengevaluasi materi kurikulum dan system pembelajaran. Adapun **materi** yang ditetapkan adalah disiplin ilmu yang memungkinkan peserta didik untuk mengetahui dan menerapkan teknologi secara mandiri. Sementara **pendekatannya** adalah pendekatan behavioristik. Pembelajaran dianggap sebagai sebuah proses penciptaan stimulus-stimulus. Diantara pendekatan yang dimaksud adalah *Computer Assisted Learning (CAL)*, *Individually Directed instruction (IDI)* dan lain-lain. Evaluasi yang digunakan adalah *Tradsional Testing*.<sup>39</sup> Nana Syaodih menyebutkan beberapa karakter kurikulum teknologis ini adalah menekankan pada isi kompetensi, kecakapan dan keterampilan. Keterampilan dirinci menjadi performance yang dapat diukur dan diamati, desain kurikulum disusun secara sistematis. Oleh karena itu, kurikulum ini menekankan pada Kompetensi, Kecakapan, keterampilan kerja, tujuannya untuk kerja, keterampilan apa yang harus dibekali, tidak semua orang pintar bisa kerja tetapi harus dibekali keterampilan, kecakapan kerja, bentuknya tidak berbentuk susunan ilmu pengetahuan tetapi berbentuk pekerjaan.<sup>40</sup>

Adapun aliran filsafat yang melandasi model konsep kurikulum teknologis ini adalah **filsafat realisme** yang beranggapan bahwa “Semua yang ada ini pada dasarnya telah berada dalam keteraturan (in order). Oleh karena itu, jika ada di antara manusia yang sakit, maka itu berarti hal tersebut berada dalam ketidakteraturan (in order). Secara metafisika aliran ini menganggap bahwa manusia terbatas hanya karena kekurangan. Kemajuan adalah menemukan hukum universal (hukum alam) yang in order (keteraturan tadi) . Secara epistemologi, aliran

---

<sup>39</sup> Murry Print. (1993 : 55-56)

<sup>40</sup> Nana Syaodih. (2007 : 97-98)

ini menyebutkan bahwa pengetahuan didasarkan atas data, nyata, ilmiah. Sementara referensi adalah fakta yang telah dibuktikan dan hukum-hukum alam. Pandangan aksiologinya adalah bahwa standard dan prinsip telah didefinisikan dengan tepat tetapi bervariasi sesuai dengan kemajuan IPTEK

#### **4. Kurikulum Rekonstruksi sosial.**

Kurikulum berorientasi pada masa lalu dan akan datang, manusia sebagai makhluk sosial, hidup bersama dan bekerja sama, pendidikan berperan untuk memperbaiki kehidupan ke arah yang lebih baik, sekolah adalah pintu atau agen perubahan masyarakat dan tugas pendidikan adalah melakukan kerjasama untuk menyiapkan siswa sebagai warga masyarakat yang aktif. Sementara Nana Syaodih menyebutkan ciri-ciri kurikulum rekonstruksi social adalah menekankan pada pemecahan masalah social yang dihadapi saat ini, pembelajaran berbasis kooperatif dan berfokus pada isi dan proses yang disusun dengan melibatkan siswa, isi kurikulum adalah masalah yang penting di masa yang akan datang, proses pembelajaran menggunakan kooperatif dan kerja kelompok dan siswa dan guru belajar bersama menggunakan banyak sumber serta penilaian menggunakan proses dan hasil.

Penganut rekonstruksi social menentang dengan tegas konsep-konsep kurikulum sebelumnya dengan menganggapnya sebagai pendukung status quo. Penganut ini beranggapan bahwa kurikulum sekolah harus memberi pengaruh terhadap reformasi masyarakat dan membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ada tiga standar rekonstruksi social yang dikemukakan berdasarkan literature. Ketiga standar ini memiliki tujuan yang berbeda yaitu : pertama, Adaptasi social beranggapan bahwa kurikulum sekolah itu seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, Kedua, rekonstruksi social berarti adanya tuntutan untuk dilakukan perubahan kurikulum dengan melihat kepentingan masyarakat dan dilakukan sesegera mungkin dan ketiga, perspektif masa depan yaitu pandangan

yang speculative yang menganggap sekolah itu seperti bengkel untuk menemukan kebutuhan masyarakat. Intinya adalah kurikulum sekolah dianggap sebagai wahana untuk perencanaan masa depan. Pendukung konsep ini menganggap bahwa isi atau materi kurikulum adalah hasil seleksi kebutuhan masyarakat, isu-isu social, ide-ide mutakhir dan aspirasi masa depan, isu-isu lingkungan, isu lingkungan, perdamaian dunia dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan adalah belajar kelompok, diskusi kelompok, pengalaman kelompok untuk mencapai kesepakatan social, keterlibatan siswa dalam aktifitas masyarakat, investigasi kelompok terhadap masalah social dan lain-lain. Sementara evaluasi yang digunakan adalah teknik penilaian tradisional sebagai ujian dan tes.

Sementara aliran filsafat yang melandasi model kurikulum ini adalah aliran filsafat rekonstruksionisme yang beranggapan bahwa sekolah adalah agen atau pintu masuk masyarakat untuk memperbaiki keadaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Secara ringkas gambaran empat model konsep kurikulum beserta aliran filsafat yang melandasinya dapat digambarkan secara sederhana pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Landasan Filsfat Model Konsep Kurikulum**

<b>Empat Model Konsep Kurikulum</b>	<b>Dasar Filsafat</b>	<b>Orientasi Kurikulum</b>	<b>Desain Kurikulum</b>
Kurikulum Subjek Akademik	Perennialisme Essensialisme	Transmisi : Orientasi masa lalu Mewariskan nilai	Subject Centered Curriculum
Kurikulum Humanistik	Konstruktivisme Romantisme	Transformasi : Orientasi masa kini Siswa berpotensi Pengembangan Pribadi n social	Students Centered Curriculum
Kurikulum Teknologis	Realisme	Transmisi Iptek Masa Sekarang dan akan datang	Sistem Intruksional

Kurikulum Rekonstruksi social	Kontruksivis me Pragmatisme	Transaksi : ada proses dialog antara guru dan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan	Problem Centered Curriculum
----------------------------------	-----------------------------------	--	-----------------------------------

## C. KONSEP MADRASAH DI INDONESIA

### 1. Instansi Pendidikan Pra Madrasah

Pengungkapan institusi pendidikan Islam pra-madrasah menjadi penting untuk menciptakan pemahaman tentang madrasah secara holistik. Bagaimanapun, sejarah berdiri madrasah merupakan transformasi dari institusi sebelumnya. Berdirinya institusi pendidikan Islam, termasuk madrasah merupakan alat dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa madrasah muncul sejalan dengan perjalanan perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga saat ini.

Institusi pertama yang digunakan sebagai tempat kegiatan belajar membaca, menulis, dan menghafal Alquran sebelum berdirinya madrasah adalah *dar al-arqan*. (rumah sahabat Nabi yang letaknya di luar Mekkah). Setelah Hijrah ke Madinah, kegiatan pendidikan dipusatkan di masjid Nabawi. Menurut Syalabi (1973) dan Mehdi (2003) Selain Masjid, beberapa istilah yang digunakan dalam sistem pendidikan pada periode pertama dan kedua adalah *maktab*, sekolah istana, sekolah kedai buku, *shuffah*, *halaqah*, *khan*, *ribath*, rumah sakit, toko buku, perpustakaan dan lain-lain. Suwito (2005 : 212-213).

Hasan Abd al-'Ali menyebutkan lima sistem pendidikan (*madaris al-tarbiyah*) dengan klasifikasi sebagai berikut: 1) sistem pendidikan mu'tazilah yang menggunakan *al-masajid*, *al-maktabat*, *hawanit*, *al-warraqin*, dan *al-muntadiyat* sebagai institusi pendidikannya. 2) Sistem pendidikan Ikhwan al-shafa yang menggunakan *dar al-hikmah*, *al-masajid* dan pertemuan rahasia sebagai institusi pendidikannya. 3) Sistem pendidikan bercorak fiqh yang menggunakan *al-katatib*. *Al-madaris* dan *al-masajid* sebagai institusi pendidikannya. 4) Sistem pendidikan bercorak filsafat yang menggunakan *dar al-hikmah*, *al-muntadiyat*, *hawani* dan *warraqin* sebagai institusinya. 5) Sistem pendidikan yang bercorak tasawuf yang menggunakan *al-Zawa*, *al-ribat*, *al-masaidan halaqat al-dzikir* sebagai institusi pendidikannya. Maksum (1999 : 51)

Dari berbagai institusi di atas, Ahmad Syalabi dalam bukunya yang berjudul *al-tarbiyah islamiyah, nazumaha, falsafatuha wa tarikhuha* membagi menjadi dua kelompok yaitu institusi sebelum madrasah dan institusi sesudah madrasah. Madrasah yang dimaksud di sini adalah madrasah yang didirikan oleh *Nizam al-Mulk* pada tahun 456 H. Suwito (2005 : 200-201).

## 2. Pengertian dan Sejarah Madrasah

Kata madrasah berasal dari “*darasa*” yang berarti belajar. Kata ini kemudian di-*tashrif* dalam bentuk *isim makan* (kata yang menunjuk pada tempat) menjadi *madrasah* yang berarti tempat belajar baik bagi murid yang level (TK, SD/MI, SMP/MTS/SMU/MA ) rendah maupun level tinggi (Perguruan Tinggi). Makna lain dari “*darasa*” adalah terhapus, hilang bekasnya, menjadikan usang, melatih dan mempelajari. Luis Ma’luf (1986 : 187). Berdasarkan arti madrasah tersebut, maka diketahui bahwa istilah madrasah merupakan tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, atau memberantas kebodohan mereka serta melatih keterampilan mereka sesuai bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah juga tidak hanya diartikan sebagai sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai dengan rumah, istana, *kuttab*, masjid, perpustakaan, surau dan tempat-tempat lainnya. Bahkan seorang ibu dapat dikategorikan sebagai *al-madrasah al’ula*.(madrasah pemula). Al-Hasyimi (1985 : 200)

Secara historis menurut Al-Maqrizi, madrasah tidak dikenal pada masa sahabat dan tabi’in. Ia diciptakan sesudah 400 tahun setelah Hijriyah. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah “madrasah” secara definitive baru muncul pada abad- 11 M. Penjelmaan istilah “madrasah” merupakan transformasi dari masjid ke madrasah. Ada beberapa teori yang berkembang seputar seputar transformasi ini, di antaranya ; pandangan Ahmad Syalabi (1954) menjelaskan bahwa madrasah merupakan transformasi institusi pendidikan Islam dari masjid ke madrasah terjadi secara langsung sebagai konsekwensi logis dari semakin ramainya kegiatan yang



dilaksanakan di masjid yang tidak hanya dalam kegiatan ibadah *mahdhah*, tetapi juga dalam bentuk ibadah *ijetima'iyah*. Sementara itu, meskipun ada yang beranggapan bahwa peralihan dari masjid ke madrasah itu terjadi secara tidak langsung. Ahmad Syalabi (1954 : 257-259)

Madrasah dikenal pertama kali didirikan pada Tahun 1005 oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Saat ini, madrasah telah memiliki perpustakaan, guru dengan materi ajar yang berbeda dan siswa dengan fasilitas belajar yang tersedia. Pandangan lain menyebutkan bahwa Dinasti Saljuk yang dikenal dengan *nidzumul mulk bin al-Thusi* telah mendirikan pertama kali organisasi madrasah pada tahun 1067 M dengan dua type yaitu 1) *Scholastic* yang dibentuk untuk melahirkan pemimpin spiritual dan 2) *Eartly Knowledge* yang dibentuk untuk menghasilkan pegawai pemerintahan. Lebih jauh, Nidzamal Mulk juga mendirikan madrasah di luar kerajaan untuk menghasilkan ahli dalam berbagai bidang seperti sains, filsafat, administrasi public dan pemerintahan. Dengan jasa ini, beliau dianggap sebagai “Bapak system pendidikan masyarakat Islam”. Uzma (2003 : 4-5 )

Terjadi perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam. Di antara pandangan tersebut adalah ; 1) madrasah sebagai lembaga pendidikan formal telah dikenal adanya “Madrasah Nidzamiyah” di Bagdad yang didirikan oleh **Nidzam al-Muluk** seorang wazir dari dinasti Saljuk pada awal abad ke-11 M. atau Tahun 457 H., 2) menurut al-Jumbulati (1994) bahwa sebelum abad ke-10, madrasah yang pertama berdiri adalah madrasah al-Baihaqiah di kota Nisabur yang didirikan oleh Abu Hasan al-Baihaqi (w. 414 H). 3) Menurut Richard Bulliet (1972) bahwa madrasah Miyah Dahiyah di Nisapur berdiri dua abad sebelum berdirinya madrasah Nizyamiyah di Bagdad yang mengajarkan fiqh malikiyah. Suwito (2004 : 214-215).

Terlepas dari perbedaan pendapat tentang madrasah yang pertama berdiri di dunia Islam, namun madrasah Nidzam al-Muluk adalah madrasah yang paling

populer di kalangan ahli sejarah dan masyarakat Islam. Menurut Mehdi, meskipun madrasah Nidzal al-Muluk bukan sebagai madrasah yang pertama didirikan, namun madrasah ini memiliki spirit ilmu pengetahuan yang tinggi, baik dari tujuan politik dan agama. Dan yang paling menarik adalah proses pendirian madrasah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, ulama-ulama, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah Nidzamiyah ini didirikan atas kemauan dan keinginan bersama bukan keinginan sepihak.

### **3. Kurikulum Madrasah di Indonesia**

Indonesia sebagai Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, memiliki beberapa institusi pendidikan Islam baik pada awal mula masuk dan berkembangnya agama Islam maupun pada masa modern. Pada awal mula masuk dan berkembangnya agama Islam, pendidikan Islam di Indonesia masih berlangsung secara informal dengan beberapa institusi pendidikan Islam seperti masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah dan surau. Sementara pada masa berikutnya, telah muncul institusi baru seperti madrasah, sekolah dinas dan Pendidikan Tinggi Islam

Institusi madrasah sendiri di Indonesia baru populer setelah awal abad keduapuluh. Kehadiran institusi ini (madrasah) sebagai lembaga pendidikan Islam dilatarbelakangi oleh munculnya semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi system pesantren dan sekolah. Madrasah di Indonesia memiliki jenjang yang sama dengan sekolah umum yaitu Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 6 tahun sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTS) sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan lama belajar tiga tahun dan Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tiga tahun lama belajar.

Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya madrasah di Indonesia setelah merdeka terbagi tiga fase yaitu :

1. Sekitar tahun 1945-1974, madrasah menekankan materi pendidikannya kepada

ilmu agama dan sedikit ilmu umum. Pada masa ini, madrasah hanya berada di lingkungan Departemen Agama Republik Indonesia.

2. Tahun 1975-1990 dengan pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang intinya untuk meningkatkan mutu madrasah. Di antara isi Surat Keputusan Bersama (SKB) ini adalah ijazah madrasah sama nilainya dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkannya pendidikannya ke sekolah umum setingkat lebih tinggi, dan siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat. Dengan dilaksanakannya SKB tiga menteri tersebut, maka eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan lebih kuat, pengetahuan umum pada madrasah lebih meningkat, fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan dan adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.
3. Pemberlakuan Undang-Undang NO 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Dengan demikian, kurikulumnya adalah kurikulum sekolah di tambah dengan kurikulum ilmu agama sebagai ciri khasnya.<sup>41</sup>
4. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
5. Kurikulum 2013

---

<sup>41</sup> Haidar (2009 : 21-22)

### **BAB III**

## **PONDOK PESANTREN DAN KARAKTERISTIKNYA**

#### **A. SEJARAH BERDIRI PESANTREN**

Kapan pasantren pertama didirikan, dimana dan oleh siapa, tidak dapat diperoleh keterangan yang pasti. Dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1984–1985 M. diperoleh keterangan bahwa pasantren tertua didirikan pada tahun 1062 M. atas nama Pasantren Jan Tampes II di Pamekasan Madura. Tetapi hal ini diragukan, karena tentunya ada Pasantren Jan Tanpes I yang lebih tua, dan dalam buku Departemen Agama tersebut banyak dicantumkan pasantren tanpa tahun pendirian. Jadi, mungkin mereka memiliki usia yang lebih tua.<sup>42</sup>

Walaupun demikian, menurut buku yang berjudul “Amanat Sejarah Umat Islam Indonesia” yang dikutip oleh Mastuhu dalam bukunya “Dinamika Sistem Pesantren Mastuhu, (suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pesantren) dipastikan bahwa pasantren didirikan setelah Islam masuk ke Indonesia. Diduga keras bahwa besar sekali kemungkinan Islam telah diperkenalkan di Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 M oleh para musafir dan pedagang muslim, melalui jalur perdagangan dari teluk Persia dan Tiongkok yang telah dimulai sejak abad ke-5 M. Kemudian, Sejak abad ke-11 M. dapat dipastikan Islam telah masuk ke Kepulauan Nusantara Melalui kota-kota pantai. (a) Batu nisan atas nama Fatimah Binti Maimun yang wafat pada tahun 474 H atau tahun 1082 M di Leran Gersik. (b) Makam wanita Islam yang bernama Tuhar Amisuri di Barus, Pantai Barat Sumatra Bertarikh 602 H.<sup>43</sup> Pendapat lain menduga kuat bahwa pesantren pertama kali didirikan di desa

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RO, *Nama dan Data Poetensi Pondok-pondok Pesantren Seluruh Indonesia*, 1984/1985 h. 668

<sup>43</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pesantren)*, (Jakarta : INIS, 1994 ) h. 20

Gapura Gresik Jawa Timur dan dihubungkan dengan usaha Maulana Malik Ibrahim (sunan Ampel).<sup>44</sup>

Selanjutnya, bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa penyebaran dan pendalaman Islam secara intensif terjadi pada masa abad ke-13 M. sampai akhir abad ke-17 M. Pada masa itu berdiri pusat-pusat kekuasaan dan studi Islam, seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate, Tidore, dan Gowa Tallo di Makassar. Dari pusat-pusat inilah Islam tersebar keseluruh pelosok Nusantara, melalui para pedagang, wali, para ulama, muballig dan sebagainya dengan mendirikan pasantren dan surau. Sejak abad ke 15, Islam praktis menggantikan ajaran dominasi Hindu, dan sejak abad ke-16 melalui kerajaan Islam pertama, yaitu Demak seluruh wilayah Jawa dapat di Islamkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasantren mulai dikenal di bumi Nusantara ini dalam periode awal abad ke-13 s/d 17 M. Dan di Jawa terjadi dalam abad ke 15 s/d 16 M. Melalui data sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang sifatnya global atau makro itu sangat sulit dengan tepat tahun berapa dan dimana pasantren peertama didirikan. Namun dapat dihitung bahwa sedikitnya pasantren telah ada sejak 300-400 tahun lampau. Dengan usia yang panjang ini kiranya sudah cukup alasan untuk bahwa ia sudah menjadi milik budaya bangsa dalam bidang pendidikan dan telah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan karenanya cukup pula alasan untuk belajar daripadanya.<sup>45</sup>

Dalam masa sekitar abad kedelapan belasan, nama pasantren sebagai nama pendidikan rakyat terasa sangat berbobot, terutama dalam bidang penyiaran agama Islam. Kelahiran pasantren baru selalu disertai dengan cerita perang nilai antara pasantren yang akan didirikan dengan masyarakat sekitar yang diakhiri dengan kemenangan pihak pasantren, sehingga pasantren dapat diterima untuk hidup di masyarakat dan kemudian menjadi panutan masyarakat sekitarnya dalam bidang

---

<sup>44</sup> Depag RI, Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pembelajaran Di Pesantren*, Cet. I Tahun 2003

<sup>45</sup> *Ibid*

kehidupan moral. Bahkan dengan kehadiran pasantren dengan jumlah santri yang banyak dan datang dari masyarakat lain yang jauh, maka terjadi kontak budaya antara berbagai suku dan masyarakat sekitarnya.

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai lembaga penyiar agama, dan sosial keagamaan. Pasantren berhasil menjadikan dirinya sebagai pusat gerakan perkembangan Islam seperti diakui oleh Dr. Soebardi dan Prof Jhons, yang dikutip oleh Zamachsyari Dhopier dalam bukunya *Tradisi Pasantren* (1982) tersebut

“Lembaga-lembaga pesantren itulah yang paling menentukan watak ke-Islaman dari kerajaan-kerajaan Islam, dan yang memegang peranan paling penting bagi Islam sampai ke pelosok-pelosok. Dari lembaga pasantren itulah asal-usul sejumlah manuskrip tentang pengajaran Islam di Asia Tenggara yang tersedia secara terbatas, yang dikumpulkan oleh pengembara-pengembara pertama dari perusahaan-perusahaan dagang Belanda dan Inggris sejak akhir abad ke 16. Untuk dapat memahami sejarah Islamisasi di wilayah ini, kita harus mempelajari lembaga-lembaga pasantren tersebut karena lembaga-lembaga inilah yang menjadi anak panah penyebaran Islam di wilayah ini.”<sup>46</sup>

Selama masa kolonial, pasantren merupakan lembaga pendidikan yang paling banyak berhubungan dengan rakyat, dan tidak berlebihan kiranya untuk menyatakan pasantren sebagai lembaga pendidikan *Grass root people* yang sangat menyatu dengan kehidupan mereka

Selam zaman kolonial, pasantren lepas dari perencanaan pendidikan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda bahwa menilai sistem sangat jelek baik ditinjau dari tujuan maupun metode dan bahasa (bahasa Arab) yang dipergunakan untuk mengajar, sehingga sangat sulit untuk dimasukkan dalam perencanaan pendidikan umum pemerintah kolonial. Tujuan pendidikan dinilai tidak menyentuh kehidupan duniawi, metode yang dipergunakan tidak jelas kedudukannya, seorang guru apakah ia guru ataukah pemimpin agama, dan dalam hal bahasa yang dipergunakan, tulisan

---

<sup>46</sup> Zamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantrenm*, (Jakarta : LP3S, 1982) h. 17 -18

Arab berbeda dengan tulisan Latin sehingga menyulitkan untuk dimasukkan kedalam perencanaan pendidikan mereka. Sebaliknya mereka menerima sekolah zending untuk dimasukkan dalam sistem pendidikan pemerintah kolonial, karena secara filosofis dan teknis dianggap lebih mudah, yaitu baik tujuan, metode dan bahasa yang dipergunakan sesuai dengan nilai kebiasaan pemerintah kolonial Belanda. Orientasi sekolah umum diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan dalam kehidupan duniawi, sedang pesantren mengarahkan orientasinya pada pembinaan moral dalam konteks kehidupan ukhrawi. Kecuali itu, hal tersebut juga disebabkan pemerintah kolonial Belanda takut pada perkembangan Islam.

Dalam posisi uzlah atau hidup terpisah dengan pemerintah kolonial tersebut, pesantren terus mengembangkan diri dan menjadi tumpuan pendidikan bagi umat Islam di pelosok-pelosok pedesaan. Keadaan zaman terus berubah dan berkembang samapai zaman revolusi kemerdekaan.<sup>47</sup>

Pada zaman revolusi fisik pesantren merupakan salah satu pusat gerilya dalam peperangan melawan Belanda untuk merebut kemerdekaan. Banyak santri membentuk barisan Hisbullah yang kemudian menjadi salah satu embrio bagi Tentara Nasional Indonesia. Ciri khas pada masa-masa awal menggambarkan corak kepesantrenan.<sup>48</sup>

Uraian tersebut di atas menggambarkan sebagai bukti bahwa pesantren mampu menjadi pengemban tugas pada zamannya, sehingga bobot pesantren menjadi tinggi dimata bangsa, masyarakat, keluarga, dan anak muda. Pada masa itu pesantren merupakan tempat belajar yang sangat bergengsi, atau idola bagi generasi muslim Tetapi sejak sekitar dua dasawarsa terakhir ini pesantren mulai turun harganya dimata bangsa, masyarakat, keluarga, anak muda. Pesantren dianggap kurang mampu mewakili aspirasi mereka dan tidak mampu mewakili tantangan pembangunan. Secara kualitatif mereka meninggalkan pesantren tetapi secara

---

<sup>47</sup> Lihat, Mastuhu, *Op.Cit.* h. 22

<sup>48</sup> *Ibid.*

kuantitatif mereka tetap belajar di pasantren. Sementara itu, masuk pasantren lebih murah dan lebih mudah daripada sekolah umum, karena tidak ada syarat-syarat untuk memasuki pasantren, berapa saja dan kapan saja siswa dapat diterima. Namun hati mereka (masyarakat muslim) sebenarnya mendua: disatu segi mereka mengharapkan dan percaya pasantren dapat memberikan bekal moral agama kepada anak-anak mereka dalam mengarungi hidup modern, tetapi disegi lain mereka takut kalau pasantren tidak dapat membekali kemampuan kerja anak mereka dalam menghadapi masa depannya.

Banyak ahli sejarah beranggapan bahwa pesantren merupakan hasil adopsi dari model perguruan yang diselenggarakan oleh orang-orang Budha dan Hindu. Sebagaimana diketahui bahwa sewaktu Islam datang di Nusantara ini, di pulau Jawa telah berkembang Lembaga perguruan Hindu dan Budha yang menggunakan sistem biara dan asrama sebagai tempat para pendeta dan bikshu dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada para pengikutnya. Bentuk pendidikan seperti ini kemudian menjadi contoh model bagi para wali dalam melakukan kegiatan penyiaran dan pengajaran Islam kepada masyarakat luas dengan menmgambil bentuk sistem biara dan asrama dengan merubah isinya dengan pangajaran agama Islam yang kemudian dikenal dengan pondok pesantren.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ditpekapontren, *Loc.Cit*



## B. UNSUR–UNSUR SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN

Pesantren sebagai lembaga *tradisional*<sup>50</sup> Islam, secara historis telah ada sejak tahun 1630 M<sup>51</sup> dan hingga kini masih tetap bertahan. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren di dalamnya memuat berbagai unsur - unsur sistem pendidikan yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem.<sup>52</sup> sebagai lembaga pendidikan Islam, Sistem pesantren berarti totalitas dan keterkaitan dari seperangkat unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu dan saling melengkapi satu sama lain menuju tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan yang membangun pesantren. Sinkronisasi unsur-unsur serta nilai dalam sistem pendidikan pendidikan pesantren merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Sistem pendidikan pesantren didasari, digerakkan dan diarahkan dengan nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada dasar Islam yang membentuk pandangan hidup. Pandangan hidup yang secara kontekstual berkembang sesuai dengan realita sosial inilah yang menetapkan tujuan pendidikan. Dengan demikian, maka sistem pendidikan pesantren didasarkan atas dialog yang terus menerus antara kepercayaan terhadap ajaran agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki kebenaran relatif.

Prof. DR. Mastuhu, M.Ed dalam bukunya ‘Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren’ mengelompokkan unsur sistem pendidikan terdiri dari unsur *organik*, yaitu para pelaku pendidikan: pimpinan( kiai), guru (ustadz), murid (santri) dan

---

<sup>50</sup>Pengertian *tradisional* ini menunjuk bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun (300 – 400 tahun) yang lalu dan telah menjadi bagian yang mendalam dari sistem kehidupan sebagian besar umat Islam di Indonesia, yang merupakan golongan mayoritas bangsa Indonesia, dan telah mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perjalanan hidup umat; bukan ‘tradisional’ dalam arti tetap tanpa mengalami penyesuaian. Lihat: Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, INIS, Jakarta, 1994. Halaman 55.

<sup>51</sup> Zamakhsyari Dhofier dalam makalah, *Pesantren, alternatifkah ?*, jakarta, 12 Januari 1986, Halaman 4 dan *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Halaman 2, (tidak diterbitkan).

<sup>52</sup> Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “sistema”, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Baca : Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Halaman. 107

pengurus; dan unsur *anorganik*, yaitu: tujuan, filsafat dan tata nilai, kurikulum dan sumber belajar, proses kegiatan belajar mengajar, penerimaan murid dan tenaga kependidikan, teknologi pendidikan, dana, sarana, evaluasi dan peraturan terkait lainnya di dalam mengelola sistem pendidikan.<sup>53</sup> Secara terperinci biasa di kelompokkan menjadi :

- a. Aktor atau pelaku, meliputi: kyai, ustadz, santri dan pengurus.
- b. Sarana Perangkat Keras, meliputi: masjid, rumah kyai, rumah dan asrama ustadz/guru, pondok atau asrama santri, sarana dan prasarana fisik lainnya.
- c. Sarana Perangkat lunak, meliputi: tujuan, kurikulum, kitab, penilaian, tata tertib, cara pengajaran, perpustakaan, pusat dokumentasi dan penerangan, ketrampilan dan alat-alat pendidikan lainnya.

Kerangka teori tentang unsur-unsur pesantren diatas baik organik dan anorganik tersebut, akan peneliti gunakan sebagai pisau bedah dalam penyelidikan tentang karakteristik pesantren Kalimantan Timur, khususnya Samarinda yang menjadi tempat penyelidikan penelitian ini. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti dalam melakukan kerja penyelidikannya nantinya dalam memandang pesantren objek penelitiannya agar senantiasa utuh baik unsur yang konkrit dapat dilihat maupun unsur-unsur yang ada di balik fenomena-fenomena simbolik dari interaksi yang ada di dalamnya.

Sedangkan tentang nilai-nilai yang mendasari pesantren, peneliti berpendapat bahwa sistem pendidikan pesantren didasari, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran dasar Islam. Dalam konteks Islam, maka nilai dapat digolongkan menjadi dua kelompok: (1) Nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran mutlak yang bersifat fiqih-sufistik dan berorientasi pada kehidupan ukhrawi, dan (2) Nilai-nilai agama yang memiliki kebenaran relatif, bercorak empiris dan pragmatis untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan menurut hukum agama. Nilai ini secara kontekstual disesuaikan dengan realitas

---

<sup>53</sup> Mastuhu, *Op. Cit.* h. 19.

sosial masyarakat. Perpaduan kedua sumber nilai inilah yang membentuk pandangan hidup dan menetapkan tujuan yang akan dikembangkan pesantren. Nilai inilah nantinya yang akan menggiring apakah bersifat terbuka atau tertutup yang diterapkan di sebuah lembaga pesantren objek penelitian.

Nilai inilah juga nantinya dapat mempengaruhi pendekatan pendidikan apa yang akan diterapkan di pondok pesantren. Apakah karena 'nilai mutlak', pesantren tidak menerima hal-hal baru meski tidak bertentangan dengannya, atau cukup selektif menerimanya masukan, nilai, gagasan baru yang bersifat relatif asal tidak bertentangan dengan nilai mutlak. Juga, apakah pesantren masih memandang bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan mengutamakan dan mementingkan pendidikan akhlak atau moral dalam pembentukan kepribadian muslim dan berimplikasi bahwa belajar di pesantren tidak mengenal hitungan waktu dan target apa yang harus dicapai. Sehingga, bagi pesantren hanya ilmu fardhu 'ain (ilmu agama-ukhrawi) yang dipandang sakral. Sedangkan ilmu fardhu kifayah (ilmu non agama-duniawi) tidak atau sudah ada orientasi baru di pesantren objek penelitian.

Nilai-nilai ukhrawi yang dikembangkan pesantren menurut beberapa penelitian mendorong diterapkannya Pendekatan holistik yang berakibat dalam pesantren tidak pernah dijumpai rumusan tujuan pendidikan, kurikulum, evaluasi, syarat-syarat penerimaan santri dan tenaga edukatif secara jelas. Apakah orientasi-orientasi ini masih dipegang teguh oleh pesantren Kalimantan Timur atau sudah ada perkembangan lebih menarik. Disamping, fungsi dan prinsip apa saja yang dikembangkan dipesantren objek penelitian.

### **C. TIPOLOGI PASANTREN**

Secara umum pasantren dapat diklasifikasikan menjadi dua, yakni pasantren salafiyah atau tradisional<sup>54</sup> dan pasantren khalaf atau pasantren modern.<sup>55</sup> Sebuah

---

<sup>54</sup> Pesantren Salafiyah atau Tradisional adalah tipe pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem pendidikan khas pesantren, naik kurikulumnya maupun metode

pasantren disebut pasantren salaf jika pada pendidikannya semata-mata berdasarkan pada pola –pola pengajaran klasik atau lama, yakni berupa pengajian kitab kuning dengan metode pembelajaran tradisional serta belum dikombinasikan dengan pola pendidikan modern. Sedangkan pasantren khalaf atau modern disamping tetap dilestarikan unsur-unsur pasantren, memasukkan juga ke dalamnya unsur-unsur modern yang ditandai dengan sistem klasikal tau sekolah dan adanya materi ilmu umum dalam muatan kurikulumnya. Pada pasantren ini sistem sekolah dan imu-ilmu umum digabungkandenga pola pasantren klasik. Dengan demikian pasantren modern merupakan pendidikan pasantren yang diperbaharui atau dipermodern pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.

Komponen-komponen yang terdapat pada sebuah pasantren pada umumnya terdiri dari : pondok (asrama) mesjid, santri, pengajar kitab-kitab klasik serta kiai. Pada pasantren-pasantren tertentu terdapat pula di dalamnya madrasah atau sekolah dengan segala kelengkapannya. Penjelasan komponen-komponen ini diuraikan pada bagian berikut:

### 1. **Pondok**

Sebuah pasntren pada dasarnya adalah suatu lembaga pendidikan yang menyediakan asrama atau pondok (pemandokan) sebagai tempat tinggal bersama sekaligus tempat belajar para santri dibawah bimbingan kiai. Asrama para santri itu berada di dlam lingkungan kompleks pasantren di mana kiai beserta keluarganya bertempat tinggal serta adanya masjid untuk beribadah dan tempat mengaji untuk

---

pembelajarannya. Pada umumnya bahan pelajarannya meliputi ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab dengan menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab, dan sangat sedikit diajarkan mata pelajaran umum. Para santri tidak diikutsertakan dalam ujian yang diselenggarakan pemerintah secara nasional., sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi pada lembaga pendidikan sekolah dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang mensyaratkan adanya ijazah .Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, (Jakarta : Ditpekapontren, Oktober 2003 h. 5

<sup>55</sup> Sementara yang dimaksud dengan pondok pesantrem khalafiyah atau modern adalah pondok pesantren yang rtelah mengadopsi sistem pendidikan madrasah atau sekolah dengan menggunakan kurikulum pemerintah, baik yang menyelenggarakan SD, MI, SLTP dan SMU. *Ibid.*

para santri. Pada pasantren yang telah maju, pasantren biasanya memiliki kompleks tersendiri yang memiliki pagar pembatas untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri serta untuk memisahkan denan lingkungan sekitar. Di dalam kompleks ini diadakan pemisahan secara jelas anjtara perumahan kiai dan keluarganya dengan asrama santri, baik putra maupun putri. Pondok yang merupakan asrama bagi para santri merupakan ciri spesifik sebuah pasantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan surau di daerah Miangkabau.

Paling tidak ada empat alasan untuk pasantren untuk membangun pondok (asrama) untuk para santinya. Alasan itu adalah:

- a. Ketertariakn santri-santri untuk belajar kepada seorang kiai yang dikarenakan kermasyuran atau kedalaman atau keluasan ilmunya yang mengharuskannya untuk meniggalkan kampung halamannya untuk menetap di kediaman kiai itu.
- b. Banyak pasantren tumbuh dan berkembang di daerah jauh dari keramaian premukiman penduduk sehingga tidak dapat sehingga tidak terdapat perumahan yang cukup memadai untuk menampung santri dalam jumlah yang banyak.
- c. Terdapat sikap timbal bak antara santri dan kiai yang berupa terciptanya hubungan kekerabatan seperti halnya hubungab ayah dan anak. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama.
- d. Untuk memudahkan pengawasan dan pembinaan kepada para santri secara intensif dan istiqomah. Hal ini dapat di mungkinkan jika tempat tinggal guru dan murid berada dalam satu lingkungan yang sama. <sup>56</sup>

## 2. Masjid

Elemen penting dari pasantren adalah adanya masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri baik untuk pelaksanaan sholat lima waktu, sholat jum'at, Khutbah maupun untuk mengajar kitab-kitab kuning. Keduddukan

---

<sup>56</sup> Ditpekapontren (Pola Pembelajaran di Pesantren) *Op..cit* h. 9- 10

masjid sebagai pusat pendidikan ini merupakan manifestasi universal dari sistem pendidikan Islam sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, sahabat dan orang-orang sesudahnya.

Tradisi yang dipraktikkan Rasulullah ini terus dilestarikan oleh kalangan pesantren. Para kiai mengajar para murid-muridnya selalu di masjid. Mereka menganggap masjid sebagai tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai kepada para santrinya, terutama ketaatan dan kedisiplinan. Penanaman sikap disiplin kepada para santri dilakukan melalui shalat berjamaah setiap waktu di masjid, bangun pagi serta yang lainnya. Oleh karena itu masjid merupakan bangunan pertama kali dibangun sebelum didirikan sebuah pondok pesantren.

### **3. Madrasah atau Sekolah .**

Pada beberapa pesantren yang telah melakukan pembaharuan disamping adanya masjid sebagai tempat belajar. Juga disediakan madrasah atau sekolah sebagai tempat mendalami ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum yang dilakukan secara klasikal. Madrasah atau sekolah ini biasanya terletak dilingkungan pesantren secara terpadu.

Madrasah yang di khususkan untuk mendalami ilmu-ilmu agama biasanya disebut madrasah Diniyah. Sedangkan madrasah atau sekolah yang di dalamnya diajarkan pula ilmu-ilmu umum, maka penyelenggaraannya mengikuti pola yang telah di tentukan oleh Departemen Agama atau Departemen Pendidikan Nasional. Madrasah atau sekolah ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana lazimnya pendidikan sistem sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, lapangan olah raga dan lain-lainnya. <sup>57</sup>

Dengan demikian pada pesantren yang didalamnya diselenggarakannya pendidikan sekolah akan terdapat dua macam pembelajaran, yaitu pembelajaran ala pesantren dan pembelajaran ala sekolah.

---

<sup>57</sup> *Ibid.* H. 10 -11

#### 4. Pengajian Kitab-Kitab Kuning

Tujuan utama dari pengajian kitab-kitab kuning adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Sedangkan bagi para santri yang hanya dalam waktu singkat tinggal di pasantren, mereka tidak bercita-cita menjadi ulama, akan tetapi mencari pengalaman dalam hal pendalaman perasaan keagamaan.

Dalam kegiatan pembelajaran, pasantren umumnya mengadakan pemisahan tempat antara pembelajaran untuk santri putra dan santri putri. Mereka diajarkan terpisah dan kebanyakan guru yang mengajar santri adalah guru laki-laki. Keadaan ini tidak berlaku untuk sebaliknya. Pada pasantren lain ada menyelenggarakan pendidikan secara bersama (co education) antara santri putra maupun santri putri dalam suatu tempat yang sama dengan diberi hijab (pembatas) berupa kain atau dinding kayu.

Keseluruhan kitab-kitab kuning yang sebagaimana pembelajaran di pasantren secara sederhana dapat dikelompokkan kedalam sembilan kelompok yaitu Tajwid, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Aqidah Akhlak/Tasawuf, Fiqih, Ushul Fiqih, Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), Manthiq dan Balaqah dan Tarikh Islam<sup>58</sup>

Cara pasantren yang umumnya mengandalkan pada kitab kuning sesungguhnya memiliki kelemahan tersendiri. Secara garis besar, jenis serta jumlah materi serta tingkat pembahasan kitab-kitab kuning yang umumnya bukan disusun ulama Indonesia itu belum tentu sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kemampuan santri.

Karena itu beberapa pasantren yang telah mengadakan pembaharuan kitab-kitab yang dipelajari oleh para santri tidak sepenuhnya mengambil dari kitab-kitab utama saja, melainkan dissesuaikan dengan menangguk materi-materi yang belum dianggap perlu dan menambahkannya dengan muatan-matan baru

---

<sup>58</sup> *Ibid.* H. 12 - 13

berdasarkan kekhususan dan kebutuhan tertentu. Selain itu materi pembelajaran ditambah dengan ilmu-ilmu umum serta keterampilan-keterampilan khusus.

Seorang kiai yang memimpin pasantren kecil biasanya mengajarkan sejumlah kecil santri dengan beberapa kitab dasar dalam berbagai kelompok mata aji (pengajaran). Pada pasantren besar, para kiai mengkhususkan diri pada mata-mata aji tertentu saja. Para kiai sebagai pembaca dan penterjemah kitab tersebut bukanlah sekedar membaca teks, tetapi juga memberi pandangan-pandangan (interpretasi) pribadi, baik mengenai isi maupun bahasa teks. Dengan kata lain, para kiai itu memberikan komentar atas teks sebagai pandangan pribadinya. Oleh karena itu, para kiai atau ustaz perlu menguasai dengan baik selain tata bahasa Arab, juga wawasan keilmuan yang lebih luas berkaitan dengan mata aji termasuk cabang-cabangnya

## **5. Santri**

Secara generik santri di pasantren dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu: santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah para santri yang datang dari tempat yang jauh sehingga ia tinggal dan menetap di pondok (asrama) pasantren. Sedangkan santri kalong adalah para santri yang berasal dari wilayah sekitar pasantren sehingga mereka tidak memerlukan untuk tinggal dan menetap di pondok, mereka mereka bolak-balik dari rumahnya masing-masing.

Pada dasarnya pasantren tidak memerlukan seleksi khusus kepada calon santrinya, terutama seleksi untuk diterima atau ditolak. Para calon santri siapa saja yang datang akan diterima sebagai santri pada pasantren tersebut kapanpun ia mau sepanjang tahun karena di pasantren tidak dikenal adanya tes penerimaan santri baru serta tahun ajaran baru. Hal ini berbeda bagi pasantren modern. Pasantren yang telah maju, biasanya menerapkan ketentuan-ketentuan sebagaimana halnya yang berlaku dalam sistem sekolah. Sehingga pada pasantren ini dikenal adanya masa penerimaan santri baru serta adanya seleksi bagi calon santri itu serta adanya kesamaan dan



keseragama (unifikasi) waktu yang ditempuh oleh santri yang satu dengan santri yang lain pada jenjang pendidikan yang sama.

Para santri yang belajar pada pasantren salaf peyeleksian dilakukan secara alami yang mereka akan memilih sendiri kitab-kitab yang akan dipelajari berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan individual santri satu dengan yang lain jelas terlihat pada sistem pendidikan ini. Bagi santri yang pandai, ia akan dapat menyelesaikan pembacaan sebuah kitab dalam waktu yang relatif cepat dibanding dengan teman-teman yang kurang pandai. Sehingga walaupun waktu yang ditempuh antara santri yang satu dengan yang lain sama umpamanya, akan tetapi pengetahuan yang diperoleh dari banyaknya kitab yang dibaca oleh para santri itu berbeda.<sup>59</sup>

## **6. Kiai dan Ustaz**

Kiai dan ustaz (asisten kiai) merupakan komponen penting yang amat menentukan keberhasilan pendidikan di pasantren. Selain itu tidak jarang kiai atau ustaz adalah pendiri dan pemilik pasantren itu atau keluarga keturunannya. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan suatu pasantren amat bergantung pada figur kiai atau ustaz tadi. Sehingga pertimbangan utama seorang santri yang akan memasuki sebuah pasantren adalah berdasarkan pada kebesaran dan kemasyuran nama yang disandang oleh kiai dan ustaz itu.

Pada sistem pendidikan pasantren adakalanya sebuah pasantren dikelola oleh seorang kiai saja dengan dibantu oleh beberapa orang ustaz dan terkadang oleh beberapa orang kiai yang masih dalam satu keluarga besar dengan dipimipin oleh seorang kiai sepuh (senior). Fungsi para ustaz ini adalah sebagai pengajar para santri tingkat dasar dan menengah dibawah bimbingan dan petunjuk kiai. Proses pergantian kepemimpinan di pasantren itu sendiri pada umumnya menganut sistem pergantian secara geneologis.

---

<sup>59</sup> *Ibid.* 13-14

Kiai atau ustaz umumnya dirujuk oleh para santri tidak hanya oleh kelebihan ilmunya tentang Islam, melainkan juga dari tindakannya. Mereka senantiasa melihat kiai disamping sebagai orang tua bagi mereka, juga sebagai orang yang patut diteladani dan diikuti tindak tanduknya. Jelas kiai atau ustaz tidak hanya dirujuk sebagai pengajar atau peng-aji, tetapi juga sebagai pendidik yang dapat memeberikan ketauladanan hidup dan kehidupan. Dengan demikian, untuk dianggap sebagai kiai atau ustaz diperlukan pemenuhan persyaratan yang cukup berat. Elemen-elemen dasar dari sebuah pasantren di atas pada prakteknya terdapat beberapa variasi bentuk atau model suatu pasantren secara garis besar dapat dikelompokkan pada tiga macam tipe pasantren berikut:

- a. **Pasantren Tipe A**, memiliki ciri-ciri :
  - 1) Para santri belajar dan menetap di pasantren
  - 2) Kurikulum tidak tertulis, secara eksplisit, tetapi berupa hidden kurikulum (kurikulum tersembunyi yang ada adalah benak kiai)
  - 3) Pola pembelajaran menggunakan metode pembelajaran asli milik pasantren (sorongan, bandongan, dan lainnya).
  - 4) Tidak menyelenggarakan pendidikan dengan sistem madrasah
- b. **Pasantren Tipe B**, memiliki ciri-ciri:
  - 1) Para santri tinggal dalam pondok / asrama
  - 2) Pemaduan antara pola pembelajaran asli pasantren dengan sistem madrasah/sistem sekolah
  - 3) Terdapat kurikulum yang jelas
  - 4) Memiliki tempat khusus yang berfungsi sebagai sekolah / madrasah
- c. **Pasantren Tipe C**, memiliki ciri-ciri:
  - 1) Pasantren hanya semata-mata tempat tinggal (asrama) bagi para santri
  - 2) Para santri belajar di madrasah atau sekolah yang letaknya di luar bukan milik pasantren
  - 3) Waktu belajar di pasantren biasanya malam atau siang hari pada saat

santri tidak belajar di sekolah

- 4) Pada umumnya tidak terprogram dalam kurikulum yang jelas<sup>60</sup>

Apabila dilihat dari sarana fisik yang dimiliki sebuah pasantren, maka dapat di kelompokkan ke dalam lima macam, yaitu:

**a. Tipe pertama**

Pasantren tipe ini hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pasantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali karena untuk kegiatan pengajian, kiai menjadikan majdid atau rumahnya sendiri sebagai tempat pembelajaran kepada para santri. Pada santri tidak menetap dilingkungan itu, sehingga ada yang menyebutkan bahwa tipe ini tidak dapat di katagorikan sebagai pasantren tetapi sebagai kegiatan pengajian biasa.

**b. Tipe kedua**

Pada tipe ini selain adanya masjid dan rumah kiai, didalamnya tersedia pula bangunan berupa pondok atau asrama bagi para santri yang datang dari tempat jauh. Pada tipe ini unsur dasar pasantren telah terpenuhi sehingga dapat dikatagorikan sebagai pasantren.

**c. Tipe ketiga**

Pasantren tipe ini telah memiliki mesjid, rumah kiai serta pondok. Di dalamnya diselenggarakan pengajian dengan metode sorongan, bandongan dan sejenisnya. Di samping itu tersedia pula sarana lain berupa madrasah atau sekolah yang berfungsi sebagai tempat belajar untuk para santri, baik untuk ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum.

**d. Tipe keempat**

---

<sup>60</sup> *Ibid* h. 16 - 18

Pasantren tipe ini selain telah memiliki masjid, rumah kiai serta pondok juga telah memiliki tempat untuk pendidikan, keterampilan serta lahan untuk peternakan dan pertanian, tempat untuk membuat kerajinan, koperasi laboratorium, dan lain sebagainya

e. **Tipe kelima**

Pada tipe ini pasantren telah berkembang sehingga disebut pula sebagai pasantren modern. Di samping adanya masjid, rumah kiai dan ustaz pondok, madrasah terdapat pula bangunan-bangunan fisik lain seperti perpustakaan, dapur umum, rumah makan, toko, rumah penginapan untuk tamu, tempat olah raga, aula dan seterusnya.<sup>61</sup> Apapun bentuk dan tipenya, sebuah institusi dapat disebut sebagai Pondok Pasantren apabila memiliki sekurang-kurangnya tiga unsur pokok, yaitu: adanya kiai memberi pengajian, para santri yang belajar dan tinggal di pondok dan adanya mesjid sebagai tempat ibadah dan tempat mengaji

Institusi pasantren terkadang juga dikelompokkan kepada pasantren besar dan pasantren kecil. Pengelompokan ini didasarkan pada jumlah santri yang dimiliki oleh suatu pasantren. Sebuah pasantren yang memiliki santri lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang dapat dikelompokkan sebagai pasantren besar. Pengelompokan seperti ini pada kenyataannya tidak dilakukan secara kaku. Bisa saja suatu pasantren dengan jumlah hanya 1.000 (seribu) orang santri dikatakan sebagai pasantren besar dikarenakan kebesaran nama kiainya atau karena kebesaran masa lalunya. Dengan demikian, besar kecilnya suatu pasantren amat bergantung kepada kebesaran nama yang disandang kiainya.

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka pendidikan pesantren baik tempat, bentuk, hingga substansi telah jauh mengalami perubahan. Pesantren tak lagi sederhana seperti apa yang digambarkan seseorang, akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

---

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 19 - 20

Berdasarkan sistem pengajarannya, pondok pesantren terbagi menjadi 5 klasifikasi pondok pesantren, yaitu :

- a. Pondok pesantren *salaf* / klasik, yaitu : pondok pesantren yang didalamnya terdapat sistem pendidikan *salaf* (weton dan sorogan) dan sistem klasikal (madrasah) salaf.
- b. Pondok pesantren semi berkembang, yaitu : pondok pesantren yang didalam nya terdapat sistem pendidikan *salaf* (weton dan sorogan), dan klasikal (madrasah) swasta dengan kurikulum 90% agama dan 10% umum.
- c. Pondok pesantren semi berkembang, yaitu : pondok pesantren seperti semi berkembang, hanya saja sudah lebih bervariasi dalam bidang kurikulum nya, yakni 70% agama dan 30% umum. Disamping itu juga diselenggarakan madrasah SKB Tiga Menteri dengan penambahan diniyah.
- d. Pondok pesantren *khalaf* /modern, yaitu : seperti bentuk pondok pesantren berkembang, hanya saja sudah lebih lengkap lembaga pendidikan yang ada didalamnya, antara lain diselenggarakannya sistem sekolah umum dengan penambahan diniyah (praktek membaca kitab salaf), perguruan tinggi (baik umum maupun agama).
- e. Pondok pesantren ideal, yaitu : sebagaimana bentuk pondok pesantren modern hanya saja tempat pendidikannya lebih lengkap, terutama bidang keterampilan yang meliputi pertanian, teknik, perikanan, perbankan, dan benar-benar memperhatikan kualitasnya dengan tidak menggeser ciri khusus kepesantrenannya yang masih relevan dengan kebutuhan masyarakat/perkembangan zaman. Dengan adanya bentuk tersebut diharapkan alumni pondok pesantren benar-benar berpredikat *khalifah fil ardhi*.<sup>62</sup>

Pada perkembangan terakhir, sistem perkembangan pesantren telah mengalami proses *konvergensi*. Dan setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam lima tipe, yaitu: *pertama* pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan

---

<sup>62</sup>M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 87-88. Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 196

kurikulum Nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan maupun yang memiliki sekolah keagamaan sekaligus memiliki sekolah umum; *kedua*, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum mesti tidak menerapkan kurikulum Nasional; *ketiga*, pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyyah; *keempat*, pesantren yang hanya menjadi tempat pengajian (majelis ta'lim); dan *kelima*, pesantren yang disediakan untuk asrama mahasiswa dan pelajar sekolah umum.<sup>32</sup> 36

Arus globalisasi yang telah menjamah bidang pendidikan dalam segala bentuk dan coraknya, senantiasa mendorong pesantren harus mencari alternatif murni buatan pesantren maupun dalam bentuk penyerapan. Abdurrahman Wahid barangkali menyadari urgensi lembaga pendidikan umum tersebut di pesantren sehingga ia sejak dini menawarkan alternatif dengan mendirikan sekolah umum yang di kombinasikan dengan pengajaran agama melalui pengajian waton. Mungkin bentuk ini akan mencapai momentum terbesar di kalangan pesantren. Untuk menggali kemungkinan mendirikan sekolah-sekolah baru dalam jumlah besar, sebenarnya dapat ditempuh pemecahan lain yang bersifat lebih langsung. Pemecahan tersebut adalah yang berbentuk ajakan serius pada pesantren untuk mendirikan sekolah umum di lingkungan masing-masing. Sekolah umum dapat diserahkan pengelolaannya dari segi fisik dan materiil pada pesantren, semenjak mendirikan, pemelihara dan pengembangannya, pesantren memiliki kemampuan potensial untuk mengarahkan dana-dana yang diperlukan untuk tujuan tersebut dari masyarakat, jika pesantren sendiri bersedia melaksanakan.<sup>63</sup>

Pelacakan terhadap timbulnya lembaga-lembaga umum di pesantren seperti SD, SMP dan SMA akan menemukan paling tidak dua jawaban: *pertama*, sebagai upaya pesantren dalam melakukan adaptasi dengan perkembangan pendidikan Nasional, atau menurut Mastuhu karena dampak global dari pembangunan Nasional serta

---

<sup>63</sup> Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 66.

kemajuan ilmu pengetahuan teknologi; dan *kedua* adalah karena kepentingan menyelamatkan “nyawa” pesantren dari kematian selamanya. Kebutuhan adaptasi sebenarnya telah dirintis sejak mendirikan madrasah, yang memperlancar proses pembaharuan kelembagaan. Sedang upaya menyelamatkan kehidupan pesantren merupakan tindakan yang strategis dan spontan. Kedua faktor ini saling mempengaruhi berdirinya lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai pengembangan (pemantapan pembaharuan) institusi pesantren.<sup>64</sup>

Pendidikan formal di sekolah merupakan salah satu upaya untuk pembentukan sikap, keterampilan dan pengetahuan mulai jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi. Ada dua model penyelenggaraan pendidikan yang selama ini telah berkembang di Indonesia yaitu pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non formal diantaranya dilaksanakan di pondok pesantren. Di samping itu, pondok pesantren juga menjadi salah satu pilihan pendidikan karena lembaga ini mengutamakan upaya pencerdasan spiritual atau keagamaan. Dalam perkembangannya, sekarang ini banyak pondok pesantren di Indonesia yang juga menyelenggarakan pendidikan formal persekolahan. Pilihan memadukan sistem pendidikan formal formal di sekolah dan pondok pesantren ini, karena secara umum sekolah dan pondok pesantren merupakan dua lembaga pendidikan yang masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda satu sama lain. Apabila keunggulan dari kedua lembaga pendidikan itu dipadukan, maka akan tercipta sebuah kekuatan pendidikan yang kuat dan berpotensi mampu menghasilkan generasi muda Indonesia yang unggul, handal, dan berkarakter.<sup>65</sup>

Melalui lembaga pendidikan umum kyai bisa menempuh kebijakan-kebijakan dari dua jalur : jalur *pertama* adalah para santri dilibatkan dalam pendidikan umum agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, sebaliknya jalur *kedua* adalah siswa-siswa sekolah umum tersebut diwajibkan mengikuti kegiatan pesantren.<sup>36</sup>

---

<sup>64</sup> Mujamil Qomar, *Op.cit.*, hlm. 98

<sup>65</sup> <http://www.psmp.web.id/berita/91-peran-smp-berbasis-pesantren> (11 September 2014), diakses 28 Oktober 2015 Pukul 19.07 WIB

Transformasi kelembagaan di kalangan pesantren dalam konteks ini tidak menghapus bentuk lembaga yang lama. Jika perubahan bentuk yang baru menghapus bentuk yang lama, orientasi pesantren jelas menuju ke arah pendidikan sekuler, tetapi perubahan yang terjadi tidak demikian. Perubahan-perubahan tersebut tidak menggusur bentuk lama, bahkan bentuk yang lamapun masih dilestarikan sebagai bagian dari komponen pendidikan pesantren. meskipun suatu pesantren telah mencapai kemajuan (kemodernan), tetapi masjid sebagai warisan bentuk paling awal selalu melengkapi setiap pesantren. Sebenarnya pelestarian setiap unsur-unsur lama merupakan gaya kehidupan pesantren sebagaimana terefleksikan dalam slogan yang dipegangnya, *al-Mahafuzhah „ala al-Qodim al-Shalih* (memegang unsur-unsur lama yang baik), maka secara kelembagaan pesantren tampak sangat unik. Sekolah berbasis pesantren merupakan lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama yang dipadukan dengan sistem pendidikan pesantren, dimana kurikulum pelajaran pesantren dimasukkan kedalam kurikulum sekolah. Perpaduan kedua bentuk institusi pendidikan pesantren dan sekolah umum sebagaimana dikatakan oleh Nurcholis Madjid bahwa akan melahirkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif, tidak saja menekankan terhadap khasanah keilmuan Islam klasik tetapi juga mempunyai integritas keilmuan modern



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. KARATERISTIK TUJUAN KURIKULUM MADARASH ALIYAH (MA) BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA.**

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh wilayah RI, pemerintah menetapkan peraturan yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan Madrasah Lanjutan Atas (sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Tsanawiyah.<sup>35</sup> Madrasah Aliyah (MA) ini berada di bawah naungan kemenag setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari kebijakan pengelolaan walaupun masih ada sedikit ketimpangan, namun mulai disamakan. Dengan lahirnya Uu No. 20/2003 Sisdiknas, diperkuat oleh PP No.19/2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP) kemudian dijabarkan oleh beberapa Permendinas, maka upaya menjadikan madrasah sebagai "*Center of excellence*" atau pusat keunggulan sudah saatnya digairahkan jangan ditunda-tunda lagi; karena madrasah memiliki keunggulan komperatif, yaitu penekanan yang signifikan pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas), disamping penekanan pada pendidikan umum berupa pemberian mata pelajaran umum.

Madrasah Aliyah memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri, sehingga dalam kontek kurikulum perlu menampakan karakteritik tersebut. Oleh karena itu perumusan dan pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) menjadi suatu hal yang sangat penting. Di satu sisi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) tersebut harus memiliki relevansi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sisi lain madrasah Aliyah harus mencerminkan jati dirinya sebagai satuan pendidikan yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karakteristik tersebut dapat dilihat pada aspek

peserta didik.

Tujuan Penyelenggraan pendidikan madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan pendidikan umum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi; memiliki dan etos budaya kerja; dan dapat memasuki dunia kerja atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan kata lain tujuan, Pendidikan Madrasah Aliyah (MA) adalah memproduksi lulusan yang bisa masuk ke perguruan tinggi umum dan Agama serta dapat diterima bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar.

Berikut ini beberapa contoh kasus tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola dengan berbasis pada pesantren di Indonesia. Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 misalnya menentukan tujuan melalui perencanaan tujuan dengan beberapa langkah. Hal yang harus diperhatikan pada saat perencanaan kurikulum adalah tujuan. Tujuan yang baik harus sesuai dengan visi dan misi madrasah. Berikut ini merupakan visi, misi, dan tujuan MA Futuhiyyah 1 antara lain: VISI “terbentuknya generasi Islam yang berwawasan iman dan, berakhlakul karimah, berprestasi dalam pendidikan serta terampil berbahasa” MISI madrasah ini adalah 1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif sehingga potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang secara optimal; 2) mewujudkan pembentukan karakter peserta didik yang islami sehingga mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. ; 3) meningkatkan prestasi peserta didik baik akademik maupun non akademik; 4) meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Dan 5) menciptakan suasana hubungan kekeluargaan antara madrasah dengan masyarakat.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>Moh. Kenang Slamet, *Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren Di Ma Futuhiyyah 1 Mranggen Demak, FTIK Semarang*, tahun 2015, h. 60 -

Setelah menentukan visi dan misi madrasah, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan madrasah. Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah misalnya memiliki tujuan sebagai berikut; 1) mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran aktif.; 2) mengembangkan potensi akademik, minat, dan bakat peserta didik melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler; 3) membiasakan peserta didik untuk dapat berperilaku yang islami di lingkungan madrasah; 4) meningkatkan prestasi akademik peserta didik dengan nilai rata-rata 7,5; 5) meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang bakat minat melalui kejuaraan dan kompetisi

Secara spesifik tujuan diterapkannya kurikulum berbasis pesantren di MA Futuhiyyah 1 diantaranya untuk tetap melanjutkan ciri khas pendidikan pesantren pada madrasah sebagaimana pesantren merupakan lembaga pendidikan islam tertua di nusantara.<sup>5</sup> Lebih lanjut M. Hafid, salah satu pendidik di MA Futuhiyyah 1 menyebutkan bahwa tujuan mengajarkan pelajaran pesantren di MA Futuhiyyah 1 adalah untuk melestarikan budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik.<sup>67</sup>

Selanjutnya hasil penelitian Muhammad Nasir dan kawan kawan yang berjudul “Karakteristik Pondok Pesantren di Samarinda” misalnya menyebutkan bahwa tujuan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Syaichona Cholil adalah untuk 1) membenahi akhlak umat Islam, 2) meneladani dan meneruskan estafet perjuangan Rasulullah SAW. 3) melahirkan santri atau generasi Islam yang berwawasan *ahlusunnah wal jama'ah* dan berilmu pengetahuan dan teknologi dan 4) agar santri dapat menjalankan nilai - nilai ajaran Islam secara kaffah serta 5) agar dapat melahirkan kader yang tangguh dan mampu berkifrah di tengah masyarakat dengan mengedepankan nilai ajaran Islam.

Sedangkan orientasi nilai yang diinginkan pesantren adalah terwujudnya

---

<sup>67</sup>Moh. Kenang Slamet, *Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren Di Ma Futuhiyyah 1 Mranggen Demak, FTIK Semarang*, tahun 2015, h. 60 -

tatanan kehidupan yang Islami, demokratis dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian cara atau tata cara pesantren dalam pelaksanaan nilai guna terwujud apa yang menjadi tujuan yaitu dengan jalan ilmu yang diajarkan harus dapat langsung diperaktekan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan pesantren dan dimulai dari hal yang paling kecil sekalipun.

Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren modern Ihya Ulumuddin memiliki tujuan yang jelas dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan Formal. Tujuan tersebut tergambar pada visi dan misi pondok pesantren. Adapun Visi Pondok Modern Ihya 'Ulumuddin adalah *“menjadi kader pemimpin terdidik, beriman, berpengetahuan, mandiri dan berahlak mulia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik serta bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara”*

Sementara Misinya adalah *Pertama*, Melatih dan mendidik para santri dengan metode dan kurikulum terpadu yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman dan *Kedua*, Mendidik dan membina akhlak atau budi pekerti yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, *serta Ketiga* Meningkatkan kualitas para guru atau *asatizd* melalui pendidikan khusus dan pelatihan-pelatihan keterampilan.

Dengan demikian, tujuan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Modern Ihya Ulumuddin adalah melahirkan kader pemimpin terdidik, beriman, berilmu pengetahuan, mandiri dan berakhlak mulia untuk menyongsong masa depan yang lebih baik serta bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

Lebih Jauh Muhammad Nasir dan kawan kawan<sup>68</sup> memaparkan tujuan Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren. Sabilarrasyad tergambar pada tiga tujuan yang akan dicapai dengan mencakup nilai yang diorientasikan kepada santri dan siswanya yaitu 1) mensyiarkan agama Islam dan melestarikan serta mengembangkan ahlussunnah wal jama`ah.; 2) melahirkan generasi muda yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam, 3) mempersiapkan kader ulama dan juru dakwah

---

<sup>68</sup>Muhammad Nasir dan kawan kawan, *Karakteristik Psantren di Kota Samarinda, Hasil Penelitian*, 2004. H.59

atau mubalig di tengah-tengah masyarakat.

Pondok Pesantren As Sa'adiyah yang di dalamnya terdapat Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola berbasis pesantren juga mempunyai tujuan yang akan dicapai termasuk nilai yang diorientasikan kepada santri atau lulusannya. Tujuan yang dimaksud adalah, 1) membentuk kader yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. melahirkan generasi yang berwawasan dan berkeperibadian luhur berdasarkan Alqur`an dan sunnah; 3) mengabdikan dirinya dan berperan serta dalam menyampaikan amar ma`ruf nahi mungkar ditengah-tengah masyarakat. Yang akan dikedepankan pesantren ini adalah melakukan kordinasi dan lembaga pendidikan lain serta terbuka agar semua penganut agama untuk saling menghargai. Diharapkan bahwa alumni pondok ini memiliki pemahaman tentang perlunya bertoleransi dengan agama lain dan saling menghargai perbedaan yang dengan bersifat koperatif dan terbuka kepada siapa saja dengan kata lain pondok ini inklusif.

Tujuan merupakan sebuah tuntutan dan acuan agar tidak lepas dari harapan dan cita-cita. Tujuan didirikan Pondok peantren ini adalah *Pertama*, Untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda agar dapat mengetahui ajaran Islam yang kaffah dan *Kedua*, agar dapat bersosialisasi dengan pihak terkait diantaranya pemerintah dan masyarakat<sup>69</sup>

Berdasarkan gambaran data setiap pondok pesantren tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa karakteristik tujuan dari Madrasah Aliyah (MA) pada pondok pesantren di Indonesia adalah

**Pertama**, sangat menekankan pada pentingnya pengamalan ajaran agama Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai sumber utama moral dan akhlak mulia. Dengan penekanan ini, maka pihak Pengelola Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren melalui kurikulumnya membekali para santrinya dengan pengamalan dan penerapan akhlak yang terpuji sehingga dapat menjadi teladan, baik

---

<sup>69</sup>Muhammad Nasir dan kawan kawan, *Karaktritik...h*, 56-67

di dalam lingkungan pesantren maupun di luar pesantren. Berdasarkan karakteristik ini, maka pada dasarnya Tujuan Madrasah Aliyah (MA) adalah untuk mencetak generasi muda yang memiliki sikap spritual yang baik.

Hal ini berarti Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren di Indonesia termasuk menganut aliran model konsep kurikulum humanistik. Kurikulum ini berorientasi pada masa kini, siswa berpotensi karena memiliki intelektual, sosial, afektif, fisik, motorik dan berkembang sendiri, menekankan pada kebutuhan perkembangan pribadi anak dan tugas pendidikan adalah menyediakan fasilitas dan menumbuhkan potensi serta menghindarkan gangguan. Beberapa ciri dari kurikulum ini adalah menekankan pada kurikulum yang berpusat pada siswa, isi atau bahan ajar sesuai kebutuhan, bakat dan minat siswa. Siswa dalam hal ini turut serta dalam "menyusun" kurikulum. Tidak ada standar, yang ada adalah standar minimal.

Jika dikaitkan dengan pendapat Murry Print bahwa dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) adalah berorientasi pada kurikulum humanistik. *Humanistic* atau konsep relevansi personal mendukung pandangan yang beranggapan bahwa kurikulum sekolah mempersiapkan berbagai pengalaman yang berharga untuk meningkatkan pengembangan personal siswa. Dalam menentukan isi konsep kurikulum ini, kiranya menyeleksi materi yang memungkinkan peserta didik melahirkan kesatuan rasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *holistic* yang mengintegrasikan domain kognitif, afektif dan psikomotoric. Oleh karena itu, tugas guru adalah menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan apa yang menjadi esensi dari belajar sendiri. Evaluasi yang digunakan bersifat *qualitative* yaitu ukuran kualitatif dengan cara observasi, wawancara, catatan pribadi, partisipasi, refleksi dan lain-lain. Sementara landasan filsafat yang di anut adalah aliran filsafat progresivisme atau *Prograsive Educatif* dengan tokohnya Jhon Dewey dan filsafat

romantisme atau *Romantic Educatif* oleh J Rousseau.<sup>70</sup>

Jika dikaitkan dengan karakteristik tujuan kurikulum yang diterapkan pada tahun 2013, maka sesungguhnya tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis Pesantren terbagi menjadi empat bagian yaitu; tujuan akademik, tujuan sosial, tujuan spritual dan tujuan keterampilan. Dengan kata lain, terdapat 4 kategori tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbais pesantren. Dengan kata lain, Madrasah Aliyah (MA) harus mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; Dalam bahasa kurikulum kompetensi ini dibagi menjadi yaitu; 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan

Pembagian tersebut merupakan penjabaran dari tiga kategori tujuan menurut Taksonomi Blomm yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah contoh darir tujuan atau Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah yang lulusannya diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;

Komptensi Lulusan Madrasah Aliyah (MA)	
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan

---

<sup>70</sup>Murry Print, Print, Murray.. *Curriculum Development and Design*. Second Edition, New South Wales Australia : Allen & Unwim, 1993 h. 77

Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian.
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Tabel 4.1  
Komptensi Lulusan Madrasah Aliyah (MA)

## B. KARAKTERISTIK ISI KURIKULUM MADARASAH BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA.

Isi Kurikulum adalah bahan ajar dalam proses belajar mengajar yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan nilai (values) yang terkait dengan bahan ajar yang disampaikan tersebut. Agar menjadi guru yang efektif, penulis menyebutkan isi kurikulum sebagai berikut: a) pengetahuan yang berisi fakta, prinsip, dan generalisasi yang ada dalam bahan ajar.; b) pengetahuan pendidikan meliputi metode yang digunakan guru dalam mengajar agar siswanya benar-benar memahami materi ajar.; c) pengetahuan kurikulum, yakni pemahaman terhadap konteks kurikulum untuk mengajarkan pengetahuan tentang materi ajar.

Kriteria pemilihan isi kurikulum. Terdapat enam kriteria pemilihan isi kurikulum, yaitu; a) signifikan; dengan pengetahuan dan disiplin ilmu, keseimbangan antara konsep, ide dan fakta.; b) validitas; konten harus otentik, benar dan akurat.; c) relevansi sosial; berhubungan dengan nilai moral, ideal, masalah sosial, isu-isu kontroversi; d) utility (berguna); menyiapkan siswa agar hidup lebih "dewasa". e) learnability (dapat dipelajari); dapat digunakan siswa dengan latar



belakang dan kemampuan yang berbeda; f) *interest*; didasarkan pada minat (*interest*) anak didik.

Sementara ruang lingkup isi kurikulum mengacu pada keluasan dan kedalaman kurikulum pada satu kurun waktu. Dalam menentukan ruang lingkup isi kurikulum, murry print menyarankan beberapa konsep yaitu; a) *time constraint* (hambatan waktu); b) a *common core* (konsep inti); c) *pecial needs of content* (kebutuhan khusus dari Isi); d) *integration of content* (keterpaduan isi) dan; d) a *total amount of content required* (jumlah isi yang dibutuhkan)

Penyusunan materi juga harus mempertimbangkan keruntutan (*sequence*). Keruntutan adalah susunan dari isi kurikulum yang disampaikan pada peserta didik. Ada enam kriteria untuk mengurutkan isi kurikulum sebagaimana yang disarankan oleh Robert Zais, yaitu: a) dari yang sederhana menuju yang ruwet/sulit (*simple to complex*); b) pelajaran bersyarat (*prerequisite learnings*); c) kronologis (*chronology*); d) dari keseluruhan ke bagian-bagian (*whole-to-part learning*); e) dari konkrit ke yang abstrak (*increasing abstraction*) dan f) pengurutan secara spiral (*spiral sequencing*)<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil penelitain yang telah dilakukakn oleh Syeh Hawib dan kawan kawan diketahui bahwa beberapa Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis pesantern memiliki isi atau konten kurikulum yang berbeda beda. Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesnatrn Syaichona Cholil mislanya mengacu pada tiga hal yaitu, kurikulum pendidikan Nasional (DIKNAS) yang mengakomodasi pelajaran umum, Kurikulum Departemen Agama (DEPAG) dan kurikulum lokal pesantren. Kurikulum Pendidikan Nasional dan Kurikulum Departemen Agama diterapkan untuk kepentingan para santri yang akan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan memperoleh ijazah. Kurikulum ini diberlakukan bagi lembaga pendidikan formal atau SMP dan SMU. Sementara kurikulum lokal untuk memperkaya wawasan dan pemahaman keagamaan para santri yang berlaku untuk semua santri.<sup>72</sup>

Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantrn. Modern Ihya

---

<sup>71</sup> Robert Zais, *Curriculum Principles and Foundation*. (New York : Harper and Row Publisher., 1876). h. 32.

<sup>72</sup> Syeh Hawib Hamzah dkk, *Karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren di Kota Samarinda*, Hasil Penelitian Tahun 2014, h. 35-78

Ulumuddin sesungguhnya mengacu pada kurikulum KMI Gontor. Meski demikian, untuk lembaga pendidikan formalnya seperti Pondok Pesantren Modern Ihya Ulumuddin juga mengacu pada Departemen Agama. Adapun kurikulum yang digunakan pada pondok pesantren Nabil Husein adalah kurikulum yang mengacu pada kurikulum Diknas dan kurikulum yang di keluarkan depag kota Samarinda dan kurikulum Lokal. Kurikulum yang disebut terakhir bertujuan untuk mempertahankan corak kepesantrenan sekaligus upaya menambahkan wawasan, pemahaman dan pengamalan keagamaan

Pondok Pesantren Sabilarrsayad Kurikulum pondok pesantren Sabilarrasyad juga mengacu kepada kurikulum Depag. Di samping itu pondok juga memiliki kurikulum tersendiri untuk madrasah diniyah. Pondok Pesantren As Sa'adiyah Kurikulum Pondok Pesantren As sa'adiyah juga berkiblat pada Kurikulum Depag . Hal tersebut diberlakukan untuk lembaga pendidikan formal atau madrasah. Sebab apabila tidak berkiblat dan mengikutkan santri pada ujian yang diselenggarakan Depatemen Agama termasuk Pendidikan Nasional, maka dikawatirkan peminat santri menjadi menurun. Pesantren beranggapan Kurikulum Diknas atau Depag tidak cukup, karena apabila PP. Hanya mengacu pada Depag dan Diknas, maka dikhawatirkan santri masoih kekeringan dari perolehan ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, Pondok pesantren membuat kurikulum lokal untuk kepentingan pengembangan wawasan dan kompetensi keagamaan santri. Sementara kurikulum yang digunakan pada pondok pesantren Darul Fata adalah kurkulum yang mengacu pada kurikulum Depag dan Diknas. Di samping itu pondok juga memeiliki kurikulum tersendiri untuk madrasah diniyah dan takhasus.<sup>73</sup>

Melihat gambaran data di atas, maka dikemukakan bahwa pada dasarnya karakteristik Kurikulum dan Sumber Belajar pondok pesantren yang menjadi obyek penelitian peneliti dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu

---

<sup>73</sup> Syeh Hawib Hamzah dkk, *Karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren di Kota Samarinda*, Hasil Penelitian Tahun 2014, h. 35-78

*Pertama*. Pondok Pesantren yang hanya mengembangkan kurikulum lokal berdasarkan karakteristik tujuan yang ditetapkan. *Kedua*, Pondok Pesantren yang memiliki tiga komponen kurikulum dengan kepentingan tertentu, masing-masing kurikulum pendidikan nasional (DIKNAS), kurikulum Departemen Agama (DEPAG) dan Kurikulum Lokal yang disesuaikan dengan kepentingan pesantren. Pondok Pesantren yang termasuk dalam kategori ini adalah Pondok Pesantren *Syaichuna Cholil*, Pondok Pesantren *Modern Ihya Ulumuddin*, Pondok Pesantren *Nabil Husein*, Pondok Pesantren *Sabilarrasyad* dan Pondok Pesantren *darul Fata*.<sup>74</sup>

Kelokalan kurikulum setiap pesantren menjadi berbeda-beda jika diaplikasikan dalam bentuk bidang studi. Oleh karena itu, walaupun tujuh dari delapan pondok pesantren memiliki tiga komponen tetapi pada komponen kurikulum lokal akan terlihat perbedaan dan karakteristik masing-masing. (Perbandingan kurikulum delapan Pondok Pesantren di kota Samarinda, dapat dilihat pada lampiran

Lebih Jauh Pondok Pesantren Syaichona Cholil mengajarkan Kitab ilmu alat, fiqh, tauhid, tafsir dan hadis, Pondok Pesantren Modern Ihya Ulumuddin mengajarkan kitab yang mengacu pada KMI Gontor, Pondok Pesantren Nabil Husein mengajarkan kitab kitab kuning seperti al Jurumiyah, Bulughul Maram, Riyadussolihin, Pondok Pesantren. Sabilarrasyad mengajarkan kitab kuning seperti al Faraid, al Hadis, at Tarihk, al- Nahwu, al Balaghoh, dan lai lain, Pondok Pesantren As sa'adiyah mengajarkan kitab Kitab al-Sa'adah, Tafsir Jalalain, Fiqh Wadih, Bulughul Maram dan terakhir Pondok Pesantren Darul Fata mengajarkan kitab mabadi`ul faqhiyah, amshilah al- tasrif, tazwid zarkasi dan akidah islamiyah.<sup>75</sup>

Dari data yang diperoleh di atas, dipahami bahwa Pondok Pesantren As

---

<sup>74</sup> Syeh Hawib Hamzah dkk, *Karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren di Kota Samarinda*, Hasil Penelitian Tahun 2014, h. 35-78

<sup>75</sup> Syeh Hawib Hamzah dkk, *Karakteristik Kurikulum Pondok Pesantren di Kota Samarinda*, Hasil Penelitian Tahun 2014, h. 35-78

Sa'adiyah, Pondok Pesantren Nabil Husein dan Pondok Pesantren Darul Fata memperlihatkan secara jelas nama kitab yang diajarkan, sementara PP lainnya seperti PP. Istiqomahh, PP. Syaichuna Cholil, Pondok Pesantren. Modern Ihya Ulumuddin dan Pondok Pesantren Sabilarrasyad tidak jelas menyebutkan nama kitab yang diajarkan. Mereka hanya menyebut materi pengajian adalah seputar materi fiqh, tauhid, nahwu, hadis, faraidh dan tarikh. Jika hal ini di analisa, maka kelompok Pondok pesantren terakhir disebutkan hanya menyampaikan materi pengajian yang sebenarnya dapat diajarkan pada madrasah atau lembaga pendidikan formal.<sup>76</sup>

Contoh kasus yang dapat dilihat adalah karakteristik isi kurikulum atau struktur isi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 yang dikelola dengan basis pesantren terdiri dari sejumlah Mata Pelajaran. Mata pelajaran dalam hal ini terdiri dari mata pelajaran; a) Pendidikan Agama Islam yang meliputi Alqur'an Hadis, Fiqih, qidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam; b) Pendidikan Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) Bahasa Arab; e) Bahasa Inggris; f) Matematika; g) Program IPA Fisika, Kimia dan Biologi; h) Program IPS Geografi, Ekonomi dan Sosiologi; i) Program Bahasa, Sastra Indonesia, Antropologi dan Bahasa Asing (Arab); j) Program Keagamaan Tafsir, Hadis dan Ilmu Kalam; k) Sejarah; l) Seni Budaya; m) Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan; n) Teknologi Informasi dan Komunikasi; o) Bahasa Asing (Jepang); p) Muatan Lokal: Nahwu, Balagah, Us}ul Fiqih, Faroid, Aswaja dan Shorof dan; q) Praktik Ibadah<sup>77</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, usaha MA Futuhiyyah 1 dalam sistem pembelajaran pesantren ke dalam kurikulum madrasah tampak pada kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama kemudian rujukan materinya mengacu pada kitab-kitab *salaf* yang biasa digunakan di pesantren yang biasa disebut dengan kitab *kuning*. Tujuannya adalah supaya peserta didik lebih mendalam menguasai suatu materi.

---

<sup>76</sup>

<sup>77</sup> Struktur Isi Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 Rembang

Kitab-kitab Referensi yang digunakan adalah a) Alqur'an al-Hadis Shofwatu al- Tafasir; b) Fiqih Kifayah al- Akhyar; c) Aqida h Akhlaq Husunu al- Hamidiyah; d) Sejarah Kebudayaan Islam serta e) tarikh Islam. Selain pada kurikulum PAI, kurikulum pesantren juga diterapkan secara spesifik pada kurikulum muatan lokal , yaitu sebagai berikut;a) Nahwu Alfiyyah Ibnu Malik; b) Balaghoh Jauhar al- Maknu'n; c) Ushul Fiqih Al- Luma'; d) Faroid Al- Miftah fi 'ilmi al- Faro'id; e) Aswa ja Hujjah Ahli al- Sunnah dan f) Shorof Amstilah al-Tashrifiiyyah Selain beberapa mata pelajaran yang telah disebutkan di atas, MA Futuhiyyah 1 menambahkan pelajaran khusus berupa kegiatan praktik ibadah. Pelajaran ini berisikan materi-materi yang biasa dibutuhkan di masyarakat, seperti praktik pembacaan *maulid diba'*, *tahlil*, dan *khithobah*<sup>78</sup>

Orientasi kurikulum ini mengikuti orientasi transmisi yang menganggap fungsi pendidikan adalah untuk mentransmisi fakta, keterampilan dan nilai kepada siswa agar siswa menguasai materi melalui teksbook, menguasai keterampilan dasar (bicalistung) dan menguasai nilai kebudayaan tertentu yang dibutuhkan dalam masyarakat serta mengaplikasikan pandangan-pandangan.<sup>79</sup> Oleh karena itu, kurikulum ini menekankan pada masa lalu, memelihara dan mewariskan ilmu dan teknologi, nilai dan budaya pada generasi berikutnya, isi pendidikan lebih menekankan pada segi intelektual dan fungsi guru adalah ekspert dan model.

Sementara menurut Nana Syaodih bahwa ciri kurikulum subjek akademik yang berkaitan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi adalah : 1) tujuan kurikulum subjek akademik adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses "penelitian". 2) Metode yang paling cocok digunakan dalam kurikulum ini adalah ekspositori dan inquiry. Ide-ide diberikan oleh guru kemudian dilaksanakan siswa sampai mereka menguasainya.

---

<sup>78</sup> Struktur Isi Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 Rembang

<sup>79</sup> Seller Meller Miller, John P. dan Seller, Wayne, *curriculum Perspective and Practice*, Longman : New York dan London. 1985,h. 5-6

Konsep utama disusun secara sistematis dengan ilustrasi yang jelas untuk selanjutnya dikaji. Dalam materi disiplin ilmu yang diperoleh, dicari berbagai masalah penting kemudian dirumuskan cara pemecahannya. 3) Pola organisasi isi (materi pelajaran) dari kurikulum subjek akademis ini di antaranya adalah; *correlated curriculum*, *unified or concentrated curriculum*, *integrated curriculum and problem solving curriculum*. *Correlated curriculum* adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. *Unified or concentrated curriculum* adalah pola organisasi bahan pelajaran tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dan berbagai disiplin ilmu. Sementara *Integrated curriculum* adalah warna tiap-tiap disiplin ilmu sudah tidak terlihat lagi. Dalam hal ini bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan atau segi kehidupan tertentu. Dan *problem solving curriculum* adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. 4) Evaluasi kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan sifat mata pelajaran. Dalam bidang studi humaniora misalnya, lebih banyak digunakan bentuk uraian (*essay test*) dari pada tes objektif. Bidang studi ini membutuhkan jawaban yang merefeksikan logika dan menyeluruh.<sup>80</sup>

Berangkat dari kriteria di atas, maka diketahui bahwa model konsep kurikulum ini dilandasi oleh dua aliran filsafat pendidikan yaitu aliran filsafat Perennialisme dan aliran filsafat Essensialisme yang lebih menekankan pada intelektual dan proses. Menurut aliran ini bahwa kurikulum sekolah harus berpusat pada mata pelajaran (*Subject Matter Centered*). Di Sekolah Dasar misalnya, ia menekankan pada kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung. Sementara di Sekolah Menengah, mata pelajaran diperluas dengan menambahkan matematika, sains,

---

<sup>80</sup> Syaodih, Nana. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008), h. 89

humaniora, bahasa dan sastra. Penguasaan terhadap materi pelajaran tertentu seperti seni dan ilmu sastra tidak penting karena pelajaran tersebut hanyalah pelengkap, walaupun tetap perlu dipelajari. Sementara mata pelajaran yang paling esensi adalah filsafat, matematika, Ilmu pengetahuan Alam, Sejarah, bahasa, seni dan sastra. Mata pelajaran inilah yang dianggap perlu untuk menjalani kehidupan. Apabila mata-mata pelajaran tersebut dipelajari dengan tepat oleh siswa, maka mereka akan mampu mengembangkan potensi nalar sekaligus membuatnya sadar akan dunia fisik di sekitarnya.<sup>81</sup>

Selanjutnya peneliti akan memaparkan bagaimana isi atau kontens kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Al Anwar Rembang sebagai berikut; 1) Mata Pelajaran. Pengembangan pembelajaran di MA al-Anwar Pondok Pesantren al-Anwar Sarang didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>82</sup>

Selain ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan pembelajaran hadir karena adanya tuntutan dari orang tua peserta didik. Masyarakat beranggapan bahwa pendidikan merupakan sebuah investasi yang baik bagi masa depan putra dan putri mereka, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan sebaiknya tidak hanya dikelola dengan pola-pola tradisional tetapi juga menggunakan pola-pola modern. Referensi atau buku ajar yang digunakan sesuai dengan sistem kurikulum yang di pakai meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di madrasah., dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Sadulloh. *Filsafat Pendidikan* (Jakarta : Rosdakarya, 2007) h.162

<sup>82</sup>Subki, *Integrasi ...* h. 90-123

<sup>83</sup> Subki, *Integrasi ...* h. 90-123

Berdasarkan tipologi pesantren maka madrasah al-Anwar Pondok Pesantren al-Anwar Sarang termasuk tipe kombinasi. Karena didalamnya menggunakan sistem campuran atau gabungan (kombinasi) antara sistem pendidikan salafiyah/tradisional dan sistem pendidikan khalafiyah/modern. Pola pembelajaran tradisional dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik (kita kuning). Adapun sistem pembelajaran khalafiyah dilakukan melalui pola pembelajaran secara klasikal dan berjenjang.

Seiring dengan integrasi kurikulum, perubahan materi pelajaran dari pengkajian dasar-dasar (pokok) agama misalnya tauhid (keimanan), al-Quran, dan Nahwu sharaf, kemudian berkembang menjadi pengkajian pengembangan ilmu-ilmu dasar di atas, tauhid (keimanan) dengan materi pelajaran „*aqoid* (ilmu kalam), al-Quran dengan ilmu tajwid dan tafsirnya, hadits dengan musthalah al-hadits, fiqh dengan ushul al-fiqhnya, bahasa Arab, nahwu, sharaf-pun kemudian diajarkan dengan sistem berjenjang.<sup>84</sup>

Realitas di lapangan menunjukkan telah terjadi integrasi sistem pendidikan madrasah dan pesantren tradisional bersamaan dengan berlakunya sistem klasikal, baik dalam pembelajaran kitab kuning maupun jenjang pendidikannya. Namun integrasi yang benar-benar terjadi secara besar-besaran pada saat digunakannya kurikulum pendidikan formal baik kurikulum dari Kementerian Agama maupun kurikulum dari Kementerian Pendidikan Nasional. Madrasah al-Anwar Pondok Pesantren al-Anwar Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat 11 mata pelajaran umum, yaitu PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA Fisika, IPA Biologi, IPS Ekonomi, IPS Sejarah, IPS Geografi, Bahasa Inggris, Kertangkese, dan Penjaskes, dan 5 mata pelajaran agama Islam yaitu Fiqih, Akidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam, Qurʻan Hadits, dan Bahasa Arab. Kurikulum muatan lokal yang diajarkan adalah bahasa Jawa, pembelajaran kitab kuning dan baca tulis al-Qurʻan.<sup>85</sup>

Mata pelajaran Bahasa daerah (Bahasa Jawa) dikembangkan atau diajarkan

<sup>84</sup> Subki, *Integrasi ...* h. 90-123

<sup>85</sup> Subki, *Integrasi ...* h. 90-123



karena madrasah ini berlokasi di daerah Jawa. Peserta didik perlu dibekali dengan alat komunikasi dan tata cara kebudayaan Jawa sebagai bekal dalam melakukan interaksi dengan masyarakat di sekitarnya dan juga untuk melestarikan bahasa dan kebudayaan tersebut. Selain itu pengembangan materi di madrasah al-Anwar, berhasil atau tidaknya didasarkan antara lain bergantung pada mutu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi tiga hal, yaitu: (a) merencanakan pembelajaran; (b) melaksanakan pembelajaran; dan (c) mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Keberhasilan pembelajaran di pesantren dapat terwujud jika ditentukan oleh kualitas pengelolaannya.<sup>86</sup>

Jika dikaitkan dengan karakteristik isi atau konten kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Keagamaan berikut ini, dipahami bahwa pada prinsipnya yang membedakan antara isi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Reguler dan tidak berasrama dengan Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pondok Pesantren adalah terletak pada : a) Pengasramaan santri; b) pengajaran kitab kuning; c) adanya kiai dan murabbi serta d) model pembelajaran yang menggunakan sorogan dan penekanan pada hafalan.

Berikut contoh isi kurikulum Madrasah Aliyah (MA) reguler yang pendidikan keagamanya lebih dekat dengan Madrasah Aliyah (MA) yang dikelola dengan sistem pesantren.

---

<sup>86</sup> Subki, *Integrasi ...* h. 90-123

Tabel 2  
Struktur Kurikulum 201  
Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN	ALOKASI WAKTU		
	PER MINGGU		
	X	XI	XII
<b>Kelompok A (Wajib)</b>			
1. Pendidikan Agama Islam			
a. Al-Qur'an Hadis	2	2	2
b. Akidah Akhlak	2	2	2
c. Fiqih	2	2	2
d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Arab	4	2	2
5. Matematika	4	4	4
6. Sejarah Indonesia	2	2	2
7. Bahasa Inggris	2	2	2
<b>Kelompok B (Wajib)</b>			
1. Seni Budaya	2	2	2
2. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	3	3	3
3. Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
<b>Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>31</b>
<b>Kelompok C (Peminatan)</b>			
Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan			
1 Tafsir - Ilmu Tafsir	2	3	3
2 Hadis - Ilmu Hadis	2	3	3
3 Fiqih - Ushul Fiqih	2	3	3
4 Ilmu Kalam	2	2	2
5 Akhlak	2	2	2
6 Bahasa Arab	2	3	3
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman			
Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat	6	4	4
<b>Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

<b>Ditempuh per Minggu</b>			
----------------------------	--	--	--

Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat Madrasah Aliyah antara lain Pramuka (Wajib), Palang Merah Remaja (PMR), Rohani Islam (ROHIS), Olah Raga, Seni Islami, Karya Ilmiah Remaja, dan lain sebagainya.

Kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan dalam rangka mendukung pembentukan karakter islami dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkrit. Dengan demikian kegiatan ekstra kurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler.

Jumlah alokasi waktu jam pembelajaran ekstrakurikuler setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun pembelajaran.

1. Beban belajar di /Madrasah Aliyah dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah 51 jam pembelajaran. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah 51 jam pembelajaran. Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit.
2. Beban belajar di Kelas X, XI, dan XII dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
3. Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
4. Beban belajar di kelas XII pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
5. Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
6. Setiap satuan pendidikan boleh menambah jam belajar per minggu berdasarkan pertimbangan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting.

### **C. KARATERISTIK PROSES PEMBELAJARAN KURIKULUM MADARASH BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagai tindak lanjut dari makna pendidikan di atas, maka salah satu yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah standar proses pendidikan melalui peraturan menteri pendidikan Nasional. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.

Proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah (MA) Non Pesantren dengan Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan itu terlihat pada waktu dan metode pembelajaran yang

diterapkan masing masing.

Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Moder Ihya Ulumuddin misalnya, kegiatan belajar mengajar di Pondok pesantren ini pada intinya menganut sistem madrasah dan pesantren. Sistem madrasah adalah sistem pembelajaran klassikal dengan menggunakan kelas sebagai tempat pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk lembaga formal seperti MTS dan MA. Sementara sistem pesantren adalah dengan sistem *Halaqah* yaitu para santri berkumpul dengan membentuk lingkaran melingkari ustadznya untuk menerima materi yang disajikan dalam bentuk pengajian<sup>87</sup>

Pondok Pesantren Sabilarrasyad Jenis pendidikan yang dikelola pondok ini di samping madrasah diniyah juga pendidikan formal madrasah Tsanawiyah dan madrasah Aliyah. Di samping belajar di pendidikan formal juga belajar pada waktu tertentu seperti belajar di musollah dan belajar pada waktu malam. Kemudian ada juga belajar mandiri yang diberikan oleh ustadz dan di kerjakan di asrama masing-masing., Kemudian pengawasan tetap berjalan atau berlangsung dalam 24 jam. Untuk Pendidikan formal evaluasi tetap mengacu pada Departemen Agama (DEPAG) sementara bidang kurikulum pesantren mengacu pada tingkat pencapaian standar kemampuan yang harus dimiliki santri melalui ujian baik lisan maupun tulisan.

Sementara proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah (MA) pesantren ini adalah *Pertama*, metode klassikal yang pelaksanaannya di lembaga pendidikan formal (madrasah) pada pagi hari, *kedua*, metode *Halaqah* yang pelaksanaannya pada saat pengajian atau pelajaran ekstra kurikuler keagammaan.

Berdasarkan data yang terungkap di atas maka dapat dikemukakan karakteristik kegiatan Belajar mengajar Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren di Kota Samarinda adalah sebagai berikut *Pertama*. Semua pondok pesantren memiliki jadwal kegiatan santri yang tersusun rapi mulai dari kegiatan pengajian,

---

<sup>87</sup> Hawib

wirid, olah raga, ibadah, istirahat, waktu tidur dan kegiatan formal madrasah. *Kedua*, semua Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di luar jam formal pagi dengan metode *halaqah* yang berarti belajar bersama-sama dalam bentuk lingkaran atau yang lainnya untuk mempelajari masalah atau kitab tertentu yang dibimbing oleh ustadz atau kiai.

Pada prinsipnya, seluruh Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia menggunakan model mengajar dengan empat penekanan yaitu model mengajar personal, model mengajar sosial, model mengajar pemrosesan informasi dan model mengajar behavioristik. Secara khusus, Madrasah Aliyah (MA) Berbasis pesantren memiliki karakter proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran perorangan (individual), metode kelompok, metode ceramah variasi, metode tanya jawab, metode simulasi, metode demonstrasi, metode kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode *role playing*, metode wetonan metode sorogan dan sistem takhasus.<sup>88</sup>

Secara prinsip, Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren menggunakan prinsip pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab sebagai berikut: a) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu; b) dari pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; c) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; d) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; e) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu (integral); f) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; g) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; h) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hard skills*) dengan keterampilan mental (*soft skills*); i) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; j) pembelajaran yang menerapkan

---

<sup>88</sup> Subki, *Integrasi ...* h. 90-123

nilai-nilai dan prinsip-prinsip dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*); k) pembelajaran yang berlangsung di rumah (in formal), di sekolah (formal), dan di masyarakat (non formal); l) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas tempat pembelajaran. m) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan n) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.<sup>89</sup>

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Ketiga ranah tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap meliputi akidah dan akhlak. Akidah diperoleh melalui aktivitas meyakini dan menghayati, akhlak diperoleh melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses.

Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*). Adapun rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 3  
Proses Pembelajaran Madrasah Aliyah (MA)

<b>Sikap</b>	<b>Pengetahuan</b>	<b>Keterampilan</b>
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji
		Mencipta

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di MI disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu di MTs disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di MTs disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di MA secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan.

Secara umum pendekatan belajar dipilih berbasis teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.



Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan penguasaan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yakni berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

## 1. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Unsur silabus paling sedikit memuat:

- a. identitas mata pelajaran menurut karakteristik mata pelajaran sesuai tingkatan,
- b. identitas madrasah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam kompetensi dasar yang meliputi akidah, akhlak, pengetahuan konsep dan keterampilan (psikomotorik). Kompetensi tersebut harus dipelajari peserta didik pada jenjang madrasah, kelas dan setiap mata pelajaran.
- d. kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang meliputi akidah, akhlak, pengetahuan konsep dan keterampilan (psikomotorik) yang terkait muatan atau mata pelajaran;
- e. tema (khusus MI)
- f. materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- g. pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang diharapkan;
- h. penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik melalui penilaian proses dan hasil belajar

- i. alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- j. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

## 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) terdiri atas:

- a. identitas madrasah yaitu nama satuan pendidikan
- b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;
- c. kelas/semester;
- d. materi pokok;
- e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;
- f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- g. kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;
- h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
- i. metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai;

- j. media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran;
- k. sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;
- l. Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup; dan
- m. penilaian hasil pembelajaran.

### **Pelaksanaan Pembelajaran**

#### **1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

- a. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran, a) Tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI): 35 menit, b) Tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs): 40 menit, c) Tingkat Madrasah Aliyah (MA): 45 menit
- b. Buku Teks Pelajaran, digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
- c. Pengelolaan Kelas, dalam setiap proses pembelajaran, pendidik melakukan pengelolaan kelas dengan mengacu pada standar sebagai berikut.
  - 1) Pendidik menyesuaikan bentuk pengaturan tempat duduk peserta didik sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran.
  - 2) Menyesuaikan volume dan intonasi suara pendidik dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.
  - 3) Pendidik wajib menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti, santun, lugas dan mudah dimengerti oleh peserta didik.
  - 4) Pendidik menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik dengan beragam latar belakang.
  - 5) Pendidik senantiasa menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
  - 6) Pendidik memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
  - 7) Pendidik mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat secara berani, terbuka, cerdas dan santun.
  - 8) Pendidik berpenampilan dan berpakaian sopan, bersih, rapi dan bercorak islami
  - 9) Pada tiap awal semester, pendidik harus menjelaskan kepada peserta didik silabus mata pelajaran secara rinci dan mendalam sebagai panduan belajar peserta didik.
  - 10) Secara konsisten, pendidik senantiasa memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.

#### **2. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan

penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan

Setiap melaksanakan kegiatan pendahuluan, pendidik selalu melaksanakan kegiatan:

- 1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- 2) memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional;
- 3) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;
- 4) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan
- 5) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus.

b. Kegiatan Inti Pembelajaran

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.

1) Sikap

Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas tersebut.

## 2) Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik, tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

## 3) Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik dan subtopik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus belajar berbasis penyingkapan ataupun penelitian (*discovery/ inquiry learning*) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*).

### c. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi: 1) seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung; 2)

memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran; 3) melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok; dan 4) menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

#### **D. KARAKTERISTIK EVALUASI KURIKULUM MADARASH BERBASIS PESANTREN DI INDONESIA.**

Beberapa model evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut; *Pertama*, model *Black Box Tyler*. Model ini dibangun atas dua dasar yaitu; a) evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku peserta didik; dan b) evaluasi harus pada tingkah laku awal peserta didik sebelum suatu pelaksanaan kurikulum serta pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum tersebut. Kedua dasar ini pada dasarnya berhubungan dengan dimensi hasil belajar. Menurut model ini, evaluator dapat menentukan jenis tingkah laku yang harus diperlihatkan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Evaluator harus mengembangkan kisi-kisi tujuan yang akan dievaluasi dalam dua dimensi yaitu dimensi tingkah laku dan dimensi materi. Pekerjaan evaluasi yang dilakukan oleh Braithwaite dan Koop (1982) merupakan contoh penerapan model ini.<sup>90</sup>

*Kedua*, model *Educational System Evaluation*. Ditinjau dari hakekat dan ruang lingkup evaluasi, konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekankannya peranan kriteria (absolut maupun relatif) dalam proses evaluasi kurikulum sangat penting artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria kita tidak akan dapat menghasiikan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan (*discrepancy*), padahal informasi semacam inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi.

---

<sup>90</sup> Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008) h. 188-189.

Sehubungan dengan ruang lingkup evaluasi, konsep ini mengemukakan perlunya evaluasi itu dilakukan terhadap berbagai dimensi program, tidak hanya hasil yang dicapai, tapi juga input dan proses yang dilakukan tahap demi tahap. Ini penting sekali agar penyempurnaan kurikulum dapat dilakukan pada setiap tahap sehingga kelemahan yang masih terlihat pada suatu tahap tertentu tidak sampai terbawa ke tahap berikutnya. konsep *educational system evaluation* ini relevan dengan peranan evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalam konsep-konsep yang terdahulu.

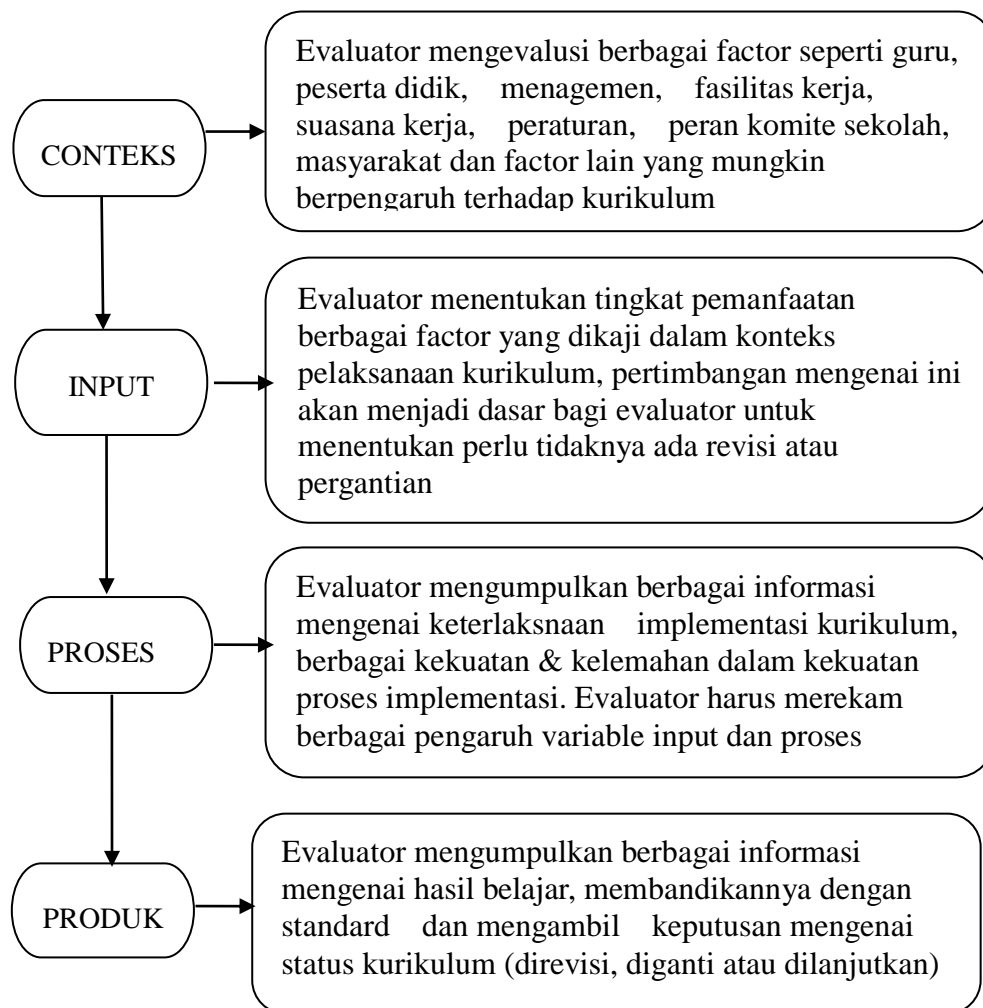
Ada empat hal yang terkait dengan model ini yaitu; a) evaluasi ditujukan kepada berbagai dimensi dari system yang sedang dikembangkan, tidak hanya dimensi hasilnya saja; b) Proses evaluasi itu mencakup perbandingan antara performance dengan kriteria yang sifatnya mutlak atau relative; c) evaluasi tidak hanya berakhir pada dengan sebuah diskripsi mengenai keadaan system tetapi menuntut adanya *judgment* sebagai kesimpulan dari evaluasi; d) hasil penilaian digunakan sebagai bahan atau input bagi pengambilan keputusan dalam rangka penyempurnaan system maupun penyimpulan mengenai kebaikan system yang bersangkutan secara keseluruhan.<sup>91</sup>

**Ketiga**, model CIPP yang lebih dikenal dengan nama *context, input, process* dan *product*. Model ini dikemukakan oleh Stufflebean dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul “*educational evaluation and decision making*”. *Context, input, process* dan *product* merupakan komponen utama dari model ini, karena ada empat hal yang menjadi sasaran yang akan dievaluasi yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk. Gambar di bawah ini akan memperlihatkan bagaimana model evaluasi CIPP ini menekankan pada empat hal utama yang menjadi sasaran dari evaluator kurikulum.

---

<sup>91</sup> Ibrahim dan Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2009), h. 245.

Gambar 2  
Model Evaluasi Kurikulum CIPP<sup>92</sup>



*Keempat*, Model evaluasi kurikulum yang menekankan pada tujuan. Contoh model ini di antaranya adalah evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diterapkan di Indonesia. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), aspek merit atau keunggulan intrinsik berang kali telah terpenuhi dengan mengadopsi berbagai kriteria yang telah diterapkan oleh daerah daerah lain

<sup>92</sup> Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*....h. 215



atau pemerintah pusat, sehingga kurikulum yang dikembangkan tersebut tidak sepenuhnya memperhatikan karakteristik daerah dimana kurikulum itu diberlakukan. Oleh karena itu, meskipun aspek merit (aspek *intrinsic*) dari sebuah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah terpenuhi, tetapi aspek worth (aspek *extrinsic*) atau dampak dari kurikulum tersebut perlu dipertanyakan. Apakah ada dampak baru yang lebih baik dibandingkan dengan kurikulum lama terutama bagi guru, kepala sekolah, peserta didik, masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi sasaran dari evaluasi kurikulum yang didefinisikan oleh Guba dan Lingkolin.<sup>93</sup>

Model-model yang dikembangkan oleh para ahli evaluasi kurikulum memiliki keterkaitan dengan model-model kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli pengembang kurikulum. Keterkaitan kedua hal ini menarik untuk dikaji, mengingat model-model evaluasi kurikulum banyak yang dikembangkan mengikuti langkah-langkah pengembangan kurikulum (*curriculum development*). Ada model evaluasi yang mencakup keseluruhan proses pengembangan kurikulum tetapi ada juga yang hanya memiliki focus khusus pada satu kegiatan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, bisa jadi hanya menekankan pada konstruksi kurikulum (*curriculum construction*), implementasi kurikulum (*curriculum implementation*), dan dimensi kurikulum sebagai hasil.

Oleh karena itu, peran model kurikulum menjadi penting dalam pelaksanaan sebuah evaluasi kurikulum. Di antara peran model kurikulum dalam pekerjaan evaluasi kurikulum adalah;

*Pertama*, menjadikan landasan atau pijakan dalam melakukan evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi, seorang evaluator terlebih dahulu harus menentukan landasan atau pijakan berpikir yang dipakai. Dengan kata lain, dia harus menentukan kriteria apa yang digunakan dalam kegiatan evaluasinya. Beberapa

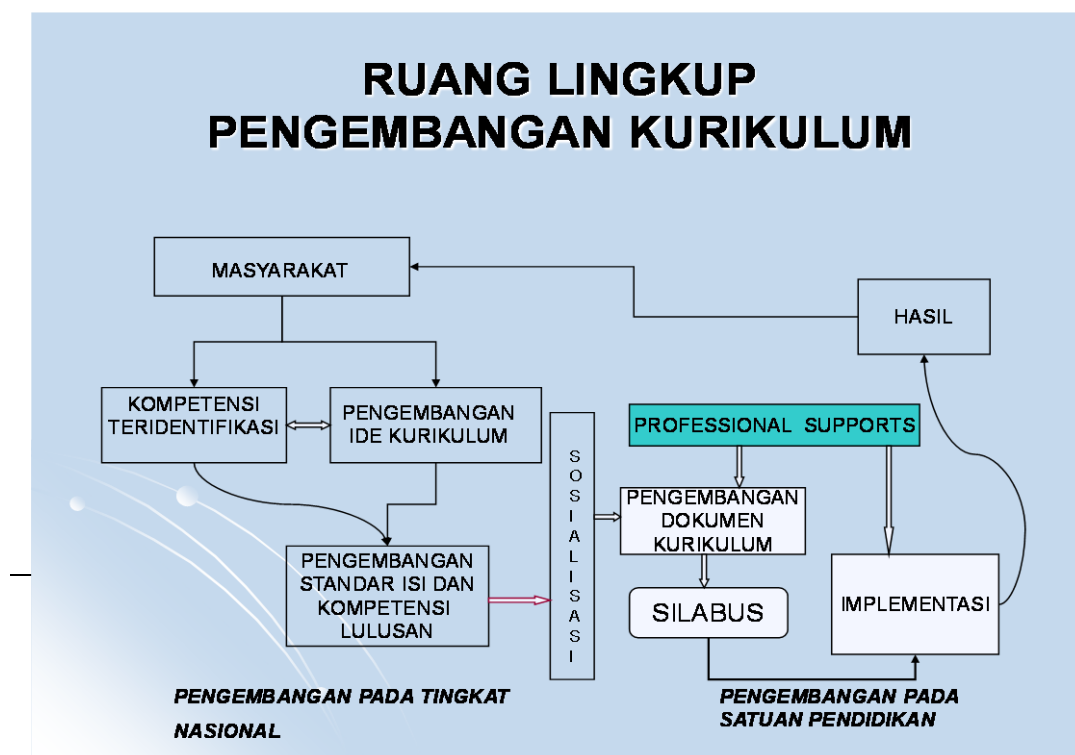
---

<sup>93</sup> Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...* h. 39-40.

pendekatan kriteria telah dikemukakan oleh ahli evaluasi seperti pendekatan pre-ordinate, pendekatan kriteria mutual adaptive, pendekatan kriteria fidelity dan pendekatan kriteria dari lapangan. Dengan penetapan pendekatan kriteria tersebut, maka evaluator kurikulum akan sangat terbantu dalam melaksanakan evaluasi secara sistematis.

*Kedua* model kurikulum dapat menjadi pembatas ruang lingkup sebuah evaluasi yang akan dilakukan oleh evaluator kurikulum. Ruang lingkup evaluasi kurikulum sangat luas. Dengan katan lain, objek yang menjadi tujuan evaluasi sangat beragam dan luas. Menurut Hamid Hasan dalam membahas KTSP, bahwa ruang lingkup menyeluruh evaluasi kurikulum adalah 1) pengembangan ide kurikulum di tingkat nasional; 2) pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan dan 3) pelaksanaan kurikulum. Seorang evaluator bisa saja membatasi evaluasi yang dilakukan hanya pada tingkat satuan pendidikan saja, atau bisa juga hanya implementasi atau pengembangan silabus. Gambar di bawah ini memperlihatkan ruang lingkup pengembangan kurikulum menurut Hamid Hasan sebagai berikut :

Gambar 2  
Ruang Lingkup Pengembangan Kurikulum<sup>94</sup>



*Ketiga* menjadi alat untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah evaluasi yang dilakukan. Berbagai komponen yang terdapat dalam sebuah model dapat dijadikan dasar atau alat untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah evaluasi yang dilakukan. Jika seluruh komponen model terpenuhi dalam melakukan evaluasi, maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum telah berhasil dilakukan dengan baik.

Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan di Indonesia kaitannya dengan penilaian hasil belajar, baik yang menekankan pada isi maupun yang menekankan pada proses. Kebijakan yang menekankan pada isi atau penguasaan materi oleh peserta dapat terlihat misalnya dengan adanya penekanan pada pencapaian kompetensi menjadi ukuran kelulusan siswa di madrasah dengan diberlakukannya Standar kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran (SKL-MP), Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP). Pada level berikutnya, muncul istilah Ketuntasan belajar yang dikenal dengan Kreteria Ketuntasan Minimal dan sistem penilaian.

**Berdasarkan** Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), maka ditetapkan adanya tiga Standar Kompetensi Lulusan yaitu; a) Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP); b) Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SKL-MP) dan Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran (SKL-MP).

Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni: a) Pendidikan Dasar, yang meliputi SD/MI/SDLB/Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; b) Pendidikan Menengah yang terdiri atas SMA/MA/SMALB/Paket C bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; c) Pendidikan Menengah Kejuruan yang terdiri atas SMK/MAK bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya

Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMP) dikembangkan berdasarkan tujuan dan cakupan muatan dan/atau kegiatan setiap kelompok mata pelajaran, yakni: a) Kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. b) Kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani. c) Kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan untuk mengembangkan logika, kemampuan berpikir dan analisis peserta didik.

Pada level berikutnya dikenal dengan istilah Ketuntasan Minimal Belajar (KMB). Ketuntasan Minimal Belajar (KMB) peserta didik ditetapkan oleh musyawarah guru bidang studi berdasarkan acuan yang ditetapkan oleh SD/MI/SDLB, SMP/MTs./SMPLB atau SMA/SMK/MA masing-masing. Penetapan Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) atau Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada tiap mata pelajaran berbeda-beda setelah memperhitungkan tingkat kompleksitas, daya dukung dan intake atau kemampuan rata-rata peserta

didik.<sup>95</sup>

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar kompetensi yang telah ditetapkan melalui kebijakan, maka diperlukan pula sebuah sistem penilaian. Sistem penilaian merupakan suatu prosedur dan kriteria-kriteria penilaian yang diberlakukan di satuan pendidikan. Sistem penilaian ini berfungsi untuk mengendalikan proses dan hasil belajar peserta didik dengan mengacu pada : standar penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah, mengacu pada Ketetapan Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal (KKBM), dan mengacu pada kriteria kenaikan kelas. Sebagai contoh berikut ini akan dikemukakan sistem penilain di madrasah sebagai berikut : a) penilaian dilakukan dengan mengacu pada kriteria hasil penilaian proses, ujian blok dan ujian madrasah; b) penentuan kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran; c) siswa dinyatakan tidak naik kelas, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, lebih dari tiga mata pelajaran; d) siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal lebih dari tiga mata pelajaran yang bukan mata pelajaran ciri khas program studi; e) siswa yang tidak naik kelas diwajibkan mengulang, yaitu mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya; f) laporan hasil belajar siswa disampaikan kepada siswa dan orang tua/wali siswa tiap akhir semester<sup>96</sup>.

Kebijakan lain yang terkait dengan penilaian hasil belajar adalah kriteria kelulusan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Seorang siswa yang dinyatakan lulus adalah apabila siswa tersebut memenuhi dua aspek yaitu;

1. Aspek akademik. Aspek akademik ini meliputi; a) memiliki nilai rapor yang lengkap untuk kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga); b) telah memiliki nilai ujian

---

<sup>95</sup>Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*. h. 1-32.

<sup>96</sup>Muhaimin dan kawan kawan, *Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), h. 366-368.

untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan; c) tidak terdapat nilai  $\leq 4,25$  baik untuk ujian tulis maupun ujian praktek seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah tidak boleh  $\leq 4,50$ .

2. Aspek Non-Akademik yang meliputi: a) nilai rata-rata kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian) pada semester II kelas III minimal baik. b) Kehadiran di sekolah pada semester I dan II kelas III minimal 90 % dari jumlah hari efektif.<sup>97</sup>

Berdasarkan gambaran yang berkaitan dengan kebijakan penilaian hasil belajar di madrasah tersebut, penulis dapat memahami bahwa pada prinsipnya Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP), Standar Kompetensi Kelompok Mata Pelajaran (SK-KMK), Standar Kompetensi Mata Pelajaran (SK-MP), Kreteria Kelulusan Belajar Minimal (KKBM), Panilian Acuan Patokan (PAP), validitas dan reliabelitas dan kreteria kelulusan Ujian Nasional serta Ujian Sekolah menghendaki peserta didik agar bekerja keras untuk menguasai bahan ajar sebanyak-banyaknya seperti yang telah ditentukan melalui standar kompetensi, kompetensi dasar dan Indikator Pencaian Hasil belajar. Dengan demikian, penulis, memahami bahwa kebijakan penilaian tersebut, masih sangat kental dengan konsep dan nuansa perenialisme sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya, tentu dengan tidak menafikan adanya model penilaian hasil belajar yang lain seperti penilain yang terpusat pada proses dan lain-lain.

Secara konsep dan kebijakan, sebenarnya konsep penilaian hasil belajar perenialisme telah diterapkan di madrasah selama ini, dan memang saat ini telah menjadi bagian dari penilaian hasil belajar di madrasah. Hal ini terlihat pada penekanan pada aspek intelektual dibandingkan aspek yang lain, penekanan pada isi materi yang harus dikuasai, dan indikator kesuksesan siswa terletak pada penguasaan materi, nilai, fakta dan keterampilan. Penekanan ini dilakukan agar peserta didik menguasai pengetahuan, fakta dan keterampilan (bersifat akademik) yang diajarkan oleh guru agar peserta didik menguasai materi dan memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

---

<sup>97</sup> Muhaimin dan kawan kawan, *Pengembangan ....h.* 370-371

penekanan ini, maka dalam pelaksanaannya peserta didik dituntut untuk bersungguh-sungguh dan bekerja keras untuk menguasai bahan pelajaran dan keterampilan yang telah ditentukan oleh guru sebagai pentransfer ilmu.

Dalam kasus madrasah misalnya, siswa harus bisa menghafal, menterjemahkan dan mengetahui kandungan ayat-ayat Alquran dengan baik sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik. Siswa juga harus bisa menghafal, menterjemahkan dan memahami kandungan hadis-hadis Rasulullah saw. yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang telah menjadi rujukan utama dari satu generasi ke generasi berikutnya dengan baik dan benar. Demikian pula, siswa harus bisa menguasai bahan atau isi bahan pelajaran yang lain seperti Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqh dan lain-lain. Oleh karena itu, siswa yang tidak mampu mencapai kriteria ketercapaian minimal yang telah ditetapkan oleh guru, maka dia dianggap tidak berhasil dalam pembelajaran.

Dengan demikian, persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan anak yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata yang tidak dapat memenuhi kriteria ketercapaian nilai minimal, tetapi ia sesungguhnya telah mengamalkan kandungan ayat dan hadis yang telah dipelajarinya.? Sebaliknya bagaimana dengan anak yang secara intelektual sangat cerdas dan terampil dengan menghafal materi, menguasai kandungan ayat dan hadis tetapi secara emosional dan sikap justru rusak atau sangat buruk. Dengan kata lain, ia justru tidak mengamalkan ayat dan hadis yang telah ia kuasai. Oleh karena itu, diperlukan bentuk penilain yang dapat mengakomodasi keragaman dan karakteristik peserta didik. Selain itu, Penilaian hasil belajar perenialisme di madrasah terkesan sangat menekankan pada hasil, bukan pada proses. Dengan penekanan ini, persoalannya adalah mungkinkah evaluasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat dapat memberikan gambaran yang benar tentang perkembangan dan penguasaan siswa. Dengan demikian, penilaian di madrasah hendaknya menekankan pada keduanya yaitu penilaian berbasis hasil dan penilaian berbasis proses.

Beberapa persoalan lain yang muncul ketika penilaian hasil belajar perenialisme secara mutlak diimplementasikan tanpa didukung oleh model penilaian lainnya adalah :

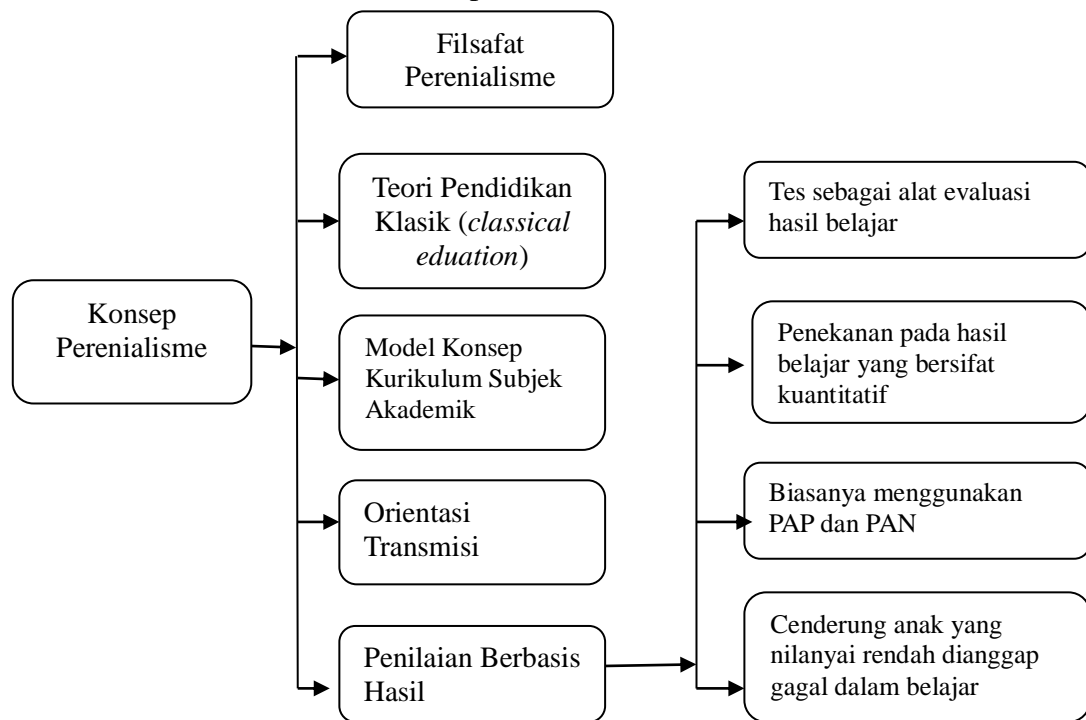
1. Disiplin ilmu atau mata pelajaran yang sangat banyak dan terpisah-pisah di madrasah tentu penguasaan peserta didik menjadi dangkal dan atau tidak mendalam. Oleh karena itu, untuk penguasaan yang cukup mendalam tentu dibutuhkan materi yang sedikit. Sementara mempelajari disiplin ilmu yang sedikit, dampaknya tentu penguasaan siswa terbatas dan sukar menerapkan dalam kehidupan masyarakat yang luas serta materi yang akan diajarkan bersifat universal.
2. Mengingat posisi guru adalah model, penranfer ilmu, pengatur, aktif, bertanggungjawab, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi, metode, dan evaluasi serta bertanggungjawab terhadap seluruh wilayah pembelajaran, maka profesionalitas guru merupakan harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar. Oleh karena itu, persoalan yang muncul kemudian adalah tidak semua guru dapat memiliki kreteria yang diinginkan oleh konsep perenialisme. Dengan demikian, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga harus bisa mengembangkan kurikulum yang memungkinkan para calon guru di madrasah untuk menjadi guru yang profesional. c) Dalam konteks madrasah, meskipun penilaian formatif dan sumatif dianggap mampu mengukur kompetensi siswa, lagi-lagi keduanya dalam aplikasinya masih berpatokan pada hasil dengan diberlakukannya Kreteria Standar Minimal dan kebijakan-kebijakan lainnya. Oleh karena itu, penilaian yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan anak perlu dipertimbangkan untuk dilakukan. Penilaian Acuan Etik (PAE) adalah salah satu solusinya. Dengan Penilaian Acuan Etik (PAE) ini, tentu keberhasilan seorang peserta didik tidak semata-mata karena nilainya tinggi, tetapi kelulusan seorang siswa tentu diukur dari berbagai aspek, tentu termasuk aspek perilaku dan pengamalan dia terhadap apa yang ia



pelajari.

Untuk melihat bagaimana alur pemikiran kaum perenilis dalam pendidikan, sekaligus alur pembahasan makalah terutama yang terkait dengan penilaian hasil belajarnya, maka penulis menggambarkan secara sederhana pada gambar di bawah ini;

Gambar 2  
Peta Konsep Pemikiran Perenialis



Salah satu contoh Evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan di MA Futuhiyah 1 ada dua bentuk yaitu tes dan non tes. Evaluasi dalam bentuk tes digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang telah disampaikan oleh seluruh guru dalam proses pembelajaran. Sedangkan non tes biasanya berupa pengamatan terhadap sikap siswa setelah menerima pelajaran tertentu. Dalam bentuk tes, ada dua jenis tes yang diterapkan di MA Futuhiyyah 1, yaitu tes sumatif dan tes

formatif. Tes sumatif dilaksanakan pada tiap akhir semester, sedangkan tes formatif dilaksanakan dalam bentuk ulangan harian, baik secara tertulis maupun lisan. Muchammad Ali selaku Waka Kurikulum MA Futuhiyyah 1 menambahkan bahwa selain dalam bentuk tes dan non tes, evaluasi pembelajaran di MA Futuhiyyah 1 juga menggunakan sistem ujian *takhassus*. Adapun sasaran ujian *takhassus* ini adalah kemampuan siswa dalam membaca dan memahami kitab-kitab kuning. Hal ini tentunya untuk mewujudkan standar lulusan MA Futuhiyyah 1 minimal sudah bisa baca kitab kuning.<sup>98</sup>

Sementara model penilaian kurikulum 2013 di madrasah memiliki model penilaian tersendiri sesuai dengan karakteristik tujuan, isi dan proses pembelajaran yang diterapkan. Model penilaian ini juga diterapkan di Madrasah Aliyah (MA) non pesantren maupun Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren. Penilaian proses pembelajaran kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Tahun 2013 menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, perilaku peserta didik dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran.

Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan program perbaikan (*remedial*), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi. Sedangkan penilaian yang mengacu pada hasil pembelajaran dilakukan setiap selesai pembelajaran satu kompetensi dasar.

---

<sup>98</sup> Futuhiyah

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian dalam pengertian ini mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian madrasah, yang diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
2. Penilaian diri (*self assessment*) merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan atau kelompok di dalam (*in class*) atau di luar kelas (*out class*) khususnya pada perubahan sikap/perilaku dan keterampilan peserta didik.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih sesuai perencanaan yang dibuat antara pendidik dan peserta didik.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 –

- 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh kompetensi dasar pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester yang sudah berjalan.
  8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
  9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
  10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
  11. Ujian Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

#### **E. PROBLEMATIKA PENGELOLALAN MADRASAH ALIYAH DI INDONESIA**

Menurut Nurahid dengan mengutip beberapa tulisan seperti pendapat Tilaar, Handayani, Mukhtar Buchari dan Abdul Aziz, bahwa problem pendidikan yang mempengaruhi pendidikan nasional dewasa ini adalah Sumberdaya guru yang belum

profesional, kurangnya tenaga guru yang profesional. Problem operasional, yaitu profesionalisme guru masih rendah, dan Faktor yang menghambat perkembangan madrasah selama ini adalah keterbatasan tenaga guru, ketidak jelasan status guru dan ketidaklayakan kualifikasi guru.<sup>99</sup>

Sedangkan dari temuan data yang peroleh oleh Nurahid melalui penelitiannya adalah dia mendapatkan dari Madrasah Aliyah (MA) menyebutkan bahwa yang melatar belakang problem institusi Madrasah Aliyah Umum adalah kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan, di samping itu juga masih kurangnya tenaga guru.

Dari itu maka menurutnya dapat mengakibatkan adanya guru yang mengajar salah kamar atau di luar vaknya, ini kalau dikonfirmasi dengan data nasional juga sinkron, yaitu masih banyak guru yang mengajar salah kamar atau di luar vaknya. Oleh karena itu rekonstruksi yang perlu dilakukan menurutnya adalah melakukan solusi, yaitu perlu adanya pembinaan melalui Musyawarah Guru Bidang Studi (MGMP) dan peningkatan kualitas, melalui studi lanjut. Dalam hal pembinaan ini, juga perlu adanya kesamaan pandangan dan langkah antara dua bersaudara (Depag dan Diknas) kepada para guru Mafakib yang ada di Madrasah Aliyah dan guru agama yang ada di Sekolah Menengah Atas, supaya saling bersinergi agar kualitas guru dapat ditingkatkan, yang pada muaranya pada peningkatan mutu lulusan.<sup>100</sup>

Di sisi lain problem yang terjadi di lapangan disebabkan karena masih banyak sarana-prasarana pembelajaran yang tidak layak, maka dengan tegas Arif Rahman berpendapat, bahwa titik lemahnya pendidikan itu disebabkan karena lemahnya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai

Sedangkan dari temuan data yang diperoleh Nurahid dapatkan menyebutkan,

---

<sup>99</sup> Nur Ahid, Problem Madrasah Aliyah dan Solusi Pemecahannya

<sup>100</sup> Nur Ahid, Problem Madrasah Aliyah dan Solusi Pemecahannya

jumlah ruang belajar Madrasah Aliyah (MA) masih sangat tinggi presentasinya yang mengalami kerusakan. Data hasil akreditasi Sekolah dan Madrasah se Kalimantan Timur lima tahun terakhir menunjukkan hal yang sama bahwa rata-rata Madrasah Aliyah (MA) se Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>101</sup> Dari uraian problem tersebut di atas maka menurut Nurahid dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang kurang kondusif. Oleh karena itu rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi, yaitu perlu adanya pembangunan gedung, sarana-prasarana pembelajaran di Madrasah Aliyah yang memadai, sehingga proses pembelajaran lebih kondusif, murid betah di dalam kelas dan bisa konsentrasi dalam belajar yang pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>102</sup>

Selanjutnya pada problem dana anggaran pendidikan, Yahya Umar berpendapat, sudah sangat lama pendidikan agama diperlakukan sebagai lembaga kelas dua dari pendidikan umum. Alokasi anggarannya pun disebut-sebut hanya atas belas kasihan pendidikan umum yang ditahbiskan oleh negara sebagai lembaga kelas satu dengan berbagai keistimewaan menyertainya.<sup>103</sup> Pendapat tersebut tepat kalau dikaitkan dengan temuan data yang peneliti dapatkan, yaitu tentang anggaran pendidikan tahun 2007 antara Diknas dengan Depag, 56 memang tidak sebanding dan tidak proporsional bila dihitung dari sisi jumlah lembaga dan siswa dengan prosentase anggaran pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada dua departemen tersebut. Sebab anggaran Diknas di samping memang banyak, semua dana yang ada, untuk keperluan pendidikan. Berbeda dengan Depag, anggarannya sudah kecil masih dibagi-bagi untuk keperluan selain pendidikan. Akibatnya di Depag, yang untuk khusus pendidikan tidak lebih dari 44 % pada tahun 2007 dari anggaran Departemen Agama keseluruhan. Maka berakibat fasilitas belajar dan

---

<sup>101</sup> Data Hasil Akreditasi SMA/MA/SMK BAP S-M Kalimantan Timur Tahun 2017

<sup>102</sup> Nur Ahid, Problem Madrasah Aliyah dan Solusi Pemecahannya

<sup>103</sup> Nur Ahid, Problem Madrasah Aliyah dan Solusi Pemecahannya

layanan pendidikan menjadi buruk. Oleh karena itu rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi, yaitu perlu adanya perhatian pemerintah terhadap anggaran pendidikan yang diberikan kepada Depag secara adil dan proporsional, di samping itu Depag juga mengalokasikan dana pendidikan lebih besar, agar bisa mengejar ketertinggalan dengan saudaranya, yaitu Diknas dan tidak selalu dianggap kelas dua. Selanjutnya pemerintah juga konsisten memenuhi kewajibannya melaksanakan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945, yaitu menganggarkan biaya pendidikan minimal 20 % dari total anggaran negara/daerah, sehingga kendala-kendala yang selalu menghambat kemajuan dunia pendidikan, terutama madrasah bisa teratasi.

Tidak salah, jika ada pendapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling sering dan senang mengganti dan merubah kurikulum, sehingga tidak salah juga ada orang mengatakan “setiap ganti menteri, ganti kurikulum”. Seringnya pergantian dan perubahan kurikulum, yang didasarkan atas kebijakan dan tidak didukung dengan sistem dan studi kelayakan, maka akan berakibat membingungkan para guru dan menimbulkan problem. Mochtar Buchori berpendapat bahwa, pendidikan di Indonesia mengalami problem fundamental, yaitu disebabkan karena pergantian pemimpin satu ke pemimpin yang lain selalu berubah, begitu pula tentang kebijakan pendidikan, tetapi hasil mutunya selalu di bawah negara tetangga yang sama-sama serumpun.<sup>57</sup> Sedang Tilar mengatakan bahwa problem pendidikan karena kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan siswa, jumlah mata pelajarannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat dan orientasinya tidak jelas. Temuan data yang peneliti dapatkan dari Moh Harisuddin,<sup>59</sup> bahwa sistem kurikulum sendiri itu menjadi problem, sehingga menyulitkan pihak pelaksana, terutama tataran guru ketika harus mengubah pola pembelajaran, terutama harus mempersiapkan administrasinya, sekarang ini harus ada RPP, harus ada silabus. Inilah yang membingungkan pihak pengelola terutama kepada para guru.

Suhudi dan Basuki Rakmat memberikan keterangan bahwa problem

kurikulum yang ada sekarang ini disebabkan jumlah mata pelajaran terlalu banyak, kurang spesifik, dan penjurusan mulai kelas dua. Dari data temuan problem kurikulum di Madrasah Aliyah dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu (1) sistem aturannya selalu berubah, (2) jumlah beban bidang studi (jam pelajaran) terlalu banyak, (3) materi pelajarannya kurang spesifik, dan (4) penjurusan mulai kelas 2 (XI). Dari beberapa problem kurikulum tersebut berakibat: 1) membingungkan para guru, karena seringnya ganti-ganti kurikulum dan format silabus. Format yang satu belum dipahami sepenuhnya, sudah ganti format yang lain, 2) beban siswa terlalu berat untuk menguasai seluruh pelajaran, 3) kurang memfokus dan penguasaan siswa setengah-setengah, dan 4) pendalaman ilmu bidang jurusan waktunya terbatas.

Dari pendapat teori dan kenyataan problem kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah setelah dianalisa maka rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi, yaitu: (1) kurikulum yang digunakan sifatnya fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi siswa dan lingkungan (daerah) yang ada, (2) pengurangan atau perampingan terhadap bidang studi atau materi pelajaran, sebab 19 bidang studi (47-55 jam) perminggu adalah suatu beban yang sangat berat, kalau dibandingkan dengan sekolah Menengah Atas yang hanya 15 bidang studi (39 jam) perminggu, (3) Materi jurusan sekurang-kurangnya 5-7 jam, sedangkan yang lain dikurangi dan ditambahkan ke materi jurusan, (4) penjurusan bisa dimulai sejak kelas X, supaya pendalaman dan pematangan ilmu jurusan bisa lebih Maksimal.

Salah satu faktor penting keberhasilan sebuah pendidikan adalah guru. Oleh karena itu diperlukan guru yang memiliki kompetensi profesional, pedagogik, etik dan sosial. Begitu pula di dalam memahami dan mengembangkan kurikulum yang digunakan, tetapi kenyataannya tidak seluruh guru MA bisa demikian, karena sumberdaya manusianya masih rendah dan bahkan masih banyak guru mengajar salah kamar, dan ini adalah sebuah problem. Tilar berpendapat, bahwa problem pendidikan di Indonesia adalah kualitas gurunya masih rendah dan salah pegang materi pelajaran



Mochtar Buchori juga berpendapat bahwa bagian dari problem pendidikan atau kurikulum adalah profesionalisme guru masih rendah, dan ini berakibat juga terhadap mutu lulusan. Sedangkan Handayani mengatakan, problemnya adalah kurangnya tenaga guru yang profesional. Temuan data yang peneliti dapatkan dari Suhudi sebagai berikut: problem faktor guru adalah masih rendahnya SDM dan bahkan ada sebagian guru mengajar salah kamar,<sup>65</sup> Moh Harisuddin<sup>66</sup> bahwa problem guru di samping masalah SDM yang pas-pasan juga ada enam guru (10 %) yang mengajar salah kamar (di luar vaknya).

Basuki Rahmat bahwa terdapat guru vak Pendidikan Agama Islam, tetapi mengajar kesenian. Data dari Madrasah Aliyah dapat dikatakan bahwa problem guru, yaitu: (1) sumberdaya manusianya masih rendah, dan (2) masih adanya guru mengajar salah kamar (mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya), sehingga berakibat: (1) guru tidak faham perkembangan kurikulum baru, kesulitan menyusun silabus, membuat RPP, metode mengajarnya kurang variatif, dan (2) guru kurang menguasai materi pelajaran, menjenuhkan, kurang menarik perhatian siswa dan tidak maksimal.

Dari pendapat teori dan kenyataan problem SDM guru yang ada di MA setelah dianalisa maka rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi, yaitu: (1) guru bisa melanjutkan ke Program Pascasarjana (S2) yang relevan dengan S1 dan keahliannya, dan (2) mengikut sertakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan guru-guru SMA yang serumpun dengan ilmunya dan membentuk *team teaching* bidang studi.

Faktor lain adalah faktor siswa. Faktor siswa ini juga menjadi problem tersendiri, seperti latar belakang pendidikan siswa banyak lulusan dari SMP, di samping itu *inputnya* rendah, anaknya memang bandel, malas, dan tidak memiliki *basic* agama yang baik. Tilar mengatakan: problem pendidikan di antaranya adalah disebabkan *inputnya* rendah dan menurunnya moral dan akhlaq peserta didik,

rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.<sup>104</sup>68 Berbeda dengan Arif Rahman, menurutnya keberhasilan pendidikan (kurikulum) hanya diukur ranah kognitif saja, sedangkan ranah afektif dan psikomotorik kurang mendapat perhatian. D<sup>105</sup>ata yang peneliti dapatkan dari Abu Aman<sup>70</sup> adalah: siswa yang diterima di MAN 3 Kediri 80 % lebih adalah tamatan dari SMP, *basic* pendidikan Islamnya sangat kurang, bahkan baca tulis al-Qur'a>n saja kesulitan. Moh. Harisuddin<sup>71</sup> berkomentar bahwa problem bagi siswa adalah *input*-nya rendah, sehingga kalau sudah seperti itu yang butuh pinter ternyata gurunya. Suhudi<sup>72</sup> dan Suparno<sup>73</sup> mengatakan: bahwa sulitnya siswa memahami seluruh beban materi pelajaran bidang studi itu disebabkan *inputnya* rendah. Taufiq Hidayat<sup>74</sup> mengatakan: bahwa kurang mampunya siswa menyerap seluruh materi pelajaran, baik pelajaran umum maupun pelajaran agama, itu disebabkan *input*-nya rendah, tidak memiliki *basic* pesantren atau madrasah.

Dari paparan data yang ada dapat dikatakan bahwa problem siswa yaitu: (1) banyak siswa yang masuk ke MA lulusan dari SMP, (2) *inputnya* rendah, dan (3) tidak memiliki *basic* pesantren atau madrasah. Dari problem tersebut berakibat: (1) siswa pada saat mengikuti pelajaran agama, merasa berat dan ketinggalan, (2) anak tidak mampu dan merasa berat mengikuti seluruh mata pelajaran, dan (3) siswa tidak menguasai materi pelajaran, terutama pelajaran agama.

Dari pendapat teori dan kenyataan problem siswa yang ada di Madrasah Aliyah (MA), maka rekonstruksi yang perlu dilakukan menurut peneliti adalah melakukan solusi, yaitu: (1) menambah mata pelajaran baca tulis al-Quran di sore hari bagi anak-anak yang masih nol, dan les bahasa Arab, (2) diadakan bina prestasi, baik pelajaran umum maupun agama, bagi anak-anak yang kemampuannya rendah

---

<sup>104</sup> H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformas*, 30-51 dan bandingkan H.A.R. Tilar, *Pendidikan, Kebudayaan*, 49-51.

<sup>105</sup> Arif Rahman, *Mengkaji Ulang*, 199-200.

atau menonjol. Bagi yang kemampuannya rendah agar bisa mengejar ketertinggalannya dan bagi yang menonjol, bisa termotivasi prestasinya dan dapat ditingkatkan, sehingga memperoleh prestasi tidak hanya di tingkat madrasah sendiri, tetapi bisa mencapai prestasi di tingkat lokal, regional dan bahkan nasional, (3) diadakan les materi agama atau dianjurkan sekolah Madrasah Diniyah dan bimbingan khusus, diikut sertakan kelompok belajar siswa dan musyawarah siswa

Perkembangan madrasah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari jumlah madrasah yang setiap tahun semakin bertambah. Banyaknya madrasah yang tersebar di seluruh pelosok negeri membantu pencapaian pemerataan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya, madrasah kerap menghadapi masalah. Persoalan klasik dari penyelenggaraan pendidikan di madrasah antara lain terkait dengan pengelolaan madrasah yang berada di bawah pembinaan dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah yang masih rendah.

*Pertama*, persoalan dualisme pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan madrasah berada di bawah dua kementerian yaitu Kemendiknas dan Kemenag. Pengelolaan ini seringkali menimbulkan kecemburuan terutama dari segi pendanaan, perhatian, bantuan, yang seringkali mendapat perlakuan yang berbeda. Anggaran pendidikan untuk madrasah yang diambil dari anggaran pendidikan langsung dikelola oleh Kemenag. Namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kucuran dana yang diberikan menjadi terbagi dan lebih kecil dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu kesejahteraan guru di madrasah juga cukup memprihatinkan. Siste dualisme pengelolaan pendidikan ini memang telah terjadi di Indonesia sejak lama, dan menjadi bentuk jalan kompromi politik kelompok kepentingan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus. Madrasah secara bersama dengan sekolah umum ikut memajukan pendidikan dan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan umum,

tetapi juga berbekal ilmu pengetahuan agama. Sudah sepatutnya mendapat perhatian ekstra dari dua kementerian ini. Kemenag dan Kemendikbud tentu saja harus mengabaikan ego sektoralnya dalam mengembangkan pendidikan. Karena madrasah pun menjadi bagian dalam Sisdiknas.<sup>106</sup>

*Kedua*, kesenjangan antara madrasah negeri dengan madrasah swasta. Ada perbedaan perlakuan yang diberikan untuk madrasah negeri dan swasta. Perbedaan perlakuan ini sangat dirasakan oleh madrasah swasta. Pemberian bantuan pendidikan untuk madrasah swasta selalu dinomor-duakan. Contohnya saja, dalam hal pemberian beasiswa baik untuk siswa maupun untuk guru. Sarana dan prasarana pun masih kurang memadai. Pembinaan sekolah atau madrasah swasta yang minim perhatian. Padahal jumlah madrasah negeri dan swasta sangat jauh sekali perbedaannya. Menurut data Kemenag tahun 2010-2011, secara nasional terdapat 22.468 sekolah jenjang MI, 14.757 MTs, dan 6.415 MA. Selain itu, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Kemenag tahun 2011, jika dilihat berdasarkan status lembaganya, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1. MA 758 (11,8) 5.657 (88,2). Jika jumlah tersebut dibagi lagi berdasarkan status lembaganya, maka didapatkan data sebagai berikut: Jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebanyak 758 (11,8%), sedangkan jumlah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebanyak 5.657 (88,2%). Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan madrasah di Indonesia adalah berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya melalui yayasan pendidikan yang mereka dirikan. Dalam hal ini, perhatian terhadap madrasah swasta perlu ditingkatkan. Dalam kasus ini ada dua pihak yang harus menjadi perhatian, pertama adalah bagaimana keseriusan dan usaha dari pihak yayasan sebagai penyelenggara madrasah swasta dalam melakukan manajemen yang baik sehingga baik *input*, proses, maupun *output* pendidikan di madrasah berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah pihak pemerintah baik Kemenag maupun Kemendiknas yang

---

<sup>106</sup>Faridah Alawiyah, **Pendidikan Madrasah Di Indonesia** (*Islamic School Education in Indonesia*) Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014

perlu memberikan perhatian khusus kepadamadrasah. Karena peserta didik madrasah swasta pun merupakan aset bangsa yang tidak boleh diabaikan.<sup>107</sup>

*Ketiga*, persoalan mutu madrasah. Seperti yang telah diungkapkan Supangat (2011:155) Meskipun madrasah telah berkontribusi bagi pencerdasan kehidupan bangsa, namun masih menghadapi berbagai kendala yang sulit dihindarinya<sup>108</sup> Menurut Amirullah<sup>109</sup> hambatan terbesar yang dihadapi madrasah adalah rendahnya kualitas proses pendidikan yang ada didalamnya. Hal ini terjadi karena aspek manajemen, aspek kurikulum dan aspek kualitas tenaga pendidiknya yang dinilai masih rendah. Pada umumnya madrasah masih dihadapkan pada beberapa kendala yang mempengaruhi mutu baik proses maupun hasil pendidikan, baik berkenaan dengan latar belakang siswa dan keluarganya, dukungan berbagai sumber pendidikan, kualifikasi dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Persoalan yang dihadapi madrasah terutama pada pencapaian mutu dipicu karena tidak terpenuhinya standar-standar tertentu, seperti infrastruktur, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, calon siswa, proses pembelajaran, dan manajemen kelembagaannya. Pendirian madrasah sering kurang mempertimbangkan pemenuhan aspek mutu baik standar pelayanan pendidikan maupun standar nasional pendidikan. Lebih banyaknya madrasah swasta dibandingkan dengan madrasah negeri seperti yang telah disebutkan di atas berdampak pada pencapaian mutu madrasah yang masih rendah.

Lebih banyaknya madrasah swasta yang berarti lebih banyak madrasah yang dikelola yayasan. Untuk yayasan yang memiliki dukungan dana dan infrastruktur yang memadai, maka madrasah tersebut dapat menata menajemennya secara baik,

---

<sup>107</sup> Faridah Alawiyah, **Pendidikan...** Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014

<sup>108</sup>Supangat, “*Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*” dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Tahun 15 Nomor 1.h.155.

<sup>109</sup>Minnah, Ek Widdah, Asep Suryana, dkk.*Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah.* (Bandung: Alfabeta 2012) h. 5

dapat menyediakan sarana dan prasana pendidikan yang memadai, serta dapat memberi kesejahteraan yang cukup kepada para tenaga pendidikannya. Sebaliknya jika yayasan yang menaunginya tidak memiliki kesiapan dana yang cukup maka manajemen, sarana dan prasarana pendidikan, serta kesejahteraan tenaga pendidikannya akan sangat membutuhkan perhatian lebih. Hal ini berimbas pada mutu pendidikan yang diselenggarakan.<sup>110</sup>

*Keempat*, beban kurikulum di madrasah yang cukup berat. Kurikulum yang diterapkan di madrasah adalah 100% kurikulum sekolah umum ditambah dengan kurikulum berciri khas agama. Mata pelajaran keislaman menjadi tambahan dengan proporsi sepenuhnya diserahkan kepada madrasah dan persentasi kurikulumnya 100% agama dan 100% umum<sup>111</sup>. Hal ini mengakibatkan beban belajar siswa madrasah lebih berat dibandingkan dengan siswa sekolah umum. Seperti diungkap Junaidi<sup>112</sup> yaitu di satu sisi pendidikan madrasah harus memperkaya dengan ilmu-ilmu agama, namun disisi lain harus memahamkan diri pada pengetahuan umum sehingga dikhawatirkan penguasaan ilmunya justru setengah-setengah. Hal ini menjadikan proses pendidikan di madrasah tidak optimal. Sejalan dengan pendapat Marwan<sup>113</sup> yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa kelemahan pendidikan Islam antara lain alokasi waktu pendidikan di madrasah, isi kurikulum yang terlalu padat, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya kerjasama guru kurangnya kompetensi guru dalam ilmu yang diampu, serta kurangnya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan dalam perkembangan zaman, serta

---

<sup>110</sup> Faridah Alawiyah, **Pendidikan...** Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014

<sup>111</sup> Subhan, Arief.. *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 257.

<sup>112</sup> Junaidi "Reformasi Pendidikan" dalam *Bunga Rampai Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003) h. 77

<sup>113</sup> Sarijo, Marwan. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam. 1998. h 66;

pemberian metode pendidikan yang tidak tepat.<sup>114</sup>

Hal inilah yang menjadikan mutu pendidikan madrasah terutama madrasah swasta memiliki mutu rendah. Berbagai permasalahan madrasah tersebut masih belum diperoleh penyelesaiannya, meski begitu penyelenggaraan pendidikan madrasah terus berjalan. Kemenag maupun Kemendikbud sebagai aktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah perlu duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga dapat diperoleh titik temu yang selanjutnya dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

---

<sup>114</sup> Faridah Alawiyah, **Pendidikan...** Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbasis Pesantren terbagi menjadi empat bagian yaitu; tujuan akademik, tujuan sosial, tujuan spritual dan tujuan keterampilan. Dengan kata lain, terdapat empat kategori tujuan kurikulum Madrasah Aliyah (MA) yang berbais pesantren. Dengan kata lain, Madrasah Aliyah (MA) harus mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; Dalam bahasa kurikulum kompetensi ini dibagi menjadi yaitu; 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial, 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan Pembagian tersebut merupakan penjabaran dari tiga kategori tujuan menurut Taksonomi Blomm yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikut adalah contoh darir tujuan atau Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah yang lulusannya diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut;
2. Karakatristik isi atau konten kurikulum Madrasah Aliyah (MA) pondok pesantren di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu *Pertama*. Pondok Pesantren yang hanya mengembangkan kurikulum lokal berdasarkan karakteristik tujuan yang ditetapkan. *Kedua*, Pondok Pesantren



yang memiliki tiga komponen kurikulum dengan kepentingan tertentu, masing-masing kurikulum kementerian pendidikan dan kebudayaan, kurikulum kementerian agama dan kurikulum lokal Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren yang disesuaikan dengan kepentingan pesantren.

3. Proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah (MA) Non Pesantren dengan Madrasah Aliyah (MA) Berbasis Pesantren memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan itu terlihat pada waktu dan metode pembelajaran yang diterapkan masing masing. Proses kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah (MA) pesantren ini adalah *Pertama*, metode klasikal yang pelaksanaannya di lembaga pendidikan formal (madrasah) pada pagi hari, *kedua*, metode *Halaqah* yang pelaksanaannya pada saat pengajian atau pelajaran ekstra kurikuler keagamaan. Dengan kata lain, Pada prinsipnya, seluruh Madrasah Aliyah (MA) berbasis pesantren di Indonesia menggunakan model mengajar dengan empat penekanan yaitu model mengajar personal, model mengajar sosial, model mengajar pemrosesan informasi dan model mengajar behavioristik. Secara khusus, Madrasah Aliyah (MA) Berbasis pesantren memiliki karakter proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran perorangan (individual), metode kelompok, metode ceramah variasi, metode tanya jawab, metode simulasi, metode demonstrasi, metode kerja kelompok, metode pemberian tugas, metode *role playing*, metode wetonan metode sorogan dan sistem takhasus.
4. Secara umum model penilaian yang diterapkan di Madrasah terbagi dalam dua bentuk yaitu 1) Model penilaian akademik. Aspek akademik ini meliputi; a) memiliki nilai rapor lpyang lengkap untuk kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga); b) telah memiliki nilai ujian untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan; c) tidak terdapat nilai  $\leq 4,25$  baik untuk ujian tulis maupun ujian praktek seluruh mata pelajaran yang diujikan dengan nilai rata-rata Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

tidak boleh  $\leq 4,50$ . Dan 2) model penilaian Aspek Non-Akademik yang meliputi: a) nilai rata-rata kepribadian (kelakuan, kerajinan, dan kerapian) pada semester II kelas III minimal baik. b) Kehadiran di sekolah pada semester I dan II kelas III minimal 90 % dari jumlah hari efektif. Jika dikaitkan dengan model penilaian Kurikulum 2013, pada dasarnya, Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren menggunakan empat jenis penilaian yaitu; 1) penilaian diri sendiri, penilaian sosial, penilaian akademik dan penilaian keterampilan.

5. Menurut Nurahid dengan mengutip beberapa tulisan seperti pendapat Tilaar, Handayani, Mukhtar Buchari dan Abdul Aziz, bahwa problem pendidikan yang mempengaruhi pendidikan nasional dewasa ini adalah Sumber daya guru yang belum profesional, kurangnya tenaga guru yang profesional. Problem operasional, yaitu profesionalisme guru masih rendah, dan Faktor yang menghambat perkembangan madrasah selama ini adalah keterbatasan tenaga guru, ketidakjelasan status guru dan ketidaklayakan kualifikasi guru. Lebih jauh, Nurahid melalui penelitiannya tentang pengelolaan Madrasah Aliyah (MA) menyebutkan bahwa yang melatar belakangi problem institusi Madrasah Aliyah Umum adalah kurangnya tenaga guru yang sesuai dengan kualifikasi keilmuan, di samping itu juga masih kurangnya tenaga guru, terbatasnya dana anggaran pendidikan, kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kebutuhan siswa, jumlah mata pelajarannya terlalu banyak, bebannya terlalu berat dan orientasinya tidak jelas serta faktor siswa ini juga menjadi problem tersendiri, seperti latar belakang pendidikan siswa banyak lulusan dari SMP, di samping itu *inputnya* rendah, anaknya memang bandel, malas, dan tidak memiliki *basic* agama yang baik Di sisi lain problem yang terjadi di lapangan disebabkan karena masih banyak sarana-prasarana pembelajaran yang tidak layak, maka dengan tegas Arif Rahman berpendapat, bahwa titik lemahnya pendidikan itu disebabkan karena lemahnya pemerataan pendidikan yang kurang didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini peneliti mengemukakan rekomendasi tindak lanjut bagi pihak yang terkait sebagai berikut;

1. Tujuan kurikulum agar dikembangkan dengan menekankan pada empat tujuan, yaitu tujuan yang menekankan pada peningkatan kecerdasan spritual anak, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual dan kecerdasan fisik motorik
2. Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia hendaknya mengembangkan isi, konten dan bahan ajar yang relevan dengan berbagai tujuan yang telah ditetapkan melalui visi, misi dan tujuan Madrasah Aliyah (MA)
3. Seluruh Guru atau Murabbi Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia harus mengembangkan model pembelajaran yang kreatif dengan mengembangkan empat rumpun model mengajar yaitu model mengajar personal, model mengajar sosial, model mengajar pemrosesan informasi dan model mengajar beharistik
4. Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia harus mengembangkan dua model evaluasi kurikulum yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif dengan empat model penilaian hasil belajar yaitu model penilaian diri, penialain teman sejawat, penilaian akademik dan penilaian keterampilan
5. Madrasah Aliyah (MA) berbasis Pesantren di Indonesia harus bisa ikut berkompetisi untuk mengembangkan lulusannya dengan memanimalisasi berbagai problem yang dihadapi seperti problem sumber daya manusia, faktor anggaran, faktor kurikulum, faktor input dan faktor pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LkiS, 2001),
- Arends Arends, Richard II. *Learning to Teach*. (New York: Mc Graw Hill, 2004)
- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Jogjakarta ; Ar-Ruzz Media, 2010
- Arikunto, Suharsini (1995), *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Cet.11 Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi, dkk (2008) *Penelitian Tindakan Kelas*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arends, Richard II. (2004). *Learning to Teach*. New York: Mc Graw Hill.
- Brady, Laurie (1947). *Curriculum Development (Third Edition)*, Victoria, Australia: Prentice Hall,
- Brameld, Theodore. (1955). *Philosophies of Education in Cultural Perspectiv*, Holt, Rinehart and Winston : Toronto : London.
- Beauchamb, (1975). A. George. *Curriculum Theory*, Edisi III, Illinois Wilmette.
- Departemen Agama RO, *Nama dan Data Poetensi Pondok-pondok Pesantren Seluruh Indonesia*, 1984/1985
- Depag RI, Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Islam, *Pola Pembelajaran Di Pesantren*, Cet. I Tahun 2003
- Faridah Alawiyah, ***Pendidikan Madrasah Di Indonesia*** (*Islamic School Education in Indonesia* ) Aspirasi Vol. 5 No. 1, Juni 2014
- Hamalik, Oemar (2008). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008)
- Hamalik, Oemar. (2000). *Managemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- H.A.R. Tilar, *Beberapa Agenda Reformas*, 30-51 dan bandingkan H.A.R. Tilar, *Pendidikan, Kebudayaan*, 49-51.
- Ibrahim dan Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2009)
- Joyce, Bruce, Marsha Weil, and Beverly Showers . *Models of teaching*. (Boston: Allyn and Bacon, 1992).

- Junaidi“Reformasi Pendidikan” dalam *Bunga Rampai Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa, 2003) h. 77
- Mulyasa, E. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, dan kawan-kawan. (2008). *Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2007). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Miller, John P. dan Seller, Wayne, (1985) *curriculum Perspective and Practice*, Longman : New York dan London.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Nur Ahid, *Problem Madrasah Aliyah dan Solusi Pemecahannya*
- Print, Murray. (1993). *Curriculum Development and Design*. Second Edition, New South Wales Australia : Allen & Unwin
- Syaodih, Nana. (2008). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Syaodih, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT Rosdakarya : Bandung, 2008
- Sanjaya, Wina. (2005). *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)*. Jakarta : Kencana.
- Sanjaya, Wina. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Kurikulum Satun Tingkat Pendidikan (KTSP)*. Jakarta : Kencana.
- Sanjaya, Wina. (2007). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuaalitatif, Kuantitatif dan Research and Development*, Bandung : Alfabeta, 2008
- Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.2009
- Laporan Pelaksanaan Banprof TPKProvinsi melalui Jarkur, Puskur 2007
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah, Sekolah dan Perguruan Tinggi*, Jakarta : PT Grafindo Persada, 2007
- Miller, John P. dan Seller, Wayne, (1985) *curriculum Perspective and Practice*, Longman : New York dan London, 1985)
- Moh. Kenang Slamet, *Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren Di Ma Futuhiyyah*
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung : PR Remaja Rosdakarya, 2007.

- Mohamad Surya, *Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran*. Bandung : Yayasan Bhakti Winaya, 2003.
- Moleong, Lexy. J. (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin (2007), *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- (2008), *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru PPG) pra jabatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PeratPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Panduan Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah, (Jakarta : Ditpekapontren, Oktober 2003
- Ralph Tylor, *Basic Priciples of Currculum and Interaction*. Chigago : The University ofChigago Press, 1949
- Rudi Susilana dan Kawan-Kawan, *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Bandung : Tim Pengembangan MKDP dan Pembelajaran Jurusan Kurikulum dan Tekbologi Pendidikan UPI Bandung, 2006
- Robert Zais, *Curriculum Principles and Foundation*. New York : Harper and Row Publisher., 1876.
- Sarijo, Marwan. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam. 1998.
- Supangat, “*Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional*” dalam *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Tahun 15 Nomor 1.h.155.
- Subhan, Arief.. *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2012
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (suatu kajian tentang unsur dan nilai sistem pesantren)*, Jakarta : INIS, 1994

Zamachsyari Dhofier, *Tradisi Pesantrenm*, Jakarta : LP3S, 1982

M. Ridlwan Nasir, *Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal: Pondok Pesantren di Tengah Arus Perubahan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif* (Yogyakarta: LkiS, 2007)

Minnah, Ek Widdah, Asep Suryana, dkk. *Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pengembangan Mutu Madrasah*. (Bandung: Alfabeta 2012) h. 5

Muhammad Nasir dan kawan kawan, *Karakteristik Psantren di Kota Samarinda, Hasil Penelitian*, 2004. H.59

Struktur Isi Kurikulum Madrasah Aliyah (MA) Futuhiyyah 1 Rembang

Departemen Pendidikan Nasional. (2006). *Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*.